

**Analisis Faktor Penyebab Indonesia Menjadi Negara Mitra
BRICS**

*“Factor Analysis of Why Indonesia Became a BRICS Partner
Country”*

Diajukan guna melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk meraih
Gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dengan Spesialisasi
Hubungan Internasional



SKRIPSI

DISUSUN OLEH

SYAFIRA MAHARANI SUARA

146420121008

**PRODI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU
HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS
PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB INDONESIA MENJADI NEGARA MITRA
BRICS**

Nama: Syafira Maharani Suara

NIM: 146420121008

Telah Disetujui oleh Tim Pembimbing

Pada 22 Maret 2025

Pembimbing I

Nurinaya, M.H.I.
NIDN. 1417129501



(.....)

Pembimbing II

Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201



(.....)

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB INDONESIA MENJADI NEGARA MITRA
BRICS**

Nama: Syafira Maharani Suara

NIM: 146420121008

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada: 21 April 2025

Dekan FHSIPOL



Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201

Tim Penguji Skripsi

1. Etik Siswatiningrum, S.IP., M.H.I.
NIDN. 1409018401



(.....)

2. Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201



(.....)

3. Nurinaya, M.H.I.
NIDN. 1417129501



(.....)

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syafira Maharani Suara
NIM : 146420121008
Judul penelitian : Analisis Faktor Penyebab Indonesia Menjadi Negara
Mitra BRICS

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan data tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dengan mencantumkan sumber kutipan pada daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun hukum atas perbuatan tersebut.

Sorong, 20 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Syafira Maharani Suara

NIM. 146420121008

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mendorong Indonesia untuk menjadi negara mitra BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) dari sudut pandang Ekonomi Politik Internasional (EPI) dan kepentingan nasional. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatoris-analitis, penelitian ini mengidentifikasi bahwa keputusan Indonesia tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh pertimbangan geopolitik dan diplomatik. Dari sisi ekonomi, BRICS memberikan peluang untuk diversifikasi mitra dagang, akses terhadap sumber pendanaan alternatif melalui New Development Bank (NDB), dan kerjasama pembangunan infrastruktur dan teknologi. Dari sisi politik, kemitraan ini memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan global yang semakin multipolar dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan ekonomi Barat. Selain itu, prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif memungkinkan Indonesia untuk menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan ekonomi tanpa terikat pada blok tertentu. Oleh karena itu, kemitraan dengan BRICS dianggap sebagai langkah strategis dalam meningkatkan daya saing dan peran ekonomi Indonesia di kancah internasional.

Kata kunci: BRICS, Ekonomi Politik Internasional, Kepentingan Nasional.

Abstract

This research analyses the factors that drove Indonesia to become a BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) partner country from the perspective of International Political Economy (EPI) and national interest. Using a qualitative method with an explanatory-analytical approach, this research identifies that Indonesia's decision was not only driven by economic factors, but also by geopolitical and diplomatic considerations. On the economic side, BRICS provides opportunities for diversification of trading partners, access to alternative sources of funding through the New Development Bank (NDB), and co-operation on infrastructure and technology development. Politically, the partnership strengthens Indonesia's position in an increasingly multipolar global order and reduces dependence on Western economic powers. In addition, the principle of free and active foreign policy allows Indonesia to establish relations with various economic powers without being tied to a particular bloc. Therefore, the

partnership with BRICS is considered a strategic step in enhancing Indonesia's competitiveness and economic role in the international arena.

Keyword: BRICS, International Political Economy, National Interest.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisis Faktor Penyebab Indonesia Menjadi Negara Mitra BRICS*". Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kemudahan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi yang tiada henti dalam setiap langkah penulis. Ibu Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah memberikan arahan, kritik, serta saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini. Teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabat terdekat, yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta diskusi akademik yang bermanfaat selama proses penelitian ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hubungan internasional dan kebijakan luar negeri Indonesia.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, serta pembuat kebijakan dalam memahami dinamika keterlibatan Indonesia dalam BRICS.

MOTTO

Tidak perlu iri dengan orang-orang yang mencapai garis finish lebih cepat, karena kita memiliki garis finish yang berbeda dengan waktu tempuh yang berbeda juga. Nikmati saja proses dan kesulitan ini, “*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberi ridho dan kenikmatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik dan tepat waktu.
2. Rasulullah SAW, terimakasih telah membawa masa kecerahan kepada umat manusia, dan menjadi contoh teladan bagi penulis.
3. Kedua orangtua, ayah dan ibu yang tidak pernah lelah mendukung dengan doa dan selalu memberi motivasi hidup untuk penulis. Yang tidak pernah lelah mencari uang untuk membiayai perkuliahan penulis sehingga dapat menyelesaikan studinya.
4. Dosen pembimbing I skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik, ibu Nurinaya, M.H.I. Terimakasih telah memberi arahan dan motivasi akademik selama 7 semester, dan telah mengarahkan penulis selama pengerjaan skripsi.
5. Dosen pembimbing II skripsi, ibu Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. Terimakasih telah membantu penulis dalam memperbaiki sistematika penulisan dalam skripsi ini, dan selalu memberi motivasi pada penulis selama perkuliahan.
6. Ibu Etik Siswati Ningrum, M.H.I selaku Ka. Prodi yang membantu penulis dalam pengurusan berkas studi.
7. Bapak Danu Trywijaya, M.H.I. yang terkadang memberikan motivasi, hiburan dan tekanan selama masa perkuliahan penulis.
8. Kepada seluruh keluarga besar penulis, terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penulis selama perkuliahan dan pengerjaan tugas akhir ini.
9. Fransiskus Xaverius Stanislaus Runaki, teman seangkatan yang selalu mengajarkan kesabaran kepada penulis, yang selalu mengayomi kami dalam urusan akademik.

10. Diana Warmasen, teman seangkatan yang mendukung moral dan menemani penulis selama bimbingan dan proses pengerjaan proposal hingga menyelesaikan skripsi.
11. Sitty Maisyaro Kalauw, teman yang bersama dari SMA hingga perkuliahan ini. Yang selalu memberi dukungan moral kepada penulis, meskipun kadang hubungan pertemanan ini naik turun.
12. Wiwik Pratiwi, terimakasih selalu ada disaat penulis membutuhkan udara segar saat mengerjakan skripsi, dan selalu memberikan penulis dukungan moral.
13. Laili Mufidatul Almas, terimakasih untuk dukungan moral terhadap penulis, dan terkadang menemani penulis untuk bimbingan.
14. Ayu Dwinta Sary Saifudin, terimakasih sudah membantu penulis menyediakan tempat dan internet untuk penulis agar bisa mengerjakan skripsi.
15. Dita Nurul Fitriah Ningsi, teman seangkatan yang kadang mengantar penulis ke kampus, dan selalu mendengar cerita penulis dengan baik.
16. Jenny Laurens, teman seangkatan penulis yang selalu menjadi pendengar yang baik bagi penulis.
17. Seluruh teman seangkatan yang tidak bisa disebut namanya satu persatu, terimakasih banyak atas dukungan dan cintanya kepada penulis selama perkuliahan hingga pengerjaan tugas akhir ini.
18. Kepada dia yang tidak dapat disebutkan namanya, terimakasih untuk motivasi untuk penulis agar bisa hidup lebih baik.
19. Kepada Staf FHSIPOL, terima kasih telah membantu penulis dalam menyiapkan berkas studi.
20. Terima Kasih kepada ATEEZ, Seventeen, AKB48 dan JKT48 yang setiap lagunya memotivasi penulis saat pengerjaan tugas akhir ini.
21. Dan yang paling penting, terimakasih untuk Penulis yang selalu kuat dalam menghadapi segala macam ujian dalam perkuliahan dan pengerjaan tugas akhir ini.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Pembatasan Masalah.....	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Studi Pustaka.....	10
1.6. Kerangka Dasar Pemikiran.....	16
1.6.1. Ekonomi Politik Internasional (Robert Gilpin).....	16
1.6.2. Kepentingan Nasional (Horsman dan Marshall).....	18
1.7. Metode Penelitian.....	22
1.7.1. Unit Analisa.....	22
1.7.2. Sumber Data Penelitian.....	23
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.8. Argumen Dasar.....	23
1.9. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II BRICS DAN POSISI INDONESIA DALAM DUNIA INTERNASIONAL

2.1. Latar Belakang dan Sejarah Pembentukan BRICS.....	27
2.1.1. Sejarah dan Tujuan BRICS.....	27
2.1.2. Fase Penguatan Kerjasama.....	31
2.1.3. Perluasan Agenda.....	37
2.1.4. Fase Tantangan Baru.....	39
2.2. Peran dan Pengaruh BRICS dalam Ekonomi dan Politik Global.....	41
2.3. Keterkaitan Indonesia dengan BRICS.....	44
2.4. Perspektif Indonesia dalam Kerjasama Global.....	47

BAB III FAKTOR EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL PENYEBAB INDONESIA MENJADI NEGARA MITRA BRICS

3.1. Motivasi Ekonomi Indonesia untuk Bergabung dengan BRICS.....	50
3.1.1. Memperluas Akses Pasar.....	50
3.1.2. Mengurangi Resiko.....	51
3.1.3. Meningkatkan Daya Tawar.....	52
3.1.4. Memanfaatkan Permintaan Pasar.....	54
3.1.5. Memperkuat Kerjasama Sebelumnya.....	55
3.2. Motivasi Politik Indonesia dalam Dinamika Global.....	60
3.2.1. Meningkatkan Kemandirian Politik.....	60
3.2.2. Mendorong Tatanan Global yang Lebih Adil.....	61

3.2.3. Tanggung Jawab Sebagai Pemimpin Asean.....	65
3.2.4. Diplomasi Global Yang Aktif.....	69
3.3. Analisis Berdasarkan Perspektif International political economy.....	75
3.3.1. Liberalisme: BRICS sebagai Platform Integrasi Ekonomi Global..	75
3.3.2. Marxisme: Kritik terhadap Struktur Ekonomi Global.....	75
BAB IV FAKTOR KEPENTINGAN NASIONAL PENYEBAB INDONESIA MENJADI NEGARA MITRA BRICS	
4.1. Dimensi Kepentingan Nasional.....	77
4.1.1. Dimensi Ekonomi.....	77
4.1.2. Dimensi Politik.....	81
4.2. Motivasi Strategi Mencapai Kepentingan Nasional.....	83
4.2.1. Diversifikasi Mitra Dagang.....	84
4.2.2. Akses Pembiayaan Infrastruktur.....	87
4.2.3. Peluang Investasi.....	89
4.2.4. Peran dalam Ekonomi Global.....	92
4.2.5. Kepentingan yang Beragam dalam Masyarakat.....	94
4.2.6. Identitas dan Diplomasi.....	96
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	99
5.2. Saran.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	27
Tabel 2.2	28
Tabel 3.1	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	29
Gambar 2.2	30
Gambar 2.3	32
Gambar 2.4	33
Gambar 2.5	35
Gambar 2.6	36

DAFTAR ISTILAH

Advokasi	:	Upaya untuk membela, mendukung, atau memperjuangkan suatu isu, kebijakan, atau hak seseorang atau kelompok agar mendapatkan perhatian dan perubahan yang diinginkan, baik di tingkat sosial, hukum, maupun politik.
Akuntabilitas	:	Prinsip di mana seseorang, organisasi, atau pemerintah bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil serta harus dapat menjelaskannya kepada pihak yang berwenang atau masyarakat.
<i>ASEAN Economic Community (AEC)</i>	:	Integrasi ekonomi regional di antara negara-negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi bersama.
<i>ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)</i>	:	Kerangka kerja strategis ASEAN dalam menghadapi dinamika geopolitik dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.
<i>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)</i>	:	Bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh Tiongkok pada tahun 2015 untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan di Asia serta wilayah lainnya.
AUKUS	:	Pakta keamanan trilateral antara Australia, Inggris (UK), dan Amerika Serikat (USA) yang diumumkan pada 15 September 2021.
Bank Dunia	:	Lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman dan bantuan ke negara-negara berkembang untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
<i>Belt and Road Initiative (BRI)</i>	:	Strategi pembangunan infrastruktur global yang dipelopori oleh China untuk meningkatkan konektivitas dan kerja sama ekonomi di seluruh dunia.
BRICS	:	BRICS adalah blok ekonomi negara berkembang yang terdiri dari lima negara yaitu Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan
BRICs	:	Konsep awal BRICS sebelum Afrika Selatan bergabung

<i>BRICS Pay</i>	:	Inisiatif sistem pembayaran digital yang dikembangkan oleh negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) untuk memfasilitasi transaksi lintas batas tanpa bergantung pada dolar AS atau sistem keuangan Barat seperti SWIFT.
<i>BRICS Plus</i>	:	Inisiatif untuk memperluas kerja sama ekonomi dan politik antara negara-negara BRICS dengan negara-negara berkembang lainnya di luar anggota inti BRICS.
<i>BYD</i>	:	Perusahaan multinasional asal Tiongkok yang bergerak di bidang otomotif, energi terbarukan, dan elektronik.
<i>COVID-19</i>	:	Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok, pada akhir 2019
<i>Crude Palm Oil (CPO)</i>	:	Minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari daging buah kelapa sawit (<i>Elaeis guineensis</i>) melalui proses ekstraksi dan pemurnian awal.
<i>Dedolarisasi</i>	:	Proses pengurangan ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi internasional, cadangan devisa, dan sistem keuangan suatu negara
<i>Deforestasi</i>	:	Proses penggundulan atau penghilangan hutan secara permanen, biasanya akibat aktivitas manusia seperti penebangan pohon, pertanian, dan urbanisasi.
<i>Diskriminatif</i>	:	Sikap atau tindakan yang membedakan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan faktor tertentu, seperti ras, agama, gender, usia, atau status sosial.
<i>Diversifikasi</i>	:	Strategi yang digunakan untuk menyebarkan risiko dengan memperluas atau memvariasikan jenis produk, investasi, atau pasar.
<i>Doha Round</i>	:	Serangkaian negosiasi perdagangan global di bawah WTO (World Trade Organization) yang dimulai pada tahun 2001 di Doha, Qatar
<i>Embargo</i>	:	Larangan atau pembatasan yang diberlakukan oleh

		suatu negara atau organisasi internasional terhadap negara lain dalam bentuk blokade perdagangan, ekonomi, atau militer.
FDI	:	Investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari suatu negara ke dalam bisnis atau aset di negara lain dengan tujuan memperoleh kendali dan keuntungan jangka panjang.
<i>Federal Reserve</i>	:	Bank sentral Amerika Serikat, yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan regulasi perbankan di AS.
<i>Five-Point Consensus</i>	:	Kesepakatan yang dicapai oleh para pemimpin ASEAN pada April 2021 untuk menangani krisis politik di Myanmar setelah kudeta militer pada 1 Februari 2021.
Fluktuasi	:	Perubahan naik dan turun suatu nilai, kondisi, atau keadaan dalam periode waktu tertentu. Fluktuasi bisa terjadi dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, harga barang, nilai tukar mata uang, suhu, atau tingkat permintaan dan penawaran di pasar.
G20	:	Forum internasional yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa, yang bekerja sama dalam isu ekonomi global, keuangan, perdagangan, dan pembangunan.
G7	:	Kelompok tujuh negara maju dengan ekonomi terbesar di dunia yang memiliki pengaruh besar dalam ekonomi global, politik, dan keamanan internasional.
Geopolitik	:	Studi tentang bagaimana faktor geografis (lokasi, sumber daya, iklim, dan topografi) memengaruhi politik, kekuasaan, dan hubungan internasional.
<i>Global Security Initiative (GSI)</i>	:	Inisiatif keamanan global yang diperkenalkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada April 2022.
<i>Global South</i>	:	Istilah yang merujuk pada negara-negara berkembang di Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Oseania.
<i>Gross Domestic Product (GDP)</i>	:	Total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun atau satu kuartal)
IMF	:	International Monetary Fund atau Dana Moneter

		Internasional adalah organisasi global yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dunia, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan keuangan serta saran kebijakan kepada negara-negara anggotanya.
Inklusif	:	Terbuka untuk semua orang tanpa diskriminasi, baik dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, politik, maupun budaya.
Interdependensi	:	Hubungan saling ketergantungan antara dua pihak atau lebih, di mana setiap pihak membutuhkan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu.
<i>Internet of Things</i> (IoT)	:	Konsep di mana perangkat fisik saling terhubung melalui internet untuk bertukar data dan beroperasi secara otomatis tanpa campur tangan manusia.
Intra-Blok	:	Interaksi, kerja sama, atau hubungan yang terjadi di dalam suatu blok atau kelompok tertentu, seperti blok ekonomi, politik, atau perdagangan
Intra-BRICS	:	Hubungan perdagangan, investasi, dan kerja sama antara negara-negara anggota BRICS.
Islam Moderat	:	Pemahaman Islam yang bersifat inklusif, toleran, dan seimbang, menghindari ekstremisme baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme.
Katalis	:	Pendorong atau faktor yang mempercepat suatu proses tanpa secara langsung terlibat dalam hasil akhirnya.
Kerjasama Selatan-Selatan	:	Bentuk kerja sama antar negara berkembang di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan budaya untuk mencapai pembangunan bersama tanpa bergantung pada negara maju.
Konstruktif	:	Sifat atau tindakan yang membangun, memberikan manfaat, atau menghasilkan sesuatu yang positif.
KTT	:	Konferensi Tingkat Tinggi adalah pertemuan resmi antara para pemimpin negara atau pemerintahan untuk membahas isu-isu penting, seperti politik, ekonomi, keamanan, lingkungan, dan kerja sama internasional.

LDCs	:	Least Developed Countries atau Negara-Negara Terbelakang adalah kategori negara yang ditetapkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) berdasarkan tingkat kemiskinan, keterbelakangan ekonomi, dan kerentanan terhadap guncangan ekonomi serta lingkungan
<i>Light Rail Transit</i> (LRT)	:	Sistem transportasi berbasis rel yang menggunakan kereta ringan untuk mengangkut penumpang dalam jumlah sedang hingga besar di jalur khusus.
Likuiditas	:	Kemampuan suatu aset untuk dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat tanpa kehilangan nilai yang signifikan.
<i>Local Currency Transactions</i> (LCT)	:	Transaksi yang dilakukan menggunakan mata uang lokal dari masing-masing negara dalam suatu kerja sama ekonomi atau perdagangan internasional, tanpa perlu menggunakan mata uang asing seperti dolar AS (USD) sebagai perantara.
Makroekonomi	:	Cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kinerja, struktur, dan perilaku ekonomi secara keseluruhan, baik dalam lingkup nasional maupun global.
<i>Mass Rapid Transit</i> (MRT)	:	Sistem transportasi umum berbasis kereta yang beroperasi di jalur khusus, baik bawah tanah maupun layang, untuk mengangkut penumpang dalam jumlah besar dengan cepat dan efisien.
MDGs	:	Millennium Development Goals atau Tujuan Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan global yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000 untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan, seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan
<i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)	:	Dokumen kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menyatakan niat mereka untuk bekerja sama dalam suatu proyek atau bidang tertentu.
Mitra Tradisional	:	Negara, perusahaan, atau organisasi yang telah menjalin hubungan kerja sama jangka panjang dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, diplomasi, pertahanan, dan ekonomi.
Multilateral	:	Kerjasama atau hubungan yang melibatkan lebih dari dua negara atau pihak dalam suatu isu tertentu,

		biasanya dalam konteks diplomasi, perdagangan, atau organisasi internasional.
<i>Nation-state-centric economy</i>	:	Sistem ekonomi yang berfokus pada kepentingan dan kedaulatan negara dalam mengatur ekonomi nasionalnya.
NDB	:	New Development Bank atau Bank Pembangunan Baru adalah lembaga keuangan yang didirikan oleh negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang
<i>Net Zero Emissions (NZE)</i>	:	Kondisi di mana jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dilepaskan ke atmosfer seimbang dengan jumlah yang diserap kembali, sehingga tidak ada peningkatan emisi bersih di atmosfer.
Netralitas	:	Sikap tidak berpihak atau tidak terlibat dalam konflik, perselisihan, atau kepentingan tertentu.
OECD	:	Organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara maju dan berkembang yang berkomitmen untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, perdagangan bebas, inovasi, serta kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
Pasar Internasional	:	Kegiatan perdagangan yang melibatkan transaksi barang, jasa, atau modal antara negara.
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang didirikan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mempromosikan kerja sama internasional, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi global
Pluralisme	:	Pandangan yang mengakui, menghargai, dan menerima keberagaman dalam masyarakat, baik dalam aspek agama, budaya, politik, maupun sosial.
Proteksionisme	:	Kebijakan ekonomi yang digunakan oleh suatu negara untuk melindungi industri domestik dari persaingan asing dengan membatasi impor dan mendorong produksi dalam negeri.
<i>Purchasing Power</i>	:	Paritas Daya Beli adalah metode perhitungan yang

<i>Parity (PPP)</i>		membandingkan daya beli mata uang antarnegara berdasarkan harga barang dan jasa yang sama.
Quad	:	Aliansi strategis antara Amerika Serikat (AS), India, Jepang, dan Australia yang bertujuan untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik.
Reaktor Kecil	Modular :	Jenis reaktor nuklir berukuran kecil dan modular, yang dapat dibangun di pabrik dan dirakit di lokasi dengan lebih cepat dibandingkan reaktor nuklir konvensional.
Regional	:	Istilah yang merujuk pada suatu wilayah atau daerah tertentu yang memiliki karakteristik geografis, ekonomi, budaya, atau politik yang khas.
<i>Smart Cities</i>	:	Konsep perkotaan yang menggunakan teknologi digital dan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.
Smelter	:	Fasilitas atau pabrik yang digunakan untuk melebur dan memurnikan bijih mineral menjadi logam murni.
<i>Soft Power</i>	:	Kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain tanpa menggunakan paksaan atau kekuatan militer.
<i>Startup</i>	:	Perusahaan rintisan yang biasanya berfokus pada inovasi teknologi, model bisnis baru, dan pertumbuhan cepat
Surplus	:	Kondisi di mana jumlah yang tersedia lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan atau digunakan.
SWIFT	:	<i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i> adalah jaringan komunikasi keuangan global yang digunakan oleh bank dan lembaga keuangan untuk mengirim dan menerima informasi transaksi dengan aman, standar, dan efisien.
Terfragmentasi	:	Kondisi di mana suatu kesatuan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil yang tidak terhubung

- secara utuh.
- Uni Afrika : Organisasi antar-pemerintah yang terdiri dari 55 negara di benua Afrika.
- Volatilitas : Ukuran seberapa besar suatu nilai (misalnya harga saham, mata uang, atau komoditas) berfluktuasi dalam periode waktu tertentu
- WTO : World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah organisasi internasional yang bertugas mengatur dan mengawasi perdagangan global antarnegara agar berjalan dengan adil, lancar, dan bebas hambatan.
- Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* (ZOPFAN) : Deklarasi yang menetapkan Asia Tenggara sebagai kawasan damai, bebas, dan netral dari pengaruh atau campur tangan kekuatan eksternal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis baik dari sisi ekonomi maupun politik luar negeri. Indonesia menjadi salah satu titik persilangan jalur perdagangan internasional yang sangat penting¹. Memberikan keuntungan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, perdagangan, serta posisi geopolitik Indonesia. Indonesia berada di jalur lalu lintas utama perdagangan global, khususnya Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Membuat Indonesia menjadi titik transit yang penting dalam rantai pasok dunia. Pasar domestik Indonesia yang sangat besar, sehingga menarik bagi banyak investor asing yang ingin memperluas pasar mereka. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak bumi, gas alam, batubara, nikel, dan karet.

Indonesia memiliki cadangan minyak bumi sekitar 2,41 miliar barel dan gas bumi sebesar 35,3 triliun kaki kubik². Cadangan gas alam yang cukup besar, dengan total sekitar 41,62 triliun kaki kubik (*standard cubic feet*) pada tahun 2021³. Memiliki cadangan batubara yang diperkirakan mencapai 38,84 miliar ton⁴. Indonesia merupakan salah satu penghasil nikel terbesar di dunia dengan cadangan bijih nikel mencapai 5,3 miliar ton⁵. Secara keseluruhan, kekayaan SDA Indonesia dalam bentuk gas alam, batubara, nikel, dan karet

¹ Haryo Limanseto. "Menjadi Global Middle Power, Peran Penting dan Strategis Indonesia Kembali Dilanjutkan Dengan Chairmanship ASEAN 2023", *www.ekon.go.id*, 3 Desember 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4786/menjadi-global-middle-power-peran-penting-dan-strategis-indonesia-kembali-dilanjutkan-dengan-chairmanship-asean-2023>

² CNBCIndonesia. "Bejibun! Cadangan Terbukti Minyak RI Masih 2,41 Miliar Barel", *cnbnIndonesia*, 30 Oktober 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231030144918-4-484837/bejibun-cadangan-terbukti-minyak-ri-masih-241-miliar-barel>

³ Aulia Mutiara Hatia Putri. "Punya Cadangan Gas Raksasa, Tapi RI Impor dari Negara Ini", *cnbnIndonesia*, 16 Mei 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230516075229-128-437638/punya-cadangan-gas-raksasa-tapi-ri-impor-dari-negara-ini>

⁴ Kementerian ESDM. "Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong", *esdm.go.id*, 27 Juli 2021, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong>

⁵ Verda Nano Setiawan, "Umur Cadangan Nikel RI Tinggal 30 Tahun Lagi, Ini Buktinya!", *cnbcIndonesia*, 1 Juli 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240701164552-4-550858/umur-cadangan-nikel-ri-tinggal-30-tahun-lagi-ini-buktinya>

memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian negara. Namun, pengelolaan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ini di masa depan.

Indonesia adalah anggota dari ASEAN dan G20, dua organisasi ekonomi besar. Resmi memegang Presidensi G20 selama satu tahun penuh, dimulai sejak 1 Desember 2021 hingga Konferensi Tingkat Tinggi atau yang biasa disebut KTT G20 pada November 2022 di Bali⁶ menunjukkan pengaruh Indonesia dalam perekonomian global, sementara di ASEAN Indonesia memperkuat perannya sebagai pemimpin kawasan Asia Tenggara. Indonesia menerapkan prinsip "bebas aktif" dalam politik luar negerinya⁷. Bebas artinya Indonesia tidak berpihak pada blok atau kekuatan manapun, sedangkan aktif berarti Indonesia aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional di berbagai Forum dan Organisasi Internasional. Prinsip ini memungkinkan Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara-negara di berbagai blok politik. Salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia sering kali memimpin inisiatif-inisiatif penting di kawasan, seperti penyelesaian konflik dan kerjasama ekonomi. Indonesia juga berperan aktif dalam isu-isu regional, termasuk sengketa Laut China Selatan dan promosi stabilitas politik di Asia Tenggara. Indonesia sering berperan sebagai mediator atau juru damai dalam konflik-konflik internasional dan regional. Misalnya, Indonesia pernah menjadi mediator dalam proses perdamaian di Kamboja⁸. Peran ini memperkuat citra Indonesia yang mendukung perdamaian dunia.

Posisi strategis ini memberikan potensi besar bagi Indonesia untuk menarik investasi asing dan meningkatkan ekspor dengan kerjasama internasional yang baik, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya untuk menjadi pusat ekonomi di Asia Tenggara. Politik luar negeri Indonesia berusaha menjaga stabilitas domestik dan kawasan. Indonesia mempromosikan kerjasama yang mendukung keamanan regional agar

⁶ Setkab. "Keberhasilan Keketuaan Indonesia pada Forum G20", *setkab.go.id*, 30 Desember 2022, <https://setkab.go.id/keberhasilan-keketuaan-indonesia-pada-forum-g20/>

⁷ Firdhan Dwi Kurniawan et al. "Pengaruh Prinsip Bebas-Aktif Dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus BRICS", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Desember 2023. hal 361

⁸ Olivia Sabat. "Sejarah Jakarta Informal Meeting, Berhasil Akhiri Konflik Kamboja-Vietnam", *detik.com*, 7 Oktober 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5757087/sejarah-jakarta-informal-meeting-berhasil-akhiri-konflik-kamboja-vietnam>

ancaman eksternal dapat diminimalisir. Posisi strategis ini memperkuat peran Indonesia dalam memainkan utama di Asia Tenggara dan meningkatkan pengaruhnya di tataran internasional, terutama dalam isu-isu yang terkait dengan perdamaian dan keamanan.

BRICS merupakan aliansi negara-negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan⁹, memiliki posisi penting dalam ekonomi dan politik internasional karena gabungan sumber daya, populasi, dan potensi ekonominya yang besar. BRICS berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dunia, mengingat lima negara anggota ini memiliki ekonomi terbesar di antara negara berkembang. China dan India, khususnya, adalah dua negara dengan ekonomi terbesar di Asia, sementara Rusia memiliki sumber daya energi yang melimpah, dan Brasil serta Afrika Selatan adalah negara terdepan di Amerika Selatan dan Afrika. PDB gabungan yang terus meningkat, BRICS berpotensi menggeser dominasi ekonomi negara-negara Barat. Negara-negara BRICS memiliki lebih dari 40% populasi dunia¹⁰, yang berarti mereka adalah pasar besar untuk perdagangan dan investasi. Populasi besar ini memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan, baik dalam kapasitas sebagai pasar konsumen maupun sebagai tenaga kerja produktif. Diversifikasi ini membuat anggota BRICS mampu berkolaborasi secara strategis dalam mengisi kebutuhan ekonomi masing-masing anggota.

Salah satu inisiatif penting BRICS adalah pendirian *New Development Bank* (NDB) yang bertujuan mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan di negara-negara berkembang¹¹. NDB ini menawarkan alternatif terhadap institusi keuangan Barat seperti *World Bank* (Bank Dunia) dan IMF (*International Monetary Fund*), yang seringkali dipandang menguntungkan negara-negara maju. BRICS memiliki ambisi untuk mengurangi dominasi

⁹ Jim O'Neill, "Building Better Global Economic BRICs", 30 November 2001, hal 1

¹⁰ Rev. "Negara BRICS vs G20 vs G7, Siapa Raja Ekonomi Dunia?", *CNBCIndonesia*, 25 Agustus 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230825132327-128-466136/negara-brics-vs-g20-vs-g7-siapa-raja-ekonomi-dunia>

¹¹ Najmi Firdaus, Sulisty Widayanto, dan Irma Indrayani, "BRICS Against Hegemony Of The United States Dollar In The International Monetary system", *Journal of Social Political Sciences*, November 2023. hal 451

dolar AS dalam perdagangan internasional¹². Upaya ini diwujudkan dengan perjanjian perdagangan bilateral antar anggota BRICS menggunakan mata uang masing-masing negara, yang bertujuan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi anggotanya dan meminimalisir dampak dari fluktuasi dolar AS. BRICS mempromosikan kerjasama antara negara-negara Selatan (negara berkembang) sebagai alternatif terhadap dominasi negara-negara Utara (negara maju). Hal ini bertujuan untuk menciptakan pola hubungan ekonomi yang lebih adil dan berimbang di mana negara-negara berkembang dapat saling mendukung.

BRICS menggunakan pengaruhnya di organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperjuangkan isu-isu negara berkembang, termasuk reformasi dalam Dewan Keamanan PBB. Negara-negara ini berupaya agar tatanan dunia lebih merefleksikan keseimbangan kekuatan yang ada di abad ke-21, di mana negara berkembang memainkan peran yang semakin besar. Secara geopolitik, BRICS seringkali dipandang sebagai kekuatan yang dapat menyeimbangkan dominasi negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa. BRICS memiliki kepentingan bersama dalam mendukung sistem multipolar yang tidak hanya didominasi oleh kekuatan tunggal¹³, terutama dalam isu-isu seperti keamanan, perdagangan, dan pembangunan. Kelima negara ini memiliki posisi strategis di berbagai wilayah dunia, sehingga kerjasama mereka dalam isu global dapat memperkuat posisi negara berkembang secara keseluruhan dalam menentukan kebijakan-kebijakan internasional.

Ketertarikan Indonesia terhadap BRICS adalah bagian dari upaya untuk memaksimalkan posisi strategisnya dalam dinamika ekonomi dan politik internasional. Negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan non-blok, Indonesia telah menunjukkan minat untuk memperluas kolaborasi internasionalnya secara strategis, termasuk dengan BRICS. Sejak awal

¹² Najmi Firdaus, Sulisty Widayanto, dan Irma Indrayani, “*BRICS Against Hegemony Of The United States Dollar In The International Monetary system*”, *Journal of Social Political Sciences*, November 2023. hal 450

¹³ Najmi Firdaus, Sulisty Widayanto, Irma Indrayani, “*BRICS AGAINST HEGEMONY OF THE UNITED STATES DOLLAR IN THE INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM*”, *Journal of Social Political Sciences*, November 2023. hal 10

kemerdekaannya, Indonesia berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, yaitu tidak berpihak pada blok kekuatan global manapun, baik blok Barat yang umumnya Kapitalis maupun blok Timur yang umumnya Komunis. Merupakan anggota aktif Gerakan Non-Blok¹⁴, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menjaga jarak dari pengaruh kekuatan besar dunia dan berupaya untuk tidak terikat oleh agenda politik negara-negara adidaya. Prinsip non-blok ini sangat erat dengan pendekatan bebas aktif, sehingga memungkinkan Indonesia membangun hubungan kerjasama dengan berbagai negara tanpa terikat pada afiliasi ideologi tertentu.

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia secara aktif mengembangkan infrastruktur dan memajukan ekonomi melalui investasi asing. Indonesia mulai melirik BRICS sebagai mitra potensial yang bisa mendukung ambisi pembangunan ini. Presiden Jokowi menyadari dan mengkaji potensi besar BRICS untuk mendukung proyek infrastruktur melalui *New Development Bank* (NDB) yang menawarkan sumber pembiayaan alternatif bagi negara-negara berkembang. Ketika ketergantungan terhadap lembaga keuangan Barat kadang dianggap memberatkan dengan syarat-syarat pinjaman yang ketat, BRICS menyediakan opsi lain¹⁵. Ketertarikan ini tidak bertentangan dengan prinsip non-blok, tetapi lebih kepada pragmatisme ekonomi yang mendorong Indonesia untuk mendiversifikasi mitra internasionalnya seperti pernyataan dari mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

“Karena BRICS ini adalah organisasi didirikan untuk tujuan ekonomi. Oleh karena itu, kita mencoba untuk berhitung dari sisi ekonomi dulu, apakah kemanfaatannya cukup banyak sehingga kita akan memutuskan

¹⁴ Nikita Rosa. “Gerakan Non-Blok: Latar Belakang, Tujuan, Anggota & Peran Indonesia”, *Detik.com*, 13 Maret 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6615990/gerakan-non-blok-latar-belakang-tujuan-anggota-peran-indonesia>

¹⁵ Mixo Sweetness Sithole dan Nyiko Worship Hlongwane, “*The role of the New Development Bank on Economic growth and Development in the BRICS states*”, *JMPRA Paper No. 119958*, Juli 2023. hal 6

bergabung dengan BRICS¹⁶” kata Menlu Retno Marsudi (Antarnews, 2024)

Meskipun BRICS memiliki anggota yang umumnya berideologi komunis atau sosialis (seperti Cina dan Rusia), ketertarikan Indonesia lebih berlandaskan pada faktor ekonomi dan politik pragmatis, bukan ideologi. Presiden Jokowi menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia di dalam forum internasional tidak merujuk pada afiliasi ideologi, tetapi pada keuntungan ekonomi dan stabilitas nasional.

Dalam era yang penuh ketidakpastian geopolitik, potensi masuknya Indonesia ke dalam BRICS bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan pada negara-negara Barat. Di sisi lain, Indonesia tetap menjaga prinsip non-bloknya, sehingga keterlibatan di BRICS bukan untuk berpihak secara eksklusif. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi, memandang BRICS sebagai aliansi yang memiliki kesamaan tujuan dengan Indonesia yang membuat Indonesia mantap untuk membangun kemitraan resmi bersama BRICS¹⁷ dan tetap mengacu pada prinsip bebas aktif. Prabowo dikenal mengusung pandangan politik luar negeri yang pragmatis dan berfokus pada keamanan nasional serta kemandirian ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan Indonesia dalam memperluas kerjasama tanpa harus terikat ideologi tertentu.

Berbagai pernyataan kenegaraan, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa ketertarikannya terhadap BRICS bukan berarti bahwa Indonesia berpihak pada kelompok negara-negara komunis. Sebaliknya, Indonesia melihat BRICS sebagai forum ekonomi yang inklusif, di mana negara-negara berkembang bisa memiliki platform alternatif untuk berkolaborasi dan memperkuat posisi ekonomi mereka di kancah internasional. Indonesia menyadari bahwa keterlibatan dalam BRICS dapat membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi tantangan ekonomi yang ditimbulkan oleh

¹⁶ Agus Setiawan. “Menlu sebut keputusan Indonesia gabung BRICS ada pada Prabowo”, *Antarnews*, 5 September 2024, <https://www.antarnews.com/berita/4310591/menlu-sebut-keputusan-indonesia-gabung-brics-ada-pada-prabowo>

¹⁷ CNNIndonesia. “Kenapa Indonesia Ingin Gabung BRICS Bersama Rusia-China?”, *CNNIndonesia*, 25 Oktober 2024, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241025095210-134-1159374/kenapa-indonesia-ingin-gabung-brics-bersama-rusia-china>

ketidakpastian global. Ketertarikan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia ingin menjadi bagian dari tatanan dunia yang lebih multipolar, di mana negara berkembang memiliki pilihan lebih dalam menjalin kerjasama ekonomi.

Dalam pernyataan resmi, Indonesia menegaskan bahwa ketertarikan pada BRICS bukan merupakan perubahan dalam prinsip politik luar negeri bebas aktif dan non-blok, melainkan sebagai langkah pragmatis dalam memperluas akses ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi global. Indonesia telah resmi menjadi *Partner Countries* (Negara Mitra) dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di Kazan, Rusia yang berlangsung dari 22 hingga 24 Oktober 2024¹⁸. Secara resmi bergabung, banyak gejolak yang terjadi dalam negeri karena anggapan bahwa resmi bergabung menjadi negara mitra BRICS menandakan bahwa Indonesia sudah bergabung dengan Blok Timur, tetapi dalam pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Indonesia dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia tetap pada prinsip luar negeri yang bebas dan aktif.

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum¹⁹" kata Menlu Sugiono (CNNIndonesia, 2024)

Keterlibatan di BRICS diharapkan dapat membantu Indonesia mendapatkan akses yang lebih luas terhadap sumber daya, teknologi, dan kerjasama internasional yang mendukung pembangunan nasional. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendiversifikasi kemitraan internasional dan mengurangi ketergantungan pada blok tertentu.

Melihat posisi strategis Indonesia dalam dinamika ekonomi dan politik internasional, keputusan Indonesia untuk menjadi mitra di BRICS mencerminkan strategi yang kompleks dalam menghadapi perubahan tatanan

¹⁸ CNNIndonesia. "Terima Undangan BRICS, Indonesia Resmi Jadi Negara Partner", *CNNIndonesia*, 21 November 2024, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241121105957-134-1169025/terima-undangan-brics-indonesia-resmi-jadi-negara-partner>

¹⁹ CNNIndonesia. "Menlu Sugiono Sebut Indonesia Ingin Gabung BRICS", *CNNIndonesia*, 25 Oktober 2024, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241025045002-134-1159325/menlu-sugiono-sebut-indonesia-ingin-gabung-brics>

dunia yang semakin multipolar. Ketertarikan Indonesia terhadap BRICS bukan sekadar langkah pragmatis, tetapi juga bagian dari upaya diversifikasi kemitraan global yang bebas dari ikatan ideologi tertentu. Faktor-faktor seperti kebutuhan akan alternatif pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, upaya memperkuat stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, dan ambisi untuk meningkatkan peran dalam tata kelola dunia menjadi pendorong utama keputusan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor tersebut guna memahami alasan strategis di balik langkah Indonesia sebagai negara mitra di BRICS, sekaligus mengungkap relevansinya bagi kebijakan luar negeri Indonesia dan masa depan posisinya dalam kancah internasional.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penulis dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab Indonesia bergabung sebagai negara mitra dengan BRICS?

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada analisis faktor-faktor utama yang mendorong ketertarikan Indonesia untuk menjadi mitra BRICS. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lingkup Faktor yang Dianalisis: Penelitian ini akan membahas faktor ekonomi politik dan kepentingan nasional yang berperan dalam mendorong Indonesia untuk menjalin kemitraan dengan BRICS. Faktor sosial-budaya dan aspek-aspek lain yang tidak memiliki kaitan langsung dengan dinamika kemitraan ini tidak akan dianalisis lebih jauh.
2. Periode Waktu: Analisis akan difokuskan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga transisi pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini mencakup kebijakan luar negeri yang relevan dan respons Indonesia terhadap perkembangan BRICS selama periode tersebut.

3. Sumber Data: Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang mencakup laporan resmi pemerintah, literatur akademis, serta publikasi terkait dari lembaga internasional mengenai hubungan Indonesia dan BRICS.

Pembatasan ini dilakukan agar penelitian tetap fokus pada tujuan utama, yaitu menganalisis faktor-faktor penyebab yang relevan dalam ketertarikan Indonesia menjadi mitra BRICS, sehingga penelitian dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan pemahaman yang mendalam sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk:

1. Memahami BRICS dan Posisi Indonesia di kancah Internasional yang membuat adanya kerjasama antara Indonesia dan BRICS serta memahami peran politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan prinsip non-blok dalam keputusan potensial untuk menjalin kemitraan dengan BRICS.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang mendorong ketertarikan Indonesia untuk menjadi negara mitra di BRICS, khususnya dalam aspek ekonomi politik internasional.
3. Mengkaji dampak potensial dari keterlibatan Indonesia dalam peran sebagai negara mitra BRICS terhadap kepentingan nasional Indonesia.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis: Memberikan kontribusi pada literatur ilmiah di bidang studi hubungan internasional dan politik luar negeri Indonesia, khususnya terkait analisis faktor yang mempengaruhi keputusan suatu negara dalam menjalin kemitraan strategis dengan aliansi global seperti BRICS.

2. Manfaat Praktis: Menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan di Indonesia untuk memahami secara lebih mendalam implikasi dan potensi kemitraan dengan BRICS, yang dapat membantu dalam perumusan kebijakan luar negeri di masa depan.
3. Manfaat Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman yang lebih luas bagi masyarakat mengenai peran dan posisi Indonesia dalam politik internasional, serta bagaimana kemitraan dengan organisasi internasional seperti BRICS dapat berdampak pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya: Menjadi referensi bagi penelitian di masa depan yang tertarik untuk mengeksplorasi hubungan Indonesia dan BRICS atau kajian serupa dalam politik luar negeri, ekonomi internasional, dan hubungan negara berkembang dengan aliansi global lainnya.

1.5. Studi Pustaka

Kerangka dasar pemikiran bertujuan untuk memberikan informasi terkait penelitian terdahulu yang akan dijadikan rujukan oleh penulis dalam menjalankan penelitian. Beberapa bahan bacaan yang relevan dengan penelitian penulis diantaranya ialah:

Studi Pustaka pertama *“Building Better Global Economic BRICs”* (2001). Penulis artikel ini, Jim O'Neill, ingin menjelaskan pentingnya keterlibatan negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) dalam forum ekonomi global, khususnya G7. Ia berargumen bahwa banyak gangguan ekonomi yang terjadi sejak akhir 1990-an, sebagian besar melibatkan negara-negara di luar G7, dan bahwa keterlibatan BRICs dapat membantu mengurangi dampak krisis ekonomi di masa depan. Penulis juga menyoroti perlunya suara yang lebih terkoordinasi dari Eropa dalam pengambilan keputusan ekonomi global dan mengusulkan pembentukan G9 yang mencakup BRICs untuk meningkatkan efektivitas pembuatan kebijakan

global. Selain itu, artikel ini membahas tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang terkait dengan kebijakan moneter dan fiskal global, serta pentingnya kerjasama internasional yang lebih baik untuk menghadapi isu-isu ekonomi yang kompleks.

Studi Pustaka kedua ***“The Nexus Among Employment, Productivity and Trade Openness: Evidence from BRICS and Indonesia”*** (2020) karya Badri Narayan Rath dan Masagus M. Ridhwan. Penelitian ini menggunakan teori kointegrasi dan pendekatan panel data. Penelitian ini ingin menyampaikan beberapa poin penting mengenai hubungan antara pekerjaan, produktivitas, dan keterbukaan perdagangan di negara-negara BRICS dan Indonesia. Penulis ingin menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, dan keterbukaan perdagangan, khususnya di sektor pertanian. Mereka menemukan bahwa ada kointegrasi antara variabel-variabel ini dalam konteks sektor pertanian, tetapi tidak dalam sektor industri dan jasa. Penulis juga ingin mengidentifikasi arah hubungan kausal antara variabel-variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kausalitas *unidirectional* dari pekerjaan ke produktivitas di sektor pertanian, serta keterbukaan perdagangan yang juga mempengaruhi pekerjaan. Dari temuan tersebut, penulis menyarankan bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja, negara-negara BRICS dan Indonesia perlu mempromosikan keterbukaan perdagangan. Ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Artikel ini tidak menjelaskan kerjasama Indonesia dengan BRICS secara langsung tetapi melalui kerjasama Indonesia dengan Negara anggota BRICS. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara pekerjaan, produktivitas, dan keterbukaan perdagangan di negara-negara anggota BRICS dan Indonesia, serta untuk mengeksplorasi dinamika ekonomi yang ada di antara mereka.

Studi Pustaka ketiga ***“BRICS as New Alternatives in Reforming International Financial Institutions and Economic Partnerships”*** (2023). Penulis jurnal ini adalah Casandra Aleksia dan Arief Rizky Bakhtiar. Penulis dalam jurnal ini membahas peran gabungan perekonomian Brazil, Rusia,

India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) dalam mereformasi lembaga keuangan internasional dan kemitraan ekonomi. BRICS menawarkan nilai-nilai baru dan berfungsi sebagai alternatif bagi anggotanya dalam mendapatkan akses yang setara terhadap sumber investasi internasional. Penulis menjelaskan strategi BRICS untuk menciptakan program pembangunan yang efektif, yang tidak hanya berfokus pada agenda pertumbuhan masing-masing negara, tetapi juga pada hubungan perdagangan global dan kemitraan ekonomi. Jurnal ini membahas tentang lembaga keuangan yang didirikan oleh BRICS, seperti *New Development Bank* (NDB) dan *Contingent Reserve Arrangement* (CRA), serta bagaimana lembaga-lembaga ini berkontribusi terhadap penciptaan barang publik global dan memperkuat kerjasama ekonomi diantara negara-negara berkembang. Penulis juga mencatat tantangan yang dihadapi oleh BRICS, termasuk ketidakseimbangan sistem ekonomi, kurangnya mekanisme institusional, dan kurangnya kohesi di antara anggotanya, yang dapat mempengaruhi potensi ekonomi mereka di masa depan. Dalam artikel ini, tidak secara spesifik dibahas mengenai kerjasama dan dampak BRICS terhadap Indonesia dan BRICS. Fokus utama artikel adalah pada peran BRICS sebagai kelompok negara dalam mereformasi lembaga keuangan internasional dan membangun kemitraan ekonomi di antara anggotanya, serta strategi dan inisiatif yang diambil oleh BRICS secara keseluruhan.

Studi Pustaka keempat “*BRICS Against Hegemony Of The United States Dollar In The International Monetary system*” (2023). Penulis artikel ini adalah Najmi Firdaus, Sulistyو Widayanto, dan Irma Indrayani, yang berasal dari Departemen Hubungan Internasional dan Program Magister Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional. Artikel ini membahas tentang upaya negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) untuk melawan hegemoni dolar Amerika Serikat dalam sistem moneter internasional. Penelitian ini menggunakan teori ekonomi regionalisme, konsep multilateralism, kepentingan bersama negara berkembang, reformasi lembaga keuangan internasional. Penelitian ini menyoroti indikasi proyek mata uang baru yang dijadwalkan akan

diumumkan pada KTT BRICS 2023 di Afrika Selatan. BRICS saat ini mewakili 40% dari populasi dunia dan berkontribusi 25% terhadap PDB global, yang menunjukkan potensi besar mereka dalam mengubah dinamika ekonomi global. Artikel ini juga mengkaji bagaimana BRICS dapat menjadi alternatif bagi sistem keuangan yang didominasi oleh dolar AS, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi mata uang baru tersebut. Selain itu, terdapat analisis mengenai perbandingan antara Bank Pembangunan Baru BRICS dan IMF, serta potensi NDB untuk menggantikan IMF sebagai lembaga keuangan internasional yang dominan. Dalam artikel ini, tidak terdapat penjelasan khusus mengenai hubungan kerjasama Indonesia dengan BRICS. Fokus utama artikel adalah pada upaya negara-negara BRICS dalam melawan hegemoni dolar AS dan potensi proyek mata uang baru yang akan diumumkan. Meskipun Indonesia adalah negara yang memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi dengan beberapa anggota BRICS, artikel ini tidak membahas secara rinci tentang peran atau posisi Indonesia dalam konteks kerjasama dengan BRICS.

Studi Pustaka kelima **“Pengaruh Prinsip Bebas-Aktif Dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus BRICS”** (2023). Penulis artikel ini adalah Firdhan Dwi Kurniawan, Refo Prawira, Azam Fatahillah Eleizar dan Vala Mutiara Ridwan. Isi dari artikel ini mencakup analisis tentang penerapan prinsip bebas-aktif dalam politik luar negeri Indonesia, dengan fokus pada hubungan Indonesia dengan negara-negara BRICS. Artikel ini menggunakan teori politik luar negeri, konsep prinsip bebas aktif, dan geopolitik. Artikel ini menjelaskan bahwa prinsip bebas-aktif telah menjadi landasan utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia sejak era Soekarno, dan terus berlanjut hingga saat ini. Penulis menguraikan bagaimana Indonesia berusaha menjaga keseimbangan dalam hubungan internasional, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks geopolitik yang berubah. Selain itu, artikel ini juga membahas bagaimana Indonesia harus berhati-hati dalam menentukan arah politik luar negeri, terutama terkait dengan potensi kemitraan dalam BRICS, yang dapat mempengaruhi posisi Indonesia di kancah internasional. Penulis menekankan pentingnya mempertahankan kemandirian dan identitas Indonesia dalam

menghadapi tekanan dari kekuatan besar. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada pembahasan mengenai potensi dampak kemitraan Indonesia dalam BRICS terhadap prinsip bebas-aktif, tidak ada analisis yang mendalam mengenai faktor-faktor spesifik yang mendorong Indonesia untuk menjadi mitra di BRICS tanpa harus mengorbankan prinsip bebas-aktif.

Studi Pustaka keenam ***“Reviewing the Foreign Policy of the Republic of Indonesia Through President Jokowi's Visit to South Africa in 2023”*** (2023). Penulis artikel ini adalah Rivaldi Zakie Indrayana. Artikel ini membahas kunjungan Presiden Joko Widodo ke Afrika Selatan pada Agustus 2023, yang merupakan bagian dari serangkaian kunjungan ke beberapa negara Afrika. Fokus utama artikel adalah pada partisipasi Indonesia dalam KTT BRICS dan bagaimana kunjungan ini mencerminkan peningkatan posisi dan peran Indonesia dalam diplomasi multilateral di kancah global. Artikel menjelaskan hubungan historis yang erat antara Indonesia dan negara-negara Afrika, termasuk peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok (NAM) pada tahun 1950-an. Meskipun Indonesia belum menjadi anggota BRICS, kehadiran Presiden Jokowi di KTT tersebut menunjukkan upaya Indonesia untuk memperkuat posisinya dan membangun hubungan baru dengan negara-negara anggota BRICS serta negara-negara Afrika lainnya. Artikel menganalisis bagaimana kunjungan ini dapat membuka peluang baru bagi kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam konteks kerjasama dengan negara-negara berkembang. Penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis fenomena diplomasi multilateral yang diterapkan oleh Presiden Jokowi selama kunjungannya. Meskipun ada banyak penelitian tentang diplomasi multilateral dan peran Indonesia di kancah internasional, artikel ini menyoroti kurangnya fokus khusus pada partisipasi Indonesia dalam forum BRICS dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis mendalam tentang kunjungan Presiden Jokowi ke Afrika Selatan dan partisipasinya dalam KTT BRICS.

Studi Pustaka ketujuh adalah ***“Hegemoni Dolar Dan Potensi Kemunculan Mata Uang Brics”*** (2022). Artikel ini ditulis oleh Faisal

Nurdin Idris, Achmad Maulana Dzaky, Rijalul Haq, Silva Hafsari. Artikel ini membahas potensi kemunculan mata uang BRICS dan dampaknya terhadap hegemoni dolar AS serta ekonomi global. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan mengumpulkan dan menginterpretasikan data dari sumber sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah. Artikel ini menjelaskan bahwa konflik Rusia-Ukraina telah memicu sanksi terhadap Rusia, yang berdampak pada jalur perdagangan global dan mendorong negara-negara BRICS untuk mempertimbangkan alternatif mata uang. BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, memiliki potensi ekonomi yang signifikan dengan total PDB yang mendekati AS. Ini menunjukkan bahwa BRICS dapat menjadi kekuatan yang lebih besar dalam sistem keuangan global. Artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi BRICS dalam menciptakan mata uang baru, termasuk kebutuhan akan infrastruktur keuangan yang kuat dan persaingan dengan mata uang yang sudah mapan seperti dolar AS. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada tantangan, potensi untuk mata uang BRICS muncul sebagai alternatif yang kuat terhadap dolar AS ada, terutama dalam konteks ketidakpastian ekonomi global saat ini. Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang potensi kemunculan mata uang BRICS dan dampaknya terhadap sistem keuangan global, terutama dalam konteks persaingan dengan dolar AS dan institusi keuangan internasional seperti Bank Dunia. Meskipun ada banyak diskusi tentang dominasi dolar dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, penelitian ini berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan adopsi mata uang BRICS dan bagaimana hal ini dapat mengubah dinamika ekonomi global.

1.6. Kerangka Dasar Pemikiran

1.6.1. Ekonomi Politik Internasional (Robert Gilpin)

Teori IPE, terutama dalam pemikiran Robert Gilpin, menjelaskan hubungan timbal balik antara kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik di dunia internasional. Gilpin melihat ekonomi

politik internasional sebagai arena perebutan kepentingan antara negara-negara, yang mencoba memperluas pengaruhnya dan memajukan kepentingan nasional.

“Despite the growing importance of the market, historical experience indicates that the purpose of economic activities is ultimately determined not only by markets and the prescriptions of technical economics, but also (either explicitly or implicitly) by the norms, values, and interests of the social and political systems in which economic activities are embedded. Although economic factors will play an important role in determining the character of the global economy, political factors will be of equal, and perhaps greater, importance. It is highly unlikely that these powers will leave the distribution of the global economic product and the impact of economic forces on their national interests entirely up to the market. Both economic efficiency and national ambitions are driving forces in the global economy of the twenty-first century²⁰ -Robert Gilpin.” (Robert Gilpin 2001 hal. 12)

Gilpin, dalam kerangka *International Political Economy* (IPE), menjelaskan hubungan erat antara kekuatan ekonomi dan politik dalam membentuk dinamika internasional. Ia menyoroti tiga pendekatan utama dalam IPE:

1. **Liberalisme:** Pendekatan ini berfokus pada peran pasar bebas dan interdependensi ekonomi. Liberalisme berargumen bahwa perdagangan bebas dan kerjasama internasional akan menghasilkan manfaat bagi semua negara yang terlibat. Dalam pandangan ini, aktor non-negara, seperti perusahaan multinasional dan organisasi internasional, juga memiliki peran penting dalam membentuk dinamika ekonomi global.

²⁰ Robert Gilpin, *Global Understanding Political the International Economic Order* (New Jersey: Princeton University Press, 2001), hal. 12

2. **Marxisme:** Pendekatan ini menekankan peran kelas dan konflik dalam ekonomi politik internasional. Marxisme melihat hubungan antara negara dan ekonomi sebagai hasil dari struktur kekuasaan yang lebih besar, di mana kepentingan ekonomi dari kelas dominan mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi. Pendekatan ini sering kali mengkritik sistem kapitalis global dan menyoroti ketidakadilan yang dihasilkan dari hubungan kekuasaan yang tidak seimbang.

Gilpin mengintegrasikan aspek politik dan ekonomi, menekankan bahwa negara-negara bertindak untuk memaksimalkan kepentingan strategisnya, baik melalui penguatan ekonomi maupun melalui struktur global yang lebih menguntungkan. Penelitian "Analisis Faktor Penyebab Indonesia Menjadi Negara Mitra di BRICS" dapat dijelaskan menggunakan konsep-konsep Gilpin, khususnya dalam memahami motivasi Indonesia untuk menjalin hubungan dengan BRICS. Berikut adalah keterkaitannya:

1. **Perspektif Liberalisme Ekonomi:** Peluang untuk Kerjasama Multilateral.
Indonesia dapat menggunakan BRICS sebagai platform untuk memperluas perdagangan, investasi, dan aliansi teknologi. BRICS membuka peluang kerjasama dalam proyek pembangunan infrastruktur, teknologi hijau, dan energi, yang sejalan dengan visi pembangunan Indonesia.
2. **Perspektif Marxisme:** Tantangan terhadap Ketimpangan Global.
BRICS, sebagai forum alternatif, memungkinkan Indonesia untuk bekerjasama dengan negara-negara lain dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil. Dengan mendukung agenda BRICS, Indonesia dapat mengurangi kerentanan terhadap sistem keuangan global yang sering menguntungkan negara-negara maju, seperti dominasi dolar AS.
3. **Peran Negara dalam Ekonomi Politik Internasional.**

Sesuai dengan pandangan Gilpin, negara adalah aktor utama dalam IPE. Keputusan Indonesia untuk menjadi mitra BRICS mencerminkan upaya strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan politik sambil tetap terintegrasi dalam kerjasama multilateral. BRICS mencerminkan perubahan ke arah dunia multipolar. Gilpin menyoroti bahwa negara-negara berkembang, seperti Indonesia, dapat memanfaatkan perubahan ini untuk memperkuat posisi mereka dalam struktur global.

4. Implikasi bagi Kebijakan Ekonomi dan Politik Indonesia.

Bergabung sebagai mitra BRICS memungkinkan Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari investasi dan aliansi perdagangan, yang mendukung kebijakan pembangunan domestik. Mengacu pada pandangan Gilpin, kerjasama dengan BRICS meningkatkan kapasitas diplomasi ekonomi Indonesia untuk memperjuangkan reformasi global yang lebih adil.

Dengan menggunakan teori IPE Robert Gilpin, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa langkah Indonesia menjadi mitra BRICS adalah strategi yang didasarkan pada tiga perspektif utama yaitu Merkantilisme (Melindungi dan memaksimalkan kepentingan nasional), Liberalisme (Memanfaatkan peluang kerjasama multilateral), dan Strukturalisme (Tantangan terhadap ketimpangan dalam sistem global). Teori Gilpin memberikan kerangka analitis yang kaya untuk memahami bahwa keputusan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga strategi politik untuk memanfaatkan pergeseran kekuatan global demi kepentingan nasional Indonesia.

1.6.2. Kepentingan Nasional (Horsman dan Marshall)

Menurut Horsman dan Marshall, konsep "kepentingan nasional" menjadi semakin sulit untuk dipertahankan karena semakin kosongnya makna dari komunitas "nasional". Mereka berargumen bahwa ada beberapa faktor yang berkontribusi pada hal ini, termasuk meningkatnya arti penting dari kelompok kepentingan lokal, regional,

dan etnis. Selain itu, keberadaan komunitas imigran yang mungkin tidak memiliki banyak kesamaan dengan negara tuan rumah mereka juga menambah kompleksitas dalam mendefinisikan kepentingan nasional.

“The concept of a ‘national interest’ becomes all the more impossible to sustain when it is evident that the concept of ‘national’ community is increasingly empty. The growing salience of local, regional and ethnic interest groups is one factor. Another is the presence of immigrant communities with little in common with their host country who are still entitled to citizenship. However, the widest discrepancies in the concept of national interest are revealed by differences of opinion over involvement in the global economy, which brings such great benefits to some and such huge costs to others that a single expression of ‘interest’ is meaningless. For many, its expression might be available jobs, goods in stores, reliable communications, adequate health care, good roads, efficient public transportation, a social safety net. For others, it might mean affordable credit, laissez-faire regulations, lower taxes, flexible work rules. But just how much can a national government deliver on these or any other demands? Every policy directed at the definition and distribution of public goods within a national economy – and it is the state’s primary function so to define and distribute – will be judged by and through the market. Governments, alone, cannot buck the system, at least not for long. That does not mean they cannot do some of those things citizens clamour for. But more than just citizens will sit in judgement²¹. Horsman dan Marshall” (Scott Burchill 2005 hal. 140)

²¹ Scoot Burchill, *The National Interest in International Relations Theory* (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2005), hal. 140

Horsman dan Marshall juga menunjukkan bahwa perbedaan pendapat mengenai keterlibatan dalam ekonomi global mengungkapkan ketidakcocokan yang besar dalam pemahaman tentang kepentingan nasional. Mereka mencatat bahwa manfaat dan biaya dari keterlibatan dalam ekonomi global sangat bervariasi di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Misalnya, bagi sebagian orang, kepentingan nasional mungkin berarti lapangan kerja yang tersedia, barang-barang di toko, dan layanan publik yang baik, sementara bagi yang lain, itu mungkin berarti regulasi yang lebih bebas, pajak yang lebih rendah, dan aturan kerja yang lebih fleksibel. Dengan demikian, Horsman dan Marshall menekankan bahwa definisi dan distribusi barang publik dalam ekonomi nasional yang merupakan fungsi utama negara akan dinilai berdasarkan pasar, dan bahwa tidak ada satu ekspresi tunggal dari "kepentingan" yang dapat mencakup semua kepentingan yang ada dalam masyarakat yang beragam. Konsep kepentingan nasional yang diuraikan oleh Horsman dan Marshall dapat dihubungkan dengan faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi negara mitra BRICS melalui beberapa cara:

1. **Diversifikasi Ekonomi:** Salah satu alasan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah untuk mendiversifikasi hubungan ekonominya dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara Barat. Dalam konteks ini, kepentingan nasional Indonesia mencakup pencarian peluang ekonomi yang lebih luas dan akses ke pasar baru, yang sejalan dengan pandangan Horsman dan Marshall bahwa kepentingan nasional tidak dapat dipahami sebagai satu entitas tunggal, melainkan sebagai kumpulan kepentingan yang beragam.
2. **Kepentingan Beragam dalam Masyarakat:** Seperti yang dijelaskan oleh Horsman dan Marshall, kepentingan nasional dapat bervariasi di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, ada berbagai kepentingan yang mendorong partisipasi dalam BRICS, termasuk

kepentingan bisnis, politik, dan sosial. Misalnya, sektor-sektor tertentu mungkin melihat peluang investasi dan perdagangan yang lebih baik dengan negara-negara BRICS, sementara kelompok lain mungkin tertarik pada kerjasama dalam isu-isu seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

3. **Peran dalam Ekonomi Global:** Bergabung dengan BRICS juga memberikan Indonesia platform untuk berperan lebih aktif dalam ekonomi global. Horsman dan Marshall menunjukkan bahwa perbedaan pendapat mengenai keterlibatan dalam ekonomi global mencerminkan kepentingan yang beragam. Indonesia, sebagai negara berkembang, dapat memanfaatkan kemitraan ini untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam forum internasional, termasuk isu-isu perdagangan dan investasi yang menguntungkan bagi negara.
4. **Identitas dan Diplomasi:** Dalam konteks identitas nasional, kemitraan dalam BRICS dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Hal ini mencerminkan bagaimana kepentingan nasional dapat dipengaruhi oleh dinamika global dan regional, serta bagaimana negara-negara berusaha untuk membangun aliansi yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Dengan demikian, konsep kepentingan nasional menurut Horsman dan Marshall memberikan kerangka untuk memahami bagaimana Indonesia menavigasi kepentingan yang beragam dan kompleks dalam konteks kemitraan BRICS, serta bagaimana kepentingan tersebut berkontribusi pada keputusan strategis dalam kebijakan luar negeri.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatif-analitis untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong ketertarikan Indonesia sebagai negara mitra di BRICS.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi keputusan Indonesia, seperti faktor ekonomi, politik, dan kepentingan nasional. Jenis Penelitian ini bersifat eksplanatif-analitis, dimana data yang diperoleh akan menjelaskan alasan atau sebab-sebab di balik suatu fenomena dalam hal ini, keputusan Indonesia menjadi mitra BRICS dan mengurai dan menilai berbagai faktor atau variabel yang mempengaruhi keputusan tersebut.

1.7.1. Unit Analisa

Dalam penelitian, unit analisis dan unit eksplanasi adalah komponen kunci untuk menyusun dan memahami analisis data. Unit Analisis (Variabel Dependen) Ini adalah unit yang dideskripsikan dan dianalisis dalam penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisis adalah alasan Indonesia. Ini merujuk pada faktor-faktor yang menjelaskan keputusan Indonesia untuk bergabung sebagai negara mitra dengan BRICS. Unit Eksplanasi (Variabel Independen) Ini adalah unit yang digunakan untuk menjelaskan unit analisis yang diteliti. Dalam penelitian ini, unit eksplanasinya adalah BRICS, yang mencakup organisasi dan dinamika internasional yang mempengaruhi keputusan Indonesia. Tingkat Analisis Ini menunjukkan level di mana analisis dilakukan. Pada penelitian ini, tingkat analisisnya adalah Negara (Indonesia), yang berarti fokus penelitian adalah pada faktor pendorong keputusan Indonesia dalam konteks internasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor terkait BRICS mempengaruhi keputusan Indonesia, dengan fokus pada alasan-alasan spesifik di balik keputusan tersebut. Model analisa yang digunakan adalah model induksionis dimana tingkat unit eksplanasinya lebih tinggi dari tingkat unit analisa.

1.7.2. Sumber Data Penelitian

Sumber Data Penelitian ini akan mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti Laporan resmi

pemerintah Indonesia mengenai kebijakan luar negeri, Dokumen dan publikasi dari BRICS dan *New Development Bank* yang relevan dengan kebijakan kerjasama dan kemitraan, Artikel akademis, jurnal internasional, buku, dan publikasi ilmiah yang membahas hubungan Indonesia dan BRICS, Sumber berita, laporan media, dan artikel dari organisasi internasional yang membahas perkembangan terbaru mengenai BRICS dan kerjasama negara-negara anggota dengan mitra potensial.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data akan dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup peninjauan literatur terkait faktor ekonomi, politik, dan geopolitik yang mempengaruhi keputusan Indonesia. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi komprehensif dari berbagai perspektif mengenai isu kemitraan dengan BRICS. Teknik Analisis Data. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan situasi dan kondisi terkait faktor yang mempengaruhi ketertarikan Indonesia terhadap BRICS. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

1.8. Argumen Dasar

Dalam konteks Indonesia dan BRICS, faktor ekonomi menjadi pendorong utama, tetapi tidak terlepas dari kepentingan politik dan strategis. BRICS menawarkan peluang perdagangan, investasi, dan diversifikasi ekonomi. Dengan dominasi ekonomi negara-negara Barat dalam lembaga seperti IMF dan Bank Dunia, Indonesia melihat BRICS sebagai alternatif dalam mendapatkan sumber pendanaan dan investasi yang lebih fleksibel. Indonesia ingin memperkuat posisinya sebagai aktor global di tengah pergeseran geopolitik dari unipolar (dominasi Barat) menuju multipolar (melibatkan kekuatan ekonomi baru seperti China, India, dan Rusia).

Kemitraan dengan BRICS dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara Barat dan memperluas hubungan strategisnya dengan negara berkembang lainnya, khususnya di bidang energi dan teknologi.

BRICS memberikan peluang untuk meningkatkan perdagangan, memperluas akses pasar, serta memperoleh investasi dan pendanaan infrastruktur tanpa syarat ketat seperti yang diterapkan oleh lembaga keuangan Barat. Dengan bergabung sebagai mitra BRICS, Indonesia memperkuat posisinya dalam tata kelola global, sekaligus menjaga kebijakan luar negeri yang bebas-aktif tanpa harus terikat pada blok tertentu. BRICS membuka peluang kerjasama di sektor energi, ketahanan pangan, dan teknologi yang mendukung stabilitas nasional dalam menghadapi dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik antara AS, China, dan Rusia. Berdasarkan analisis dengan teori EPI Robert Gilpin dan konsep kepentingan nasional Horsman & Marshall, keputusan Indonesia untuk menjadi mitra BRICS bukan hanya didasarkan pada alasan ekonomi, tetapi juga pada pertimbangan politik dan keamanan dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih luas.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang terstruktur dengan baik dapat membantu memberikan arah yang jelas dalam penelitian. Berikut adalah sistematika penulisan pada penelitian ini

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yang menyajikan konteks dan alasan di balik penelitian, selanjutnya mendeskripsikan rumusan masalah yang menjelaskan masalah utama yang akan diteliti, tujuan penelitian yaitu menetapkan tujuan dari penelitian, manfaat penelitian yaitu mengidentifikasi kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini, studi pustaka dengan mengulas literatur dan penelitian terkait yang relevan, kerangka konsep yang menyajikan alat analisis yang digunakan dalam penelitian. Dan yang terakhir adalah metode penelitian yang mencakup

jenis penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II BRICS DAN POSISI INDONESIA DALAM DUNIA INTERNASIONAL

Pada bab ini ada beberapa hal yang akan dibahas seperti latar belakang dan sejarah pembentukan BRICS, asal-usul BRICS, tujuan pembentukan, dan perkembangan sejak awal hingga saat ini dan peran BRICS dalam menciptakan tatanan dunia multipolar yang menentang dominasi negara-negara Barat. Penulis juga akan membahas peran dan pengaruh BRICS dalam ekonomi dan politik global, keterkaitan Indonesia dengan BRICS, perspektif Indonesia dalam kerjasama global yaitu bagaimana Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara BRICS untuk memperkuat diplomasi ekonomi dan politik. Bab ini juga membahas tantangan dan strategi Indonesia dalam memanfaatkan dinamika ekonomi global. Bab ini akan menyimpulkan bagaimana hubungan antara BRICS dan Indonesia dapat memberikan peluang strategis dalam memperkuat posisi Indonesia dalam dunia internasional sambil tetap mempertahankan prinsip bebas aktif.

BAB III FAKTOR EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL PENYEBAB INDONESIA MENJADI NEGARA MITRA BRICS

Pada bab ini penulis akan mengkaji faktor-faktor ekonomi politik yang mendorong Indonesia untuk bergabung atau memiliki keinginan bergabung dengan BRICS, dengan landasan teori Ekonomi Politik Internasional (International Political Economy - IPE) dari Robert Gilpin. Beberapa pembahasan utama yang akan diangkat meliputi landasan Teori Ekonomi Politik Internasional (IPE) dari Robert Gilpin, faktor-faktor ekonomi yang mendorong keinginan bergabung dengan BRICS, faktor-faktor politik yang menjadi motivasi untuk bergabung dengan BRICS, peran BRICS sebagai bentuk hegemoni baru atau tantangan terhadap Status Quo, implikasi bagi sistem internasional dan masa depan ekonomi politik global. Bab ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana BRICS menawarkan alternatif bagi

negara-negara berkembang untuk mendobrak ketergantungan pada negara-negara besar Barat, serta mengeksplorasi apakah BRICS dapat menjadi pilar kekuatan baru dalam sistem ekonomi politik internasional sesuai perspektif teori Robert Gilpin.

BAB IV FAKTOR KEPENTINGAN NASIONAL PENYEBAB INDONESIA MENJADI NEGARA MITRA BRICS

Bab ini akan mengeksplorasi bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama dengan BRICS untuk mencapai tujuan kepentingan nasionalnya, dengan mendasarkan analisis pada Kepentingan Nasional dari Horsman and Marshall. Penulis juga akan menjelaskan tentang aspek kekuasaan dalam kepentingan nasional, peluang kerjasama Indonesia dengan BRICS untuk mencapai kepentingan nasional, hambatan dan tantangan dalam kerjasama dengan BRICS, strategi Indonesia dalam mengoptimalkan kerjasama dengan BRICS.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini akan memberikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian dan pembahasan yang dianalisis peneliti.

BAB II

BRICS DAN POSISI INDONESIA DALAM DUNIA INTERNASIONAL

2.1. Latar Belakang dan Sejarah Pembentukan BRICS

2.1.1. Sejarah dan Tujuan BRICS

BRICS merupakan akronim dari lima negara yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Konsep awal BRICs (tanpa Afrika Selatan) dikemukakan pada tahun 2001 oleh ekonom Jim O'Neill dari Goldman Sachs²², sebuah bank investasi dan perusahaan jasa keuangan multinasional yang berkantor pusat di New York, Amerika Serikat²³. Ia memprediksikan bahwa negara-negara ini akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi dominan pada tahun 2050²⁴. Negara anggota BRICs memiliki peningkatan pendapatan domestik bruto yang signifikan pada tahun tersebut. Kelima negara anggota merepresentasikan lebih dari 40% populasi yang membuat mereka menjadi pasar yang menjanjikan bagi para investor global.

Tabel 2.1 Proyeksi ukuran PDB 20 negara ekonomi terkemuka terhadap PPP tahun 2000

	GDP (PPP Weights ¹); 2000 US\$bn	Share of World Total (%) (1)	GDP (Current Prices); 2000 US\$bn	Share of World Total (%) (2)	Difference in Share (1-2)	Population (mns)	GDP Per Capita (current prices)
United States	9,963	23.98	9,963	33.13	-9.15	281.42	35,401
China	5,230	12.59	1,080	3.59	9.00	1,266.80	852
Japan	3,319	7.99	4,760	15.83	-7.84	126.87	37,515
India	2,104	5.06	474	1.58	3.49	1,002.14	473
Germany	2,082	5.01	1,878	6.25	-1.23	82.02	22,898
France	1,458	3.51	1,289	4.29	-0.78	58.89	21,890
UK	1,425	3.43	1,417	4.71	-1.28	59.50	23,810
Italy	1,404	3.38	1,077	3.58	-0.20	57.53	18,719
Brazil	1,214	2.92	588	1.96	0.97	167.72	3,507
Russia	1,120	2.70	247	0.82	1.88	145.49	1,696
Canada	903	2.17	699	2.33	-0.15	30.75	22,747
Mexico	890	2.14	574	1.91	0.23	97.36	5,901
Spain	797	1.92	560	1.86	0.05	39.47	14,190
Korea	770	1.85	457	1.52	0.33	47.27	9,678
Indonesia	696	1.68	154	0.51	1.16	210.49	730
Australia	523	1.26	382	1.27	-0.01	19.16	19,933
Taiwan	477	1.15	310	1.03	0.12	22.32	13,899
Turkey	437	1.05	203	0.67	0.38	67.38	3,007
Thailand	430	1.04	122	0.41	0.63	62.32	1,956
Netherlands	416	1.00	370	1.23	-0.23	15.86	23,334
World	41,552	100	30,073	100	-	6,073.00	4,952
of which: G7	20,555	49	21,082	70	-20	692.66	30,437
Euroland	7,231	17	6,027	20	-3	304.07	19,820

²² Jim O'Neill, "Building Better Global Economic BRICs", 30 November 2001, hal 1

²³ Rifka Nayla. "Intip Sejarah Goldman Sachs Yuk!", *bisnismuda.id*, 2022, <https://bisnismuda.id/read/2956-rifka-nayla/intip-sejarah-goldman-sachs-yuk>. Diakses pada 3 Januari 2025

²⁴ O'Neill, *Op. Cit.*, hal. 8

Sumber: Jim O'Neill, “*Building Better Global Economic BRICs*”
Tabel ini merupakan potongan tabel dari laporan Jim O’Neill yang memproyeksikan ukuran *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2000 untuk 20 negara ekonomi terkemuka di dunia, berdasarkan *Purchasing Power Parity* (PPP) atau Paritas Daya Beli pada akhir tahun 2000. Tabel ini juga menunjukkan porsi PDB dunia yang sebenarnya pada kedua estimasi tersebut, dan perbedaan di antara keduanya, serta ukuran populasi dan PDB per kapita. Seperti yang dapat dilihat, ada beberapa estimasi yang sangat berbeda tentang ukuran relatif dan pangsa ekonomi dunia, tergantung pada teknik mana (bobot PPP atau bobot PDB) yang digunakan. Mungkin tidak mengherankan, ukuran absolut sebenarnya tidak jauh berbeda untuk sebagian besar negara G7.

Tabel 2.2 Proyeksi PPP dan PDB negara berkembang tahun 2000

	PPP Weight (1)	Current GDP Weight (2)	Ratio (1/2)
China	12.59	3.59	3.51
India	5.06	1.58	3.20
Brazil	2.92	1.96	1.49
Russia	2.70	0.82	3.29
Total	23.27	7.95	

Sumber: Jim O'Neill, “*Building Better Global Economic BRICs*”
Gambaran relatif berubah secara dramatis ketika ekonomi pasar berkembang yang penting diperhitungkan, khususnya Brasil, Rusia, India, dan Cina, dan pada tingkat yang lebih rendah ekonomi Asia. Tabel 2.2 menyoroti perbedaan untuk empat negara “ekonomi berkembang” terbesar baik dalam PPP maupun harga pada tahun tersebut.

BRICS menjadi organisasi ekonomi yang strategis karena letak geografis anggotanya yang berada di jalur perdagangan utama dunia dan menghubungkan berbagai kawasan ekonomi penting. Brasil memiliki akses ke Samudra Atlantik dan menjadi pintu gerbang perdagangan Amerika Selatan, sementara Rusia menguasai jalur energi vital yang menghubungkan Eropa dan Asia. India dan China, sebagai

pusat ekonomi di Asia, terletak di jalur maritim utama seperti Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan yang menjadi rute perdagangan global tersibuk. Afrika Selatan, yang berada di persimpangan Samudra Atlantik dan Hindia, memainkan peran kunci dalam perdagangan antara Asia, Afrika, dan Eropa. Dengan posisi strategis ini, BRICS memiliki kendali atas jalur distribusi barang, energi, dan komoditas penting, menjadikannya kekuatan ekonomi yang berpengaruh dalam perdagangan global.

Gambar 2.1 Peta BRICS



Sumber: www.cfr.org

Pembentukan BRICS dimulai dengan pertemuan tingkat menteri pertama yang diadakan pada 20 September 2006 di New York, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB²⁵. Pertemuan ini diusulkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan dihadiri oleh menteri luar negeri dari Brasil, Rusia, India, dan China. Mereka menyatakan minat untuk memperluas kerjasama multilateral. Konferensi Tingkat Tinggi pertama BRICS diadakan pada 16 Juni 2009 di Yekaterinburg, Rusia. Pertemuan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kerjasama antara negara-negara berkembang, yaitu Brasil, Rusia, India, dan Cina (BRICS). KTT ini dihadiri oleh para pemimpin dari keempat negara yaitu Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Rusia Dmitry

²⁵ BRICS portal. "History of BRICS", *BRICS portal*, <https://infobrics.org/page/history-of-brics/>. Diakses pada 3 januari 2025.

Medvedev, Perdana Menteri India Manmohan Singh, dan Presiden China Hu Jintao²⁶. Pertemuan ini merupakan langkah awal bagi negara-negara BRICs (Brasil, Rusia, India, dan China) untuk memperkuat kerjasama dan dialog di antara mereka.

Gambar 2.2 Dokumentasi KTT Pertama BRICs.



Sumber: en.kremlin.ru

Agenda pertama pada KTT ini, para pemimpin negara mengeluarkan pernyataan bersama untuk mempromosikan dialog dan kerjasama yang bersifat proaktif, pragmatis, terbuka, dan transparan antara negara-negara anggota. Juga mengatasi krisis global, mereka membahas cara-cara untuk mengatasi krisis keuangan dan ekonomi global yang sedang berlangsung saat itu. KTT ini menandai awal dari kerjasama formal antara negara-negara berkembang besar dalam menghadapi tantangan global. Sejak saat itu, BRICs terus berkembang dan pada tahun 2010, Afrika Selatan bergabung menjadi anggota penuh, sehingga nama organisasi berubah menjadi BRICS. Tujuan utama pembentukan BRICS adalah untuk mempromosikan dialog dan kerjasama antara negara-negara anggotanya dalam menghadapi tantangan global dan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional dan mewakili kepentingan negara-negara berkembang dalam forum internasional.

Setelah KTT pertama pada tahun 2009, BRICS terus berkembang dengan mengadakan pertemuan tahunan yang membahas isu-isu

²⁶ M. Irfan Ilmie. "Presiden China pimpin KTT Brics di Xiamen", *Antaraneews.com*, 30 Agustus 2017, <https://www.antaraneews.com/berita/649710/presiden-china-pimpin-ktt-brics-di-xiamen>. Diakses pada 3 januari 2025.

penting seperti reformasi lembaga keuangan internasional dan kerjasama di bidang energi dan keamanan pangan. KTT kedua diadakan di Brasil pada tahun 2010 dan menghadirkan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma sebagai anggota baru²⁷. Pada KTT ke-16 yang berlangsung baru-baru ini, Indonesia secara resmi diakui sebagai *Partner Country* atau Negara Mitra BRICS bersama beberapa negara Asia Tenggara lainnya²⁸. Saat ini, BRICS terus berupaya memperkuat posisinya sebagai blok geopolitik yang signifikan dalam mendukung perekonomian global. Dengan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, BRICS diprediksi akan memainkan peran kunci dalam membentuk masa depan ekonomi dunia.

2.1.2. Fase Penguatan Kerjasama

Fase pertama yang menjadi fokus BRICS yaitu penguatan struktur kerjasama BRICS dengan durasi periode 2011 sampai 2014. Pertemuan yang dilaksanakan di Sanya, China, pada 2011 adalah yang pertama dengan kehadiran lima anggota, setelah Afrika Selatan resmi bergabung pada akhir 2010. Agenda ini menunjukkan langkah signifikan dalam transformasi BRIC menjadi BRICS, dengan fokus pada inklusivitas negara-negara berkembang di berbagai wilayah dunia. Sanya yang merupakan sebuah kota wisata di pulau Hainan, Cina dipilih karena lokasi mencerminkan pentingnya promosi hubungan perdagangan dan investasi yang juga mendorong pariwisata antara anggota. *Sanya Declaration* merupakan deklarasi yang menegaskan tujuan strategis BRICS untuk:

1. **Meningkatkan kerjasama ekonomi** di antara anggota, termasuk memperkuat perdagangan dan investasi intra-BRICS.

²⁷ brandsouthafrica. "South Africa possible new BRIC member", *brandsouthafrica.com*, 23 Agustus 2010, <https://brandsouthafrica.com/92777/opportunities/bric-230810/>. Diakses pada 3 Januari 2025.

²⁸ Sri Dewi Larasati. "Daftar negara yang berminat gabung BRICS", *Antaraneews.com*, 26 Oktober 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4424013/daftar-negara-yang-berminat-gabung-brics>. Diakses pada 3 Januari 2025.

2. **Mendukung multipolaritas dunia**, dengan menyoroti perlunya reformasi tata kelola global, seperti perubahan pada Dewan Keamanan PBB dan lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia.
3. **Mengembangkan solidaritas global**, terutama dengan menekankan kerjasama di bidang energi, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

Adapun beberapa poin penting pada pertemuan ini adalah penekanan pada diversifikasi hubungan ekonomi, yang melibatkan penurunan ketergantungan pada ekonomi negara maju. Pembicaraan awal untuk penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan intra-BRICS, sebuah ide yang kelak berkembang lebih jauh. Dukungan terhadap Afrika Selatan sebagai pintu gerbang BRICS ke Afrika, memperkuat peran kawasan tersebut dalam ekonomi global.

Gambar 2.3 KTT BRICS 2011 di Sanya, China.



Sumber: en.kremlin.ru

Pada KTT 2012 di New Delhi India²⁹, BRICS membahas tentang perkembangan ekonomi dengan peran lembaga internasional yang tertuang dalam dokumen “*The 2nd Meeting of the BRICS Trade and Economic Ministers: Joint Press Release (New Delhi, India, March*

²⁹ Peter Draper. “*BRICS Summit 2012: Inching Towards a BRICS Trade and Investment Agenda*”, *saiia.org.za*, 16 Maret 2012, <https://saiia.org.za/research/brics-a-2012-inching-towards-a-brics-trade-and-investment-agenda/>. Diakses pada 4 Januari 2025.

28, 2012)”³⁰. Laporan ini adalah komitmen para Menteri Perdagangan dan Ekonomi negara anggota BRICS untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan berbasis aturan, serta menekankan pentingnya peran *World Trade Organization* (WTO) dalam mendukung negara-negara berkembang, terutama negara-negara kurang berkembang (LDCs). Para Menteri mengungkapkan keprihatinan terhadap situasi ekonomi global yang sulit dan perlunya koordinasi kebijakan yang lebih besar untuk memastikan stabilitas ekonomi global. Mereka juga menekankan pentingnya melawan kecenderungan proteksionisme dan mendukung perdagangan internasional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Selain itu, laporan ini mencatat kemajuan dalam negosiasi “*Doha Round*” dan menegaskan komitmen untuk mencapai kesepakatan yang seimbang, dengan fokus pada pengembangan. Para Menteri sepakat untuk meningkatkan kerjasama intra-BRICS dalam berbagai bidang, termasuk kerjasama bea cukai, promosi investasi, dan pengumpulan data perdagangan³¹.

Gambar 2.4 KTT BRICS 2012 di New Delhi, India



Sumber: saiaa.org.za

³⁰ BRICS, “*THE 2ND MEETING OF THE BRICS TRADE AND ECONOMIC MINISTERS*”, *brics.utoronto.ca*, 18 Maret 2012, <http://www.brics.utoronto.ca/docs/120328-trade.pdf/>. Diakses Pada 4 Januari 2025.

³¹ BRICS, “*THE 2ND MEETING OF THE BRICS TRADE AND ECONOMIC MINISTERS*”, 18 Maret, hal 2-3

Pada KTT 2013 BRICS di Durban, Afrika Selatan BRICS meresmikan *eThekwini Declaration*³² yang memiliki poin tentang:

1. **Dukungan untuk Infrastruktur Berkelanjutan.** Para pemimpin BRICS menegaskan komitmen mereka untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Afrika, mengingat pentingnya infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi.
2. **Tindakan Kebijakan Global.** Mereka mencatat tindakan kebijakan yang diambil oleh negara-negara maju untuk mengurangi risiko ekonomi global, sambil mengingatkan bahwa ketidakpastian masih ada dan mempengaruhi pertumbuhan.
3. **Reformasi Lembaga Keuangan Internasional.** Para pemimpin menyerukan reformasi lembaga keuangan internasional agar lebih representatif dan mencerminkan bobot negara-negara berkembang, termasuk BRICS.
4. **Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).** Mereka menegaskan komitmen untuk mencapai MDGs dan menekankan pentingnya agenda pembangunan pasca-2015 yang berfokus pada pengentasan kemiskinan.
5. **Kerja Sama dalam Hak Asasi Manusia.** Deklarasi ini menyambut baik kerjasama di bidang hak asasi manusia dan mengakui peran Uni Afrika dalam penyelesaian konflik di benua Afrika.
6. **Peningkatan Kerjasama Internasional.** Para pemimpin menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan global, termasuk keamanan dan kemanusiaan.
7. **Pentingnya Stabilitas Keuangan.** Mereka menekankan perlunya langkah-langkah untuk memastikan stabilitas keuangan global dan menghindari volatilitas yang dapat merugikan negara-negara berkembang.

³² BRICS, “*eThekwini Declaration*”, *BRICS portal*, 27 Maret 2013, <https://infobrics.org/document/15/>. Diakses pada 4 Januari 2025.

8. **Pembangunan Ekonomi yang Inklusif.** Para pemimpin BRICS berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat kerjasama di bidang perdagangan dan investasi.
9. **Peningkatan Akses Pembiayaan.** Mereka menekankan pentingnya akses yang stabil dan memadai terhadap pembiayaan jangka panjang bagi negara-negara berkembang.
10. **Pentingnya Multilateralisme.** Para pemimpin menegaskan dukungan mereka terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan transparan, serta berkomitmen untuk menyelesaikan Putaran Doha.

Gambar 2.5 KTT BRICS 2013 di Durban, Afrika Selatan.



Sumber: www.en.kremlin.ru

pada KTT BRICS ke-6 di Fortaleza, Brazil tahun 2014, menghasilkan *Fortaleza Declaration* mencakup beberapa poin kunci sebagai berikut:

1. **Pembangunan Berkelanjutan.** Para pemimpin BRICS menekankan pentingnya pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, serta komitmen untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan ekonomi.
2. **Pembentukan *New Development Bank* (NDB).** Deklarasi ini mengumumkan pembentukan NDB, yang bertujuan untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara BRICS dan negara berkembang lainnya. NDB

diharapkan dapat memperkuat kerjasama finansial di antara negara-negara BRICS dan melengkapi lembaga keuangan internasional lainnya.

3. **Kerjasama Ekonomi.** Para pemimpin BRICS berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama ekonomi diantara negara-negara anggota, termasuk melalui strategi kerjasama ekonomi BRICS dan kerangka kemitraan ekonomi yang lebih dekat.
4. **Stabilitas Keuangan Global.** Deklarasi ini menekankan perlunya koordinasi makroekonomi yang lebih baik di antara negara-negara besar untuk mendukung stabilitas keuangan global dan pertumbuhan yang inklusif.
5. **Pentingnya Multilateralism.** BRICS menegaskan komitmen mereka terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan, serta mendukung penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi.
6. **Isu Keamanan Global.** Para pemimpin juga membahas isu-isu keamanan global, termasuk terorisme dan konflik di berbagai wilayah, serta menyerukan kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan ini .

Secara keseluruhan, *Fortaleza Declaration* mencerminkan komitmen BRICS untuk bekerjasama dalam menciptakan dunia yang lebih damai, stabil, dan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan peran mereka dalam tata kelola ekonomi global.

Gambar 2.6 KTT BRICS 2014 di Fortaleza, Brasil



Sumber: en.kremlin.ru

2.1.3. Perluasan Agenda

Fase selanjutnya adalah perluasan agenda yang berlangsung dari 2015 sampai 2019. Pada tahun 2015, NDB resmi beroperasi sepenuhnya dengan kantor pusatnya di Shanghai, Cina³³. Proyek awal NDB adalah proyek “*Canara Renewable Energy Financing Scheme Project*”³⁴. Proyek ini adalah inisiatif yang didukung oleh NDB untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di negara tersebut. Pada April 2016, NDB menyetujui pinjaman sebesar \$250 juta kepada *Canara Bank*, yang akan disalurkan kembali untuk mendanai sub-proyek energi terbarukan seperti angin, surya, pembangkit listrik tenaga air kecil, biomassa, dan proyek energi terbarukan lainnya. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mendukung skema pembiayaan energi terbarukan yang didirikan oleh *Canara Bank*, sejalan dengan inisiatif Pemerintah India di sektor energi terbarukan. Melalui skema ini, diharapkan dapat dihasilkan tambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 500 MW dan pengurangan emisi karbon sekitar 800.000 ton. Selain menyediakan likuiditas jangka panjang untuk pembiayaan proyek energi terbarukan, proyek ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas institusional *Canara Bank* dalam memperluas pemberian pinjaman untuk pembangunan berkelanjutan di sektor energi. Secara keseluruhan, inisiatif ini merupakan langkah penting dalam mendukung transisi India menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, dengan dukungan finansial dan kelembagaan yang signifikan dari NDB dan *Canara Bank*.

KTT BRICS ke-9 diadakan di Xiamen, China yang dimulai tanggal 3 hingga 5 September 2017. Pertemuan ini dihadiri oleh pemimpin negara-negara BRICS dengan tema utama "Memperdalam

³³ NDB, “*The New Development Bank Signed Headquarters Agreement with the Government of the People’s Republic of China*”, *ndb.int*, 27 Februari 2016, <https://www.ndb.int/news/new-development-bank-signed-headquarters-agreement-government-peoples-republic-china/>. Diakses pada 5 Januari 2025.

³⁴ NDB, “*Canara Renewable Energy Financing Scheme Project*”, *ndb.int*, 2016, <https://www.ndb.int/project/canara-india/#tabbed-standard>. Diakses pada 6 Januari 2025.

Kemitraan BRICS dan Membuka Masa Depan yang Lebih Cerah". Dalam pertemuan ini beberapa hal dibahas seperti "Deklarasi Pemimpin Negara BRICS" yang menekankan pentingnya keterbukaan dan inklusivitas dalam kerjasama antar negara. Presiden China, Xi Jinping mengusulkan Program "*BRICS Plus*", untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang lainnya dalam kerjasama BRICS, menciptakan model baru untuk kolaborasi internasional. Presiden Xi Jinping menekankan bahwa BRICS tidak merupakan kelompok eksklusif, melainkan sebuah platform yang terbuka untuk semua negara yang ingin berpartisipasi dalam dialog dan kemitraan. Program ini bertujuan untuk memperdalam kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan budaya, serta memperkuat hubungan antar negara anggota BRICS dan negara-negara lain yang tertarik untuk bergabung. "*BRICS Plus*" juga berfokus pada proyek-proyek nyata seperti NDB, yang mendukung pembangunan infrastruktur di negara-negara anggota. Pemimpin negara-negara BRICS juga sepakat untuk memperdalam "Kerjasama Selatan-Selatan" dan menjalin kemitraan pengembangan yang lebih luas. Penolakan Proteksionisme, dalam konteks ekonomi global yang tidak menentu. Xi Jinping menekankan penolakan terhadap proteksionisme dan mendukung sistem perdagangan multilateral.

Pada KTT BRICS ke-11 yang diadakan di Brasil pada tahun 2019. Topik utama dari pertemuan tersebut bukanlah fokus pada inovasi teknologi dan kerjasama digital saja, meski subjek-subjek lain juga ditangani. Fokus utama KTT BRICS 2019 yaitu promosi ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Agenda tersebut melihat peluang besar untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ini, termasuk pengembangan teknologi hijau dan digitalisasi. Diskusi juga melibatkan ekonomi digital, yang merupakan area penting dalam kerjasama BRICS. Tema ini relevan dengan usaha untuk meningkatkan integrasi digital antar negara anggota dan mempromosikan ekosistem Startup yang maju. Masalah-masalah regional seperti perebutan kekuasaan di Venezuela dan krisis politik di Bolivia juga dibahas dalam pertemuan

tersebut. Namun, fokus utama masih tetap pada isu-isu global dan strategis seperti promosi teknologi dan memperkuat kerjasama dalam memerangi kejahatan transnasional.

2.1.4. Fase Tantangan Baru

Pada tahun 2020 sampai saat ini BRICS menghadapi fase tantangan baru seperti COVID-19, masalah geopolitik dan perluasan anggota. Pandemi COVID-19 telah menyoroti pentingnya kerjasama internasional, terutama di antara negara-negara BRICS dalam upaya menangani krisis kesehatan global. Sejak awal pandemi, negara-negara anggota BRICS telah berkolaborasi dalam berbagai aspek, termasuk pengembangan dan distribusi vaksin. China telah menjadi pemimpin dalam inisiatif vaksin di dalam BRICS. China mengusulkan vaksin COVID-19 sebagai barang publik global dan mendukung pengabaian hak kekayaan intelektual untuk vaksin. Selain itu, China juga menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dalam produksi dan distribusi vaksin, seperti yang dilakukan oleh perusahaan biofarmasi Sinovac dengan Brasil dan Afrika Selatan. Pusat R&D Vaksin BRICS diluncurkan pada Maret 2022 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kerjasama dalam penelitian dan pengembangan vaksin dan memastikan akses yang adil bagi negara-negara berkembang. Melalui inisiatif ini, BRICS berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penelitian vaksin serta memperkuat kemampuan dalam pencegahan penyakit menular. Negara-negara BRICS juga terlibat dalam kerjasama multilateral melalui mekanisme seperti COVAX, yang bertujuan untuk memastikan distribusi vaksin yang adil di seluruh dunia. Kerja sama ini mencakup dukungan finansial dan teknis untuk negara-negara berkembang dalam menghadapi pandemi. BRICS telah menunjukkan fleksibilitas dalam merespons tantangan global dengan mengembangkan kebijakan bersama untuk mitigasi dampak pandemi. Hal ini mencakup upaya untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi global yang diperburuk oleh COVID-19.

Pada tahun 2022, China mengajukan penguatan kerjasama multilateral untuk menghadapi berbagai tantangan global, termasuk konflik geopolitik dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya China untuk memperkuat posisinya di panggung internasional dan membangun kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara lain. Presiden Xi Jinping memperkenalkan *Global Security Initiative (GSI)*, yang menekankan pentingnya dialog dan kerjasama dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan. GSI bertujuan untuk mengatasi tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional melalui pendekatan kolaboratif, menghindari konfrontasi, dan mendorong kemitraan yang saling menguntungkan. China menerapkan teori "bilateral + multilateral", yang menekankan bahwa kerjasama bilateral adalah dasar dari hubungan internasional, sementara kerjasama multilateral berfungsi untuk memperluas dan meningkatkan hubungan tersebut. China berusaha untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara lain sambil juga berpartisipasi aktif dalam forum multilateral. China juga berkomitmen untuk mendukung negara-negara berkembang melalui berbagai platform seperti *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* dan kerjasama dengan negara-negara di Global South. Ini termasuk penyediaan bantuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, yang sangat penting bagi pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

KTT BRICS yang berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Agustus 2023, menghasilkan keputusan penting mengenai perluasan kemitraan blok negara berkembang ini. Enam negara baru seperti Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab diundang untuk bergabung mulai 1 Januari 2024. Salah satu fokus utama dari KTT ini adalah "dedolarisasi" dan peningkatan perdagangan menggunakan mata uang lokal di antara anggota BRICS. Para pemimpin BRICS mendiskusikan cara untuk memperkuat hubungan ekonomi dan meningkatkan kerjasama dalam berbagai sektor, termasuk energi dan infrastruktur. Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa,

menyatakan bahwa perluasan kemitraan ini adalah langkah bersejarah yang menunjukkan tekad negara-negara BRICS untuk bersatu dan berkolaborasi dengan negara-negara berkembang lainnya. Presiden China, Xi Jinping, juga menekankan bahwa ekspansi ini merupakan titik awal baru bagi kerjasama dalam memajukan perdamaian dan pembangunan global. Keputusan untuk menerima anggota baru ini datang di tengah upaya negara-negara tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional. Lebih dari 20 negara telah menunjukkan minat untuk bergabung dengan BRICS, mencerminkan ketertarikan global terhadap alternatif sistem keuangan yang lebih inklusif. Dengan bergabungnya enam negara baru ini, BRICS akan semakin memperkuat posisinya sebagai blok yang mewakili sekitar 40% populasi dunia dan lebih dari seperempat PDB global³⁵.

2.2. Peran dan Pengaruh BRICS dalam Ekonomi dan Politik Global

BRICS telah menjadi kekuatan signifikan dalam perekonomian global, terutama melalui kontribusinya yang terus meningkat dan pembentukan lembaga keuangan seperti NDB. NDB sendiri dicanangkan sejak 2012 dengan mempertimbangkan keputusan dari para negara pemimpin BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan). Di tahun berikutnya para pemimpin BRICS menyatakan bahwa NDB layak untuk dibentuk. Pada KTT keenam BRICS di Brasil, perjanjian pendirian NDB ditandatangani dengan nama “*Agreement on the New Development Bank – Fortaleza, July 15*”³⁶. Tahun berikutnya, pertemuan perdana para Dewan Gubernur *New Development Bank* dilaksanakan pada 7 Juli 2015, dan Tuan K. V. Kamath diutus sebagai Presiden pertama NDB. Tahun 2016, NDB telah menerima angsuran pertamanya dari kelima negara anggota pendirinya. Angsuran awal

³⁵ Mariel Ferragamo, “*What Is the BRICS Group and Why Is It Expanding?*”, *cfr.org*, 12 Desember 2024, <https://www.cfr.org/background/what-brics-group-and-why-it-expanding>. Diakses pada 6 Januari 2025

³⁶ NDB, “*Agreement on the New Development Bank – Fortaleza, July 15*”, *ndb.int*, 15 Juli 2014, <https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2022/11/Agreement-on-the-New-Development-Bank.pdf>. Diakses pada 6 Januari 2025

tersebut terdiri dari kontribusi dari masing-masing negara anggota. NDB resmi membuka kantor regional pertamanya yang diberi nama *Africa Regional Center* di Johannesburg, Afrika Selatan pada 2017. Tahun 2018, NDB menerima peringkat AA+ Credit dari FITCH and S&P. NDB juga berusaha memperkuat aksesnya ke pasar keuangan global. Tahun 2019 NDB mendirikan kantor regionalnya di Amerika Serikat yaitu *NDB's Americas Regional Office* di Sao Paulo dan memiliki sub-kantor di Brasilia, dengan pendanaan USD New Development Bank juga menerima transaksi dengan mata uang EUR, CNY, ZAR, CHF³⁷. Tahun 2020, NDB mengalokasikan \$10 miliar terhadap respon dari pandemi Covid-19 untuk tanggap cepat pemulihan ekonomi anggotanya, di tahun ini juga NDB mendirikan *Eurasia Regional Center* di Moscow, Rusia. Tahun 2021 NDB memperluas anggotanya dengan menerima Bangladesh, Mesir, Uni Emirat Arab dan Uruguay. NDB juga memindahkan kantor pusatnya ke Shanghai, China secara permanen. Tahun 2022, kantor regional India didirikan di Gujarat International Finance Tec-City. Tahun 2023 NDB bergabung bersama *Multilateral Development Bank* dalam agenda COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab³⁸.

NDB yang didirikan oleh negara-negara BRICS pada tahun 2015, telah menyetujui lebih dari \$35 miliar untuk lebih dari 100 proyek infrastruktur di seluruh dunia³⁹. Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor seperti energi bersih dan transportasi. NDB berfungsi sebagai alternatif bagi lembaga keuangan internasional yang didominasi oleh negara-negara Barat. Dengan menyediakan dana untuk proyek-proyek pembangunan di negara-negara berkembang, NDB membantu meningkatkan kemandirian ekonomi anggota BRICS dan memperkuat posisi mereka di panggung global. BRICS menyumbang sekitar 37,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global, melebihi kontribusi G7 yang hanya mencapai 29,3%. Ini menunjukkan pergeseran signifikan dalam kekuatan ekonomi global, di mana BRICS kini

³⁷ NDB, "History", *ndb.int*, <https://www.ndb.int/about-ndb/history/>. Dakses pada 6 Januari 2025.

³⁸ NDB, "New Development Bank at the 28th United Nations Climate Change Conference", *ndb.int*, 2023, <https://www.ndb.int/event/new-development-bank-at-the-28th-united-nations-climate-change-conference/>. Diakses pada 6 Januari 2025.

³⁹ Griffith-Jones, "Financing global Development: The BRICS New Development Bank", 2015, hal 3.

menjadi penyeimbang dominasi negara-negara maju. Negara-negara BRICS menyumbang 18% dari total perdagangan internasional. Pangsa ekspor barang global mereka juga meningkat dari 10,7% pada tahun 2000 menjadi 23,3% pada tahun 2024⁴⁰.

BRICS aktif mendorong reformasi dalam sistem ekonomi global untuk menjadi lebih inklusif dan representatif. Mereka berusaha untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dalam forum internasional dan membangun sistem ekonomi multipolar yang lebih adil. Salah satu inisiatif penting adalah rencana untuk menciptakan mata uang bersama BRICS yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional. Hal ini berpotensi mengubah arus perdagangan global dan memperkuat kedaulatan ekonomi negara-negara anggota. BRICS aktif mendorong reformasi dalam tata kelola global, termasuk di lembaga-lembaga keuangan internasional. BRICS ini berupaya untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil. Kemitraan baru seperti Indonesia yang resmi bergabung pada akhir tahun 2024 lalu menunjukkan bahwa BRICS semakin diperhitungkan dalam arena diplomatik global. Negara-negara anggota berusaha meningkatkan posisi tawar mereka terhadap negara-negara Barat, serta membangun solidaritas di antara negara-negara *Global South*. BRICS telah mengembangkan sistem pembayaran alternatif melalui inisiatif seperti *BRICS Pay*, yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada SWIFT dan memfasilitasi transaksi dalam mata uang nasional masing-masing negara anggota. Ini mencerminkan ambisi BRICS untuk menciptakan arsitektur keuangan global yang lebih seimbang. Sejak pembentukannya, BRICS telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam perdagangan antar anggotanya.

⁴⁰ IMF, “*Gross Domestic Product*”, *data.imf.org*, <https://data.imf.org/regular.aspx?key=63122827>. Diakses pada 6 januari 2025

Pangsa ekspor barang global dari BRICS meningkat dari 10,7% pada tahun 2000 menjadi 23,3% pada tahun 2023⁴¹. Ini menunjukkan bahwa BRICS tidak hanya berfungsi sebagai forum politik tetapi juga sebagai platform ekonomi yang kuat. BRICS menjadi forum penting untuk membahas isu-isu strategis seperti perubahan iklim, keamanan energi, dan reformasi sistem pembayaran global. Dengan meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan ekonomi di dunia Barat, BRICS berperan sebagai kekuatan penyeimbang yang menawarkan alternatif bagi pendekatan tradisional terhadap masalah-masalah global.

2.3. Keterkaitan Indonesia dengan BRICS

Posisi Indonesia dalam sistem internasional semakin diperkuat dengan kemitraannya di BRICS, yang merupakan kelompok negara-negara dengan kekuatan ekonomi baru. Keputusan Indonesia untuk bergabung menjadi negara mitra dengan BRICS pada tahun 2024 dianggap sebagai langkah strategis yang dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Kemitraan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya tawar dalam berbagai forum internasional, termasuk dalam organisasi seperti OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*). Dengan menjadi bagian dari BRICS, Indonesia dapat berkontribusi lebih aktif dalam agenda global, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi dan reformasi sistem keuangan internasional. Indonesia berambisi untuk menjadi "lokomotif perubahan" dalam sistem internasional, mendorong perbaikan dan reformasi yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, Indonesia berupaya menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik, serta aktif dalam mencegah persaingan geoekonomi dan geopolitik yang meruncing.

Melalui kemitraan di BRICS, Indonesia dapat memanfaatkan platform ini untuk memperjuangkan keadilan perdagangan dan ketahanan pangan, serta

⁴¹ Joe Sullivan, "A BRICS Currency Could Shake the Dollar's Dominance", *foreignpolicy.com*, 24 April 2023, <https://foreignpolicy.com/2023/04/24/brics-currency-end-dollar-dominance-united-states-russia-china/>. Diakses pada 7 Januari 2025.

mendukung dedolarisasi yang menjadi agenda utama BRICS. Meskipun kemitraan di BRICS memberikan banyak kesempatan, Indonesia juga menghadapi tantangan. Dominasi negara-negara seperti China dan Rusia dalam aliansi ini menuntut strategi yang kuat agar Indonesia tetap memiliki pengaruh signifikan. Selain itu, hubungan strategis dengan negara-negara Barat harus dijaga agar tidak terganggu. Diplomasi bebas aktif harus diterapkan untuk memastikan bahwa kemitraan ini tidak mengganggu hubungan dengan mitra-mitra strategis lainnya. Dengan bergabung sebagai *Partner Country*, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai aktor penting dalam diplomasi global. Ini termasuk peran konstruktif dalam menyelesaikan konflik regional dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila di panggung internasional. Dalam konteks keamanan, partisipasi aktif dalam forum-forum multilateral memungkinkan Indonesia untuk berkontribusi pada stabilitas regional dan global, serta mengatasi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Secara keseluruhan, posisi Indonesia dalam sistem internasional semakin diperkuat melalui kemitraannya di BRICS. Dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang muncul, Indonesia dapat memainkan peran lebih besar dalam membentuk arsitektur global yang lebih adil dan seimbang. Keberanian untuk mengambil langkah strategis ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda internasional sambil tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai mitra global.

Kemitraan Indonesia dalam BRICS membuka berbagai peluang dan tantangan yang signifikan di tengah kebangkitan kekuatan baru dalam sistem internasional. Bergabung sebagai negara mitra dengan BRICS memberikan Indonesia kesempatan untuk memperluas akses ke pasar baru, terutama di negara-negara anggota seperti Brasil, Rusia, India, dan Cina. Hal ini dapat meningkatkan ekspor dan menarik investasi asing yang lebih besar. Kemitraan ini memungkinkan Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional, khususnya negara-negara Barat. Dengan adanya akses ke pasar non-tradisional, Indonesia dapat menjalin kerjasama ekonomi yang lebih beragam. Sebagai mitra BRICS, Indonesia memiliki peluang lebih besar

untuk memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan negara berkembang terdengar dalam forum internasional. Ini berpotensi meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah global. BRICS menyediakan platform untuk kolaborasi dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat. Kerja sama ini dapat memperkuat upaya kolektif untuk mencapai solusi yang lebih efektif terhadap masalah-masalah tersebut. Dengan BRICS, Indonesia bisa menarik investasi dari negara-negara anggota yang memiliki potensi besar dalam sektor-sektor strategis. Misalnya, peluang untuk membeli minyak dari Rusia dengan harga yang lebih kompetitif akibat embargo oleh negara-negara Barat.

Meskipun bergabung menjadi mitra dengan BRICS memberikan banyak keuntungan, ada risiko bahwa Indonesia mungkin menjadi terlalu bergantung pada kekuatan besar dalam aliansi ini. Adanya berbagai kepentingan di antara anggota BRICS, Indonesia harus mampu menavigasi dinamika internal aliansi ini agar tetap relevan dan berpengaruh. Persaingan antar anggota bisa menghambat kolaborasi yang efektif. Kemitraannya di BRICS juga menuntut Indonesia untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan negara-negara Barat dan organisasi internasional lainnya. Diplomasi yang hati-hati diperlukan agar tidak merusak hubungan strategis yang telah terjalin. Bergabung dengan aliansi yang berpotensi bersaing dengan kekuatan Barat dapat menarik perhatian negatif dari negara-negara tersebut. Ini bisa mempengaruhi hubungan bilateral dan kerjasama internasional di bidang lain. Untuk memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia perlu memastikan bahwa infrastruktur dan kebijakan domestiknya siap mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari kemitraan ini. Keterbatasan dalam kapasitas produksi atau birokrasi dapat menjadi penghalang bagi manfaat maksimal dari kemitraan BRICS. Secara keseluruhan, kemitraan Indonesia dalam BRICS menawarkan banyak peluang untuk memperkuat posisi ekonominya di panggung internasional serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya. Namun, tantangan-tantangan yang ada perlu dikelola dengan baik melalui strategi diplomatik yang cermat dan penguatan

kapasitas domestik agar manfaat dari aliansi ini dapat direalisasikan secara optimal.

2.4. Perspektif Indonesia dalam Kerjasama Global

Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara BRICS untuk memperkuat diplomasi ekonomi, politik, dan sosial. Negara-negara BRICS, melalui NDB telah menunjukkan bagaimana pembiayaan infrastruktur dapat dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan negara berkembang. Indonesia dapat memanfaatkan model ini untuk mendanai proyek-proyek strategis seperti pembangunan ibu kota baru dan pengembangan kawasan ekonomi khusus. BRICS memberikan akses ke pasar besar dengan populasi kolektif lebih dari 40% penduduk dunia. Indonesia harus aktif mengeksplorasi peluang untuk mengeksport komoditas unggulan dan menarik investasi dari negara-negara anggota BRICS. Indonesia dapat belajar dari BRICS dalam membangun kerjasama yang berbasis pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Ini penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam memimpin di kawasan dan mendukung aspirasi negara-negara *Global South* dalam pengambilan keputusan global.

BRICS berupaya mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional. Indonesia dapat mengembangkan sistem pembayaran alternatif yang memungkinkan transaksi dalam mata uang lokal, sehingga meningkatkan stabilitas ekonomi dan daya saing global. Indonesia harus aktif berpartisipasi dalam diskusi mengenai isu-isu global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat, mirip dengan peran yang dimainkan oleh negara-negara BRICS. Ini akan membantu Indonesia untuk memperkuat posisinya di panggung internasional. Sebagai negara demokrasi terbesar di BRICS⁴², Indonesia memiliki legitimasi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan di dalam kelompok ini. Melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam

⁴² Hanni Sofia, "BRICS, babak baru diplomasi ekonomi Indonesia", *Antaraneews.com*, 8 Januari 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4570074/brics-babak-baru-diplomasi-ekonomi-indonesia>. Diakses pada 7 Januari 2025.

proses tersebut akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan berdampak luas.

Mengingat ketidakpastian geopolitik yang ada, termasuk potensi perubahan kebijakan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Indonesia perlu mengembangkan strategi diplomatik yang fleksibel untuk menghadapi tantangan tersebut. Termasuk mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan dinamika baru di arena internasional. Menerapkan pelajaran dari BRICS, Indonesia dapat memperkuat diplomasi ekonominya dan memainkan peran yang lebih besar dalam sistem internasional. Kemitraan bersama BRICS bukan hanya sekedar status, tetapi merupakan alat strategis untuk mencapai tujuan-tujuan nasional yang lebih luas, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Analisis mengenai kepentingan strategis Indonesia untuk bergabung menjadi Negara Mitra dengan BRICS, serta pertimbangan untuk tetap fokus pada ASEAN dan kerjasama regional lainnya, menunjukkan dinamika yang kompleks dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Bergabung menjadi mitra BRICS memberikan Indonesia akses yang lebih luas ke pasar negara-negara berkembang lainnya, membuka peluang untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Penting mengingat bahwa BRICS mencakup beberapa ekonomi terbesar di dunia, seperti Cina dan India, yang dapat menjadi mitra strategis bagi Indonesia dalam memperluas jangkauan pasar ekspor. Kemitraan di BRICS memungkinkan Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam pengambilan keputusan global. Menjadi bagian dari kelompok yang mewakili negara-negara berkembang, Indonesia dapat lebih efektif mengadvokasi kepentingannya dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan reformasi lembaga internasional. Bergabung dengan BRICS membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada hubungan tradisional dengan negara-negara Barat. Ini sejalan dengan strategi politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang ingin menjalin kerjasama dengan berbagai pihak tanpa terikat pada satu kubu tertentu. Melalui NDB, Indonesia dapat memperoleh pendanaan untuk proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan tanpa tergantung pada lembaga keuangan tradisional seperti

IMF atau Bank Dunia. Ini sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi domestik

ASEAN sebagai organisasi regional memiliki kedekatan geografis dan budaya yang kuat antara anggotanya. Kerjasama di tingkat ASEAN memungkinkan Indonesia untuk lebih mudah berkolaborasi dalam isu-isu yang langsung mempengaruhi stabilitas dan keamanan kawasan, seperti keamanan maritim dan penanggulangan bencana. Fokus pada ASEAN membantu Indonesia menjaga stabilitas politik dan ekonomi di kawasan, yang penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kerjasama regional juga memberikan platform untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mendorong integrasi ekonomi di Asia Tenggara. Dengan menjadi pemimpin di ASEAN, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya untuk mempengaruhi kebijakan regional dan global tanpa harus terjebak dalam persaingan geopolitik antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China. Ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Keputusan untuk bergabung menjadi mitra BRICS atau tetap fokus pada ASEAN dan kerjasama regional tidaklah sederhana. Meskipun bergabung dengan BRICS menawarkan banyak keuntungan strategis bagi Indonesia, termasuk akses ke pasar baru dan penguatan suara di forum internasional, tetap mempertahankan hubungan kuat dalam kerangka ASEAN juga sangat penting untuk stabilitas kawasan.

BAB III

FAKTOR EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL PENYEBAB INDONESIA MENJADI NEGARA MITRA BRICS

3.1. Motivasi Ekonomi Indonesia untuk Bergabung dengan BRICS

Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki berbagai motivasi untuk bergabung dengan kelompok negara-negara BRICS. BRICS mewakili kekuatan ekonomi yang terus meningkat di dunia multipolar. Dalam konteks ini, motivasi utama Indonesia mencakup diversifikasi mitra ekonomi, penguatan perdagangan internasional, dan peningkatan arus investasi. Perspektif teori ekonomi politik internasional Robert Gilpin dapat memberikan landasan analitis untuk memahami motivasi tersebut. Indonesia menyadari pentingnya mengurangi ketergantungan ekonomi pada mitra-mitra tradisional seperti negara-negara maju di Barat seperti Amerika Serikat dan negara anggota Uni Eropa.

3.1.1. Memperluas Akses Pasar

Bergabung Indonesia dengan BRICS dapat memperluas akses pasar ke negara-negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi. Secara kolektif, negara-negara BRICS mewakili sekitar 45% populasi dunia dan menyumbang sekitar 32% dari output ekonomi global pada tahun 2022. Menjadi mitra, Indonesia mendapat peluang signifikan untuk meningkatkan akses pasar dan diversifikasi tujuan ekspor. China dan India, sebagai anggota BRICS, merupakan mitra dagang utama Indonesia. Pada tahun 2022, ekspor minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil*) Indonesia ke India mencapai 19% dari total ekspor CPO Indonesia⁴³. Dengan kemitraan BRICS, Indonesia berpotensi memperkuat dan memperluas hubungan dagang ini, tidak hanya dalam komoditas tradisional seperti CPO, tetapi juga produk manufaktur dan sektor strategis lainnya. Bergabung sebagai mitra dalam BRICS,

⁴³ Ditjenbun. "Overview Pasar Minyak Sawit India dan Potensi Peningkatan Ekspor CPO Indonesia", *ditjenbun.pertanian.go.id*, 7 Oktober 2023, <https://ditjenbun.pertanian.go.id/overview-pasar-minyak-sawit-india-dan-potensi-peningkatan-ekspor-cpo-indonesia/>. Diakses pada 10 Januari 2025

Indonesia mengadopsi pendekatan liberal dengan membuka diri terhadap pasar internasional, memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara berkembang lainnya, dan berpartisipasi dalam pembentukan sistem keuangan alternatif yang dikembangkan BRICS. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi domestik melalui akses pasar yang lebih luas, tetapi juga untuk berkontribusi pada tatanan ekonomi global yang lebih inklusif dan seimbang, sesuai dengan prinsip-prinsip liberalisme yang diusung oleh Gilpin. Berpartisipasi dalam BRICS, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Eropa, serta mengurangi dominasi mata uang dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional dengan alternatif seperti kerjasama menggunakan mata uang lokal sebagai alat transaksi internasional dengan beberapa negara BRICS, maupun akan mengusung mata uang bersama⁴⁴. Indonesia akan lebih mandiri dalam menentukan kebijakannya dan meningkatkan stabilitas ekonomi domestik.

3.1.2. Mengurangi Resiko

Indonesia memutuskan untuk menjadi mitra BRICS dengan tujuan strategis untuk mengurangi risiko ekonomi yang timbul akibat fluktuasi hubungan geopolitik dengan negara-negara Barat. Langkah ini memungkinkan Indonesia untuk mendiversifikasi hubungan ekonominya dan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional Barat. Dengan menjadi bagian dari BRICS, Indonesia dapat memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara berkembang lainnya, seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Hal ini memberikan akses yang lebih luas ke pasar non-tradisional dan sumber pendanaan alternatif, seperti NDB, yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan lainnya. BRICS menawarkan platform bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam

⁴⁴ Kemenkeu, “*Buletin Investasi, Keuangan, dan Ekonomi*”, April 2023, hal 5.

pembentukan kebijakan global yang lebih adil dan seimbang, mengurangi dominasi negara-negara Barat dalam pengambilan keputusan ekonomi internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan ekonominya terhadap dampak negatif yang mungkin timbul dari dinamika geopolitik dengan negara-negara Barat. Namun, penting bagi Indonesia untuk tetap menjaga keseimbangan dalam hubungan internasionalnya dan memastikan bahwa langkah ini tidak menimbulkan persepsi berpihak yang dapat mempengaruhi hubungan dengan mitra tradisionalnya.

3.1.3. Meningkatkan Daya Tawar

Indonesia memutuskan untuk menjadi Negara Mitra BRICS dengan tujuan strategis untuk meningkatkan daya tawar dalam forum ekonomi global. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi internasional dan memberikan pengaruh yang lebih besar dalam pembentukan kebijakan ekonomi global. Selain itu, kemitraan Indonesia dalam BRICS dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh BRICS. sebagai mitra BRICS, Indonesia juga berpotensi mengakses pasar yang lebih luas dan mendiversifikasi tujuan ekspor, sehingga mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan platform BRICS untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan global yang lebih adil dan seimbang, mengurangi dominasi negara-negara Barat dalam pengambilan keputusan ekonomi internasional. Secara keseluruhan, langkah Indonesia untuk bergabung dengan BRICS mencerminkan strategi untuk meningkatkan daya tawar dalam forum ekonomi global, memperluas kerjasama dengan negara-negara berkembang, dan berkontribusi pada tatanan ekonomi global yang lebih inklusif dan adil. Menurut Gilpin, dalam dunia ekonomi politik internasional, negara

berusaha memaksimalkan keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan jaringan aliansi yang dapat memperkuat otonomi strategisnya. Diversifikasi mitra ekonomi BRICS dapat memberikan Indonesia kebebasan strategis dari tekanan ekonomi yang sering dikaitkan dengan lembaga-lembaga keuangan global yang didominasi Barat, seperti IMF atau Bank Dunia.

BRICS sebagai blok ekonomi telah menunjukkan potensi besar dalam perdagangan intra-blok. Bagi Indonesia, bergabung dengan BRICS akan membuka peluang untuk Indonesia untuk meningkatkan ekspor komoditas unggulan seperti kelapa sawit, batu bara, dan produk pertanian. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pasar dan memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara anggota BRICS. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor nonmigas Indonesia ke lima negara anggota BRICS yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan mencapai \$84,37 miliar sepanjang tahun 2024, yang merupakan 33,91% dari total ekspor nonmigas Indonesia.

Tabel 3.1 Rincian Ekspor Indonesia ke Negara Anggota Utama BRICS

Negara	Jumlah / \$	Komoditas Utama
Brasil	\$1,7 miliar	Lemak dan minyak Hewani atau Nabati
Rusia	\$1,31 miliar	Lemak dan minyak Hewani atau Nabati
India	\$6,89 miliar	Batu Bara dan CPO
China	\$16,07 miliar	Besi dan Baja
Afrika Selatan	\$0,78 miliar	Lemak dan minyak Hewani atau Nabati

Sumber: Badan Pusat Statistika

3.1.4. Memanfaatkan Permintaan Pasar

Indonesia bergabung dengan BRICS untuk memanfaatkan permintaan domestik yang besar di negara-negara anggota terhadap produk manufaktur dan energi. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi produk-produk Indonesia dan meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara BRICS. Kerja sama antara Indonesia dan Brasil di sektor pertanian telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam konteks perdagangan produk pertanian dan investasi di sektor peternakan. Data menunjukkan bahwa nilai perdagangan antara kedua negara telah melampaui \$1 miliar sejak 2006⁴⁵, dengan Indonesia mengalami surplus perdagangan. Indonesia juga berusaha untuk meningkatkan ekspor komoditas buah-buahan seperti mangga dan nanas ke Brasil, tanpa batasan kuota. Pada September 2024, Menteri Pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman, mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian Brasil, Carlos Favaro. Pertemuan ini menghasilkan *Memorandum of Understanding* (MoU) telah digagas antara PT Asiabeef Biofarma Indonesia (Asiabeef) dan Agropecuaria 31 (Grup 31). Perjanjian ini melibatkan investasi sebesar Rp4,5 triliun untuk mengembangkan 100.000 ekor sapi perah tropis asal Brasil di Indonesia, guna mendukung peningkatan produksi susu dalam negeri. Menteri Amran menekankan bahwa kehadiran investor Brasil di sektor peternakan akan menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat perekonomian pedesaan. Ia berharap bahwa dengan dukungan investasi yang kuat, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan protein dari dalam negeri secara mandiri.

⁴⁵ humaspkh. "Pertemuan Bilateral Pemerintah RI - Brasil, Mentan Amran Gaet Investasi Peternakan Rp 4,5 Triliun", *ditjenpkh.pertanian.go.id*, 13 September 2024, <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/1984-pertemuan-bilateral-pemerintah-ri-brasil-mentan-amran-gaet-investasi-peternakan-rp-45-triliun>. Diakses 11 Januari 2025

3.1.5. Memperkuat Kerjasama Sebelumnya

Kerja sama antara Indonesia dan Rusia di bidang energi telah mengalami kemajuan signifikan, terutama dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dan eksplorasi sumber daya minyak dan gas⁴⁶. Indonesia dan Rusia telah menandatangani MoU yang menegaskan komitmen mereka untuk bekerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai⁴⁷. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menyatakan bahwa Rusia siap membantu Indonesia dalam mengembangkan teknologi nuklir, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Diskusi mengenai kerjasama ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan perhatian khusus pada pembangunan Reaktor Modular Kecil yang diusulkan sebagai solusi untuk kebutuhan energi Indonesia. Gubernur Provinsi Kaluga, Vladislav Shapsha, juga mendukung inisiatif ini, menyebutkan bahwa Kaluga memiliki beberapa universitas yang siap berkolaborasi dengan Indonesia dalam bidang energi nuklir. Perusahaan negara Rusia, ROSATOM, yang memiliki pengalaman luas dalam teknologi nuklir, menjadi mitra utama dalam proyek ini. Selain kerjasama di sektor nuklir, kedua negara juga berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi dalam eksplorasi minyak dan gas. Delegasi Rusia telah menawarkan teknologi dan pengalaman mereka dalam pengembangan sumber daya ini, yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi minyak serta pengembangan infrastruktur terkait. Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor energi ini, dan kerjasama dengan Rusia diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia yang merupakan salah satu pemain utama di pasar energi global.

Kerjasama antara Indonesia dan India dalam sektor manufaktur dan energi menunjukkan potensi yang signifikan untuk kedua negara,

⁴⁶ Cindy Frishanti Octavia. "Rusia siap kerjasama dengan RI kembangkan nuklir sebagai energi", *Antaraneews.com*, 20 Agustus 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4274499/rusia-siap-kerjasama-dengan-ri-kembangkan-nuklir-sebagai-energi>. Diakses pada 11 Januari 2025

⁴⁷ Bapaten. "Indonesia-Rusia Perkuat Kerjasama di Bidang Pengawasan Tenaga Nuklir", *bapaten.go.id*, 29 Maret 2017, <https://www.bapaten.go.id/berita/indonesiarusia-perkuat-kerjasama-di-bidang-pengawasan-tenaga-nuklir-134827>. Diakses pada 11 Januari 2025

dengan fokus pada ekspor produk dan kebutuhan energi⁴⁸. Indonesia mengekspor berbagai produk manufaktur ke India, yang mencakup tekstil, elektronik, suku cadang otomotif dan energi. Pada Juli 2023, Indonesia mengekspor sekitar 400 ton benang ke India⁴⁹, menandai peningkatan perdagangan pasca pandemi. Produk elektronik juga menjadi bagian dari ekspor Indonesia ke pasar India, dengan permintaan yang terus meningkat. Sektor otomotif merupakan area di mana Indonesia berusaha meningkatkan ekspor, mengingat pertumbuhan industri otomotif di India. Total perdagangan antara Indonesia dan India pada tahun 2023 mencapai sekitar \$32,71 miliar, dengan Indonesia menikmati surplus perdagangan. Produk ekspor utama Indonesia ke India termasuk batu bara, minyak sawit, dan besi paduan⁵⁰. India merupakan salah satu importir utama batu bara dari Indonesia. Permintaan batu bara dari India sangat tinggi, seiring dengan kebutuhan energi yang terus meningkat untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Pada tahun 2022, batu bara menjadi salah satu komoditas utama yang diekspor ke India, berkontribusi besar terhadap total nilai ekspor Indonesia.

Kerjasama antara Indonesia dan China di sektor manufaktur dan energi telah berkembang pesat, dengan berbagai inisiatif dan investasi yang signifikan. Indonesia dan China telah menjalin kerjasama dalam pengembangan kawasan industri. Kawasan industri Morowali terletak di Sulawesi Tengah, kawasan ini berfokus pada pengolahan nikel dan

⁴⁸ Susiwijono Moegiarso. "Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan India, Sepakat Mendorong Partisipasi di IPEF", *ekon.go.id*, 11 September 2022, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4526/indonesia-perkuat-kerjasama-dengan-india-sepakat-mendorong-partisipasi-di-ipef>. Diakses pada 11 Januari 2025

⁴⁹ Yusron Fahmi. "Buktikan Industri Jateng Bangkit Pasca Covid-19, Ganjar Pranowo Lepas Ekspor Benang ke India dan Brazil", *liputan6.com*, 18 Juli 2023, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5347514/buktikan-industri-jateng-bangkit-pasca-covid-19-ganjar-pranowo-lepas-ekspor-benang-ke-india-dan-brazil>. Diakses pada 11 Januari 2025

⁵⁰ Maria Cicilia Galuh Prayudhia. "Mendag ke India perjuangkan ekspor komoditas unggulan Indonesia", *Antaraneews.com*, 13 Maret 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/3437808/mendag-ke-india-perjuangkan-ekspor-komoditas-unggulan-indonesia>. Diakses pada 11 Januari 2025

produksi stainless steel⁵¹. Investasi besar dari perusahaan China di kawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat rantai pasokan industri logam⁵². Perjanjian kerjasama pada tahun 2023, Indonesia dan China menandatangani sekitar 23 perjanjian kerjasama, di mana 60% dari perjanjian tersebut berada di sektor industri manufaktur, dengan total nilai investasi mencapai \$32,8 miliar. Ini mencakup berbagai sektor, termasuk otomotif dan elektronik. Perusahaan-perusahaan China seperti *Wuling Motors* juga telah berinvestasi di Indonesia⁵³, menciptakan ribuan lapangan kerja dan mendorong perkembangan industri otomotif lokal. China berperan aktif dalam pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga air di Indonesia⁵⁴, yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan negara ini. Selain proyek tenaga air, investasi juga diarahkan pada proyek energi terbarukan lainnya untuk mendukung transisi Indonesia menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan⁵⁵. Kerja sama ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik tetapi juga untuk membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi karbon.

Kerjasama antara Indonesia dan Afrika Selatan di sektor manufaktur dan energi menunjukkan potensi yang signifikan, terutama dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS, yang diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Indonesia mengeksport berbagai produk manufaktur ke

⁵¹ Andilala. “Mari mengenal PT IMIP di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah”, *Antaraneews.com*, 9 Maret 2024, <https://sulteng.antaranews.com/berita/307389/mari-mengenal-pt-imip-di-kabupaten-morowali-sulawesi-tengah>. Diakses pada 13 Januari 2025

⁵² Viriya Singgih. “Setumpuk masalah di balik investasi China - 'Demam nikel membuat pemerintah kehilangan akal sehat’”, *BBC.com*, 29 Januari 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw4m1k0j7vro>. Diakses pada 13 Januari 2025

⁵³ Agustina Melani. “Menperin: Wuling Jadikan Indonesia Satu-satunya Fasilitas Pabrikasi EV di Luar China”, *liputan6.com*, 18 Juni 2024, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5622703/menperin-wuling-jadikan-indonesia-satu-satunya-fasilitas-pabrikasi-ev-di-luar-china>. Diakses pada 13 Januari 2025

⁵⁴ Anastasia Arvirianty. “China Bangun PLTA Terbesar di RI, Kapasitas Sentuh 9000 MW”, *cncindonesia.com*, 21 Agustus 2019, <https://www.cncindonesia.com/news/20190821194312-4-93758/china-bangun-plta-terbesar-di-ri-kapasitas-sentuh-9000-mw>. Diakses pada 13 Januari 2025

⁵⁵ Desca Lidya Natalia. “Indonesia tawarkan investasi energi terbarukan kepada pengusaha China”, *Antaraneews.com*, 2 April 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4041132/indonesia-tawarkan-investasi-energi-terbarukan-kepada-pengusaha-china>. Diakses pada 13 Januari 2025

Afrika Selatan, termasuk elektronik dan bahan tekstil⁵⁶. Produk elektronik menjadi salah satu komoditas utama dalam ekspor Indonesia ke Afrika Selatan. Sektor tekstil juga berkontribusi pada nilai ekspor, dengan permintaan yang terus meningkat. Pada tahun 2022, total perdagangan antara kedua negara mencapai \$3,25 miliar dolar, meningkat 60,6% dari tahun sebelumnya⁵⁷. Meskipun ada penurunan dalam ekspor pada awal tahun 2023, potensi untuk meningkatkan ekspor produk makanan olahan dan barang-barang lainnya tetap ada. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indonesia menyatakan bahwa banyak peluang kerjasama di sektor UMKM dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan ini. Di bidang energi, Indonesia dan Afrika Selatan telah menjajaki peluang kerjasama di sektor energi terbarukan⁵⁸. Kedua negara berkomitmen untuk mengembangkan proyek-proyek energi terbarukan yang dapat mendukung kebutuhan energi berkelanjutan. Dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS, diharapkan kerjasama di sektor manufaktur dan energi dengan negara-negara anggota lainnya dapat semakin ditingkatkan. Ini akan membuka lebih banyak peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar dan meningkatkan investasi dalam proyek-proyek strategis.

Gilpin menekankan bahwa perdagangan internasional bukan hanya alat untuk akumulasi ekonomi tetapi juga instrumen untuk mencapai tujuan politik. Dengan memperluas perdagangan dengan BRICS, Indonesia dapat meningkatkan posisi tawarnya dalam tatanan ekonomi global yang sedang mengalami perubahan. Salah satu motivasi utama Indonesia untuk bergabung dengan BRICS adalah menarik lebih

⁵⁶ Kuntum Khaira Riswan. "MenKopUKM jajaki kerjasama pengembangan UMKM dengan Afrika Selatan", *Antaraneews.com*, 26 Oktober 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/3793572/menkopukm-jajaki-kerja-sama-pengembangan-umkm-dengan-afrika-selatan>. Diakses pada 17 Januari 2025.

⁵⁷ Lusita Novita Sari, "Peningkatan Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara Afrika Pascakunjungan Kenegaraan Presiden RI", *setkab.go.id*, 29 November 2023, <https://setkab.go.id/peningkatan-hubungan-indonesia-dengan-negara-negara-afrika-pascakunjungan-kenegaraan-presiden-ri/>. Diakses pada 17 Januari 2025.

⁵⁸ Kuntum Khaira Riswan, "Sinergi Indonesia-Afrika untuk memperluas cakupan energi terbarukan", *Antaraneews.com*, 10 September 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4321915/sinergi-indonesia-afrika-untuk-memperluas-cakupan-energi-terbarukan>. Diakses pada 17 Januari 2025.

banyak investasi dari negara-negara anggota. Dalam hal ini China dan India dapat menjadi sumber investasi infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan domestik. Akses ke bank pembangunan BRICS dapat menyediakan alternatif pendanaan untuk proyek-proyek besar tanpa syarat politik yang berat. Kolaborasi dengan negara-negara BRICS dapat mempercepat transfer teknologi dan inovasi.

Gilpin menjelaskan bahwa investasi asing langsung (FDI) memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi negara-negara berkembang harus berusaha menjaga keseimbangan antara ketergantungan dan kedaulatan ekonomi. Melalui BRICS, Indonesia dapat mengejar investasi yang lebih sejalan dengan agenda nasionalnya. Gilpin berpendapat bahwa tatanan ekonomi global didasarkan pada interaksi antara kekuatan ekonomi, politik, dan keamanan. Struktur multipolar ekonomi dunia, Gilpin memandang bahwa transisi dari dominasi Barat ke tatanan multipolar memberi peluang bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam sistem internasional. Interdependensi ekonomi, Indonesia dapat memanfaatkan BRICS untuk menciptakan pola interdependensi baru yang lebih adil dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara maju. *Nation-state-centric economy*, Dalam pandangan Gilpin, negara tetap menjadi aktor utama dalam ekonomi global. Oleh karena itu, strategi bergabung dengan BRICS memungkinkan Indonesia memperkuat kontrol negara atas arah pembangunan ekonomi. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS memiliki motivasi ekonomi yang kuat, yakni diversifikasi mitra, penguatan perdagangan, dan peningkatan investasi. Dalam kerangka teori ekonomi politik internasional Robert Gilpin, langkah ini mencerminkan upaya strategis untuk meningkatkan otonomi dan daya tawar Indonesia di tengah perubahan tatanan global. Dengan BRICS, Indonesia tidak hanya dapat memanfaatkan peluang ekonomi, tetapi

juga memperkuat posisinya dalam dinamika ekonomi politik internasional.

3.2. Motivasi Politik Indonesia dalam Dinamika Global

Sebagai negara berkembang dengan posisi strategis di Asia Tenggara, Indonesia memiliki motivasi politik yang signifikan dalam dinamika global. Motivasi ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan nasional tetapi juga kontribusi aktif dalam membentuk tatanan internasional yang lebih adil. Beberapa motivasi utama meliputi upaya menghadapi dominasi global, mengejar kepentingan strategis regional, dan memperkuat peran diplomasi global. Dominasi global oleh negara-negara besar, terutama kekuatan Barat, sering kali menciptakan tatanan internasional yang kurang menguntungkan bagi negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki beberapa motivasi untuk menyeimbangkan dinamika tersebut.

3.2.1. Meningkatkan Kemandirian Politik

Indonesia memiliki beberapa motivasi untuk menyeimbangkan dinamika geopolitik global, salah satunya adalah meningkatkan kemandirian politik. Menjadi mitra BRICS, Indonesia dapat memperluas opsi kerjasama internasionalnya, sehingga tidak hanya bergantung pada negara-negara Barat atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

1. **Diversifikasi Mitra Internasional.** Dengan menjalin hubungan erat dengan negara-negara BRICS seperti China, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada satu blok geopolitik tertentu. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk mengambil keputusan politik dan ekonomi secara lebih fleksibel tanpa tekanan dari kekuatan global tertentu.
2. **Peluang Alternatif dalam Pendanaan dan Investasi.** kemitraan dalam BRICS membuka akses ke NDB, yang menyediakan sumber

pendanaan alternatif untuk proyek infrastruktur tanpa persyaratan ketat seperti yang diterapkan oleh IMF atau Bank Dunia. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk membiayai pembangunan nasional dengan lebih leluasa, sesuai dengan kepentingan domestiknya.

3. **Memperkuat Posisi dalam Forum Global.** Dengan menjadi bagian dari BRICS, Indonesia dapat lebih aktif dalam membentuk kebijakan ekonomi dan politik global, terutama dalam mengadvokasi kepentingan negara-negara berkembang. Indonesia dapat memainkan peran sebagai jembatan antara BRICS dan negara-negara ASEAN, menciptakan keseimbangan dalam tatanan global.
4. **Mengurangi Pengaruh Geopolitik Barat dalam Kebijakan Domestik.** Ketergantungan pada negara-negara Barat sering kali diiringi dengan intervensi terhadap kebijakan dalam negeri. Dengan memperluas hubungan dengan BRICS, Indonesia dapat mempertahankan kebijakan luar negeri yang lebih mandiri dan berorientasi pada kepentingan nasionalnya.

3.2.2. Mendorong Tatanan Global yang Lebih Adil

Salah satu motivasi utama Indonesia dalam bergabung sebagai mitra BRICS adalah mendorong tatanan global yang lebih adil. Selama ini, sistem ekonomi dan politik global masih didominasi oleh negara-negara maju, terutama melalui lembaga-lembaga seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dengan bergabung dalam BRICS, Indonesia berupaya menciptakan keseimbangan kekuatan yang lebih merata dan memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global. BRICS mendukung tatanan global yang lebih adil dengan mengurangi hegemoni ekonomi negara maju, memperkuat peran negara berkembang dalam pengambilan keputusan global, mendorong sistem perdagangan yang lebih inklusif, dan penguatan kerjasama selatan-selatan.

Struktur ekonomi global saat ini masih sangat bergantung pada dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utama dalam perdagangan dan sistem keuangan internasional. Hal ini memberikan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, pengaruh besar terhadap ekonomi dunia, termasuk melalui kebijakan suku bunga *Federal Reserve* dan sanksi ekonomi yang dapat mempengaruhi negara lain. BRICS berupaya menciptakan sistem yang lebih adil dengan mengurangi dominasi negara-negara maju. BRICS mendorong penggunaan mata uang masing-masing negara dalam transaksi perdagangan dan investasi. Ini mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, yang selama ini menjadi standar global. Dengan demikian, negara-negara anggota dan mitra dagang BRICS dapat lebih mandiri dalam mengelola nilai tukar dan kebijakan moneter mereka tanpa terlalu terpengaruh oleh kebijakan ekonomi Amerika Serikat atau Barat. NDB, yang didirikan oleh BRICS, berfungsi sebagai alternatif terhadap lembaga keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia, yang sering dikritik karena kebijakan pinjaman yang menguntungkan negara-negara maju dan memberikan tekanan ekonomi bagi negara-negara berkembang. NDB menyediakan pembiayaan untuk proyek infrastruktur dan pembangunan di negara-negara anggota tanpa persyaratan politik yang ketat, sehingga memberikan lebih banyak fleksibilitas dan kemandirian ekonomi. Melalui langkah-langkah ini, BRICS berupaya menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan mengurangi hegemoni ekonomi negara-negara Barat.

BRICS berusaha menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih adil dengan memperkuat peran negara berkembang dalam pengambilan keputusan global. Hal ini penting karena selama ini kebijakan ekonomi dan keuangan dunia banyak ditentukan oleh negara-negara maju melalui organisasi seperti G7, IMF, dan Bank Dunia, yang sering kali lebih menguntungkan kepentingan mereka sendiri dibandingkan negara berkembang. Negara-negara maju dalam G7 dan lembaga seperti IMF memiliki kekuatan besar dalam menetapkan

kebijakan ekonomi global, termasuk suku bunga, bantuan keuangan, dan regulasi perdagangan. BRICS memberikan wadah bagi negara berkembang untuk memiliki suara lebih kuat dalam isu-isu ini, sehingga kebijakan ekonomi dunia lebih mencerminkan kepentingan mereka. Dengan bergabung atau berkolaborasi dengan BRICS, Indonesia dan negara berkembang lainnya memiliki kesempatan lebih besar untuk menyuarakan kepentingannya, terutama dalam:

- a. **Perdagangan:** Mendorong sistem perdagangan yang lebih adil, tidak hanya berpihak pada negara maju.
- b. **Investasi:** Memperluas akses pendanaan tanpa ketergantungan pada lembaga keuangan Barat yang sering memberikan syarat berat.
- c. **Kebijakan Lingkungan:** Memastikan kebijakan perubahan iklim mempertimbangkan keadilan bagi negara berkembang yang masih membutuhkan pembangunan ekonomi.

BRICS juga mengusulkan reformasi dalam lembaga-lembaga global seperti IMF dan PBB agar lebih mencerminkan keseimbangan kekuatan dunia saat ini, bukan hanya menguntungkan negara-negara Barat. Dengan cara ini, BRICS memberikan peluang bagi negara berkembang untuk memiliki pengaruh lebih besar dalam pembuatan kebijakan global, sehingga menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Salah satu alasan BRICS dianggap lebih adil adalah karena mendorong sistem perdagangan yang lebih inklusif, terutama bagi negara-negara berkembang. Selama ini, sistem perdagangan global sering kali didominasi oleh negara maju yang menetapkan aturan yang menguntungkan mereka, seperti proteksionisme terselubung, tarif tinggi, serta hambatan non-tarif yang menyulitkan negara berkembang bersaing di pasar internasional. BRICS mewujudkan perdagangan yang lebih inklusif dengan advokasi kebijakan perdagangan, penghapusan hambatan tarif dan non tarif, dan juga usaha meningkatkan pasar bagi negara berkembang. Advokasi terhadap kebijakan perdagangan yang

tidak diskriminatif, yaitu negara-negara maju sering kali menerapkan kebijakan proteksionis yang merugikan negara berkembang, seperti subsidi pertanian yang membuat produk negara maju lebih murah di pasar global atau standar ketat yang sulit dipenuhi oleh negara berkembang. BRICS memperjuangkan perdagangan yang lebih adil dengan menentang praktik-praktik diskriminatif ini dan mendorong perjanjian yang lebih menguntungkan bagi negara berkembang. Penghapusan hambatan tarif yaitu, BRICS mendorong pengurangan atau penghapusan tarif bagi produk dari negara berkembang, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar global, sedangkan hambatan non-tarif yaitu banyak negara maju memberlakukan standar lingkungan atau kesehatan yang ketat yang sering kali digunakan sebagai alasan untuk membatasi impor dari negara berkembang. BRICS berupaya menciptakan regulasi perdagangan yang lebih transparan dan adil.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi negara berkembang adalah ketergantungan pada pasar negara maju untuk ekspor. Selama ini, negara-negara berkembang sering mengalami kendala seperti hambatan tarif tinggi, regulasi ketat, serta dominasi negara maju dalam rantai pasok global. BRICS hadir sebagai solusi dengan menciptakan peluang perdagangan antar-negara berkembang yang lebih inklusif dan saling menguntungkan. BRICS meningkatkan akses pasar bagi negara berkembang dengan mengurangi ketergantungan pada negara maju, memanfaatkan pasar besar pada anggota, membangun kemitraan yang setara dan meningkatkan investasi dan infrastruktur dalam kerjasama perdagangan. Sebagian besar negara berkembang masih sangat bergantung pada pasar negara maju seperti Amerika Serikat dan negara anggota Uni Eropa untuk ekspor, BRICS menciptakan pasar alternatif dengan membuka lebih banyak peluang perdagangan antara negara-negara berkembang, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada negara maju yang sering menerapkan kebijakan proteksionis. Memanfaatkan pasar besar China dan India, dua anggota utama BRICS, memiliki populasi yang besar dan ekonomi yang berkembang pesat,

menjadikannya pasar potensial bagi produk negara berkembang. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dapat lebih mudah mengekspor produk seperti komoditas pertanian, manufaktur, dan industri kreatif ke pasar BRICS tanpa hambatan perdagangan yang berat. BRICS mendorong kerjasama dagang yang lebih adil di antara anggotanya dan dengan negara berkembang lainnya, melalui perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral dalam BRICS, negara berkembang mendapatkan akses pasar yang lebih luas dengan persyaratan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perjanjian dagang yang sering dikendalikan negara maju. Meningkatkan investasi dan infrastruktur perdagangan, BRICS melalui NDB, mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas ekspor negara berkembang, Investasi dalam pelabuhan, jalur transportasi, dan teknologi perdagangan digital membantu mempercepat akses negara berkembang ke pasar global.

3.2.3. Tanggung Jawab Sebagai Pemimpin Asean

Sebagai pemimpin de facto di ASEAN, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Motivasi politik regional Indonesia meliputi menjaga stabilitas kawasan, meningkatkan integrasi ekonomi regional dan sebagai tanggapan persaingan diantara kawasan.

Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas kawasan, khususnya di Asia Tenggara yang selama ini diprioritaskan sebagai zona damai, bebas dari konflik bersenjata, dan stabil secara politik. Komitmen ini terlihat dalam berbagai inisiatif diplomasi, salah satunya *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* (ZOPFAN) yang dideklarasikan oleh ASEAN pada 1971⁵⁹. Dalam konteks geopolitik global yang semakin dinamis, bergabung sebagai mitra BRICS memberikan Indonesia platform baru untuk memperkuat

⁵⁹ “1971 ZONE OF PEACE, FREEDOM AND NEUTRALITY DECLARATION”, <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/02/1971-Zone-of-Peace-Freedom-and-Neutrality-Declaration-1-1.pdf>.

komitmen ini. BRICS Membantu Indonesia menjaga stabilitas kawasan dengan mendorong dunia multipolar dan menjaga netralitas. BRICS berusaha menciptakan tatanan dunia yang lebih multipolar, di mana kekuatan ekonomi dan politik tidak hanya didominasi oleh negara-negara Barat. ini sejalan dengan prinsip ZOPFAN, yang menekankan netralitas kawasan Asia Tenggara dari pengaruh kekuatan besar dunia. Dengan menjadi mitra BRICS, Indonesia dapat menjaga keseimbangan diplomatik, tidak berpihak sepenuhnya pada blok Barat maupun Timur. Mengurangi resiko konflik regional, dengan meningkatnya ketegangan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan. BRICS dapat menjadi platform bagi Indonesia untuk mendorong dialog dan kerjasama internasional guna mengurangi potensi konflik, kemitraan BRICS juga memberi Indonesia peluang untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan berbagai negara, sehingga menciptakan saling ketergantungan ekonomi yang dapat meredam potensi konflik. Mendukung stabilitas ekonomi sebagai fondasi perdamaian, stabilitas politik sering kali bergantung pada stabilitas ekonomi. BRICS, dengan berbagai inisiatifnya seperti NDB, dapat membantu negara-negara berkembang, termasuk di Asia Tenggara, untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mengurangi ketimpangan, dengan ekonomi yang kuat, kawasan akan lebih tahan terhadap gejolak politik dan sosial yang dapat memicu konflik. Memperkuat peran asean dalam tatanan global, sebagai anggota utama ASEAN, Indonesia dapat menggunakan posisinya di BRICS untuk meningkatkan peran ASEAN dalam diplomasi global, dengan bergabung dalam BRICS, Indonesia dapat membawa isu-isu strategis Asia Tenggara ke forum internasional yang lebih luas, memastikan bahwa kepentingan regional tetap diperhitungkan dalam kebijakan global.

Indonesia berperan sebagai penggerak utama ASEAN dengan memiliki kepentingan strategis dalam mempercepat integrasi ekonomi kawasan melalui ASEAN *Economic Community* (AEC). Peran ini

didukung oleh ekonominya yang terbesar di ASEAN, sumber daya yang melimpah, serta posisi geopolitik yang strategis, sehingga mendorong kerjasama dan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan pasar dan basis produksi tunggal, meningkatkan daya saing, serta memperkuat peran ASEAN dalam ekonomi global. Bergabung sebagai mitra BRICS memberikan Indonesia peluang lebih besar untuk mendukung integrasi ekonomi ASEAN dan memperkuat posisi kawasan dalam persaingan geopolitik global. BRICS Membantu Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN dengan memperluas akses pasar investasi bagi negara ASEAN, mengurangi ketergantungan pada mata uang Barat, membantu meningkatkan daya saing ASEAN dalam geopolitik global dan mendorong kolaborasi infrastruktur dan teknologi. BRICS yang terdiri dari ekonomi besar seperti China, India, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan, menawarkan peluang pasar ekspor baru bagi negara-negara ASEAN, dengan hubungan ekonomi yang lebih erat dengan BRICS, ASEAN dapat mengurangi ketergantungan pada negara maju seperti Amerika Serikat dan negara anggota Uni Eropa. Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi dari BRICS untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan industri di kawasan ASEAN. Saat ini, perdagangan internasional ASEAN masih banyak bergantung pada dolar Amerika Serikat, yang membuat ekonomi kawasan rentan terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat, seperti kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve, BRICS mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi, yang dapat membantu stabilitas ekonomi ASEAN dan mengurangi volatilitas akibat fluktuasi dolar Amerika Serikat. ASEAN sering menghadapi tantangan dalam persaingan ekonomi dan geopolitik antara Amerika Serikat dan China. Dengan BRICS sebagai mitra, ASEAN dapat memiliki alternatif kerjasama ekonomi yang lebih luas dan memperkuat posisi negosiasi dalam forum global, integrasi ekonomi ASEAN yang lebih kuat dengan BRICS juga dapat mempercepat transformasi ASEAN menjadi pusat

pertumbuhan ekonomi baru di dunia. BRICS, melalui NDB, mendanai proyek infrastruktur yang mendukung integrasi ekonomi regional, termasuk di ASEAN, kerjasama dengan BRICS dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan industri manufaktur yang penting bagi daya saing ASEAN.

Kawasan Indo-Pasifik saat ini menjadi arena persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan China, yang berkompetisi dalam bidang ekonomi, militer, dan diplomasi. Indonesia, sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan, berupaya untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan mencegah dominasi salah satu pihak. Sebagai bagian dari strategi ini, Indonesia mengusung *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) yang menekankan kerjasama inklusif, bukan konfrontasi. Menjadi mitra BRICS adalah bagian dari upaya Indonesia untuk menjalankan strategi keseimbangan ini. BRICS membantu Indonesia dalam menyeimbangkan kekuatan di Indo-pasifik dengan menjaga netralitas dan keseimbangan geopolitik, mencegah dominasi eksternal, memperkuat kerjasama ekonomi yang tidak eksklusif. Menjaga netralitas dan keseimbangan geopolitik yaitu Indonesia tidak ingin terjebak dalam blok Amerika Serikat atau China, melainkan berperan sebagai penyeimbang, BRICS memberi Indonesia alternatif diplomatik dan ekonomi, sehingga tidak terlalu bergantung pada kekuatan besar tertentu. Mencegah dominasi kekuatan eksternal di Indo-pasifik yaitu Amerika Serikat memperkuat kehadirannya melalui inisiatif seperti AUKUS (Australia, Inggris, Amerika Serikat) dan Quad (Amerika Serikat, India, Jepang, Australia), sementara China terus memperluas pengaruhnya melalui *Belt and Road Initiative* (BRI), BRICS dapat menjadi platform bagi Indonesia untuk mengadvokasi keseimbangan kekuatan, mencegah kawasan Indo-Pasifik menjadi medan perang ekonomi atau militer antara dua raksasa tersebut. Memperkuat kerjasama ekonomi yang tidak eksklusif yaitu AOIP menekankan kerjasama ekonomi yang terbuka dan inklusif, bukan hanya berorientasi pada aliansi militer atau persaingan strategis.

Bergabung sebagai negara mitra dalam BRICS, berpeluang untuk memperluas kerjasama ekonomi dengan berbagai negara tanpa harus memihak secara eksklusif kepada Amerika Serikat atau China. Selain itu, dukungan terhadap ASEAN sebagai pusat stabilitas regional menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga peran utama ASEAN dalam menentukan masa depan Indo-Pasifik. Partisipasi Indonesia dalam BRICS juga dapat memperkuat posisi ASEAN di kancah global serta memastikan kepentingan kawasan tetap terlindungi dari pengaruh kekuatan eksternal.

3.2.4. Diplomasi Global Yang Aktif

Indonesia memiliki dorongan politik yang besar untuk memperluas perannya di tingkat global melalui keterlibatan diplomatik yang dinamis. Dengan menjadi mitra di BRICS, Indonesia berupaya menjalankan diplomasi aktif yang mencakup penguatan kerjasama ekonomi, peningkatan peran dalam tata kelola global, serta mendorong keseimbangan kekuatan dunia yang lebih adil. Melalui pendekatan ini, Indonesia ingin memastikan bahwa kepentingan negara-negara berkembang, termasuk ASEAN, dapat lebih diperhitungkan dalam berbagai keputusan internasional. Hal ini melibatkan memperkuat peran sebagai negara berkembang, mediasi konflik internasional dan meningkatkan *soft power* melalui nilai-nilai nasional.

Sebagai salah satu negara berkembang dengan ekonomi terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam memastikan bahwa suara negara-negara berkembang didengar dalam tatanan global. Selama ini, kebijakan ekonomi dan politik internasional masih banyak didominasi oleh negara-negara maju, terutama melalui lembaga seperti G7, IMF, dan Bank Dunia, yang sering kali lebih berpihak pada kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, Indonesia secara aktif memanfaatkan berbagai forum internasional, seperti G20, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement/NAM), untuk memperjuangkan kepentingan negara

berkembang dan memastikan bahwa mereka memiliki peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan global. Dalam G20, misalnya, Indonesia menjadi satu-satunya perwakilan utama dari Asia Tenggara, yang memungkinkan negara ini untuk membawa isu-isu penting bagi negara berkembang ke dalam diskusi ekonomi global, seperti reformasi sistem keuangan internasional, akses terhadap pembiayaan pembangunan, serta ketahanan pangan dan energi. Sementara itu, dalam OKI, Indonesia berperan dalam memperjuangkan kerjasama ekonomi dan solidaritas di antara negara-negara Islam, khususnya dalam mendukung pembangunan dan stabilitas ekonomi negara-negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Sedangkan melalui Gerakan Non-Blok (GNB), Indonesia terus mendorong prinsip kemandirian dan keadilan dalam hubungan internasional, termasuk dalam menentang ketimpangan ekonomi global yang cenderung menguntungkan negara maju. Menjadi mitra BRICS adalah langkah strategis yang sejalan dengan misi Indonesia dalam memperkuat peran negara berkembang. BRICS, yang terdiri dari ekonomi besar seperti China, India, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan, menawarkan alternatif bagi dominasi ekonomi Barat dengan mendorong kerjasama perdagangan dan keuangan yang lebih inklusif. Dengan bergabung sebagai mitra, Indonesia dapat berpartisipasi lebih aktif dalam membangun sistem ekonomi global yang lebih adil, termasuk dengan mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional, mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, serta mendapatkan akses ke pendanaan alternatif melalui NDB yang didirikan oleh BRICS.

Selain itu, kehadiran Indonesia dalam BRICS juga memungkinkan negara ini untuk memperluas jaringan kerjasama ekonomi dan diplomatik dengan negara-negara berkembang lainnya, memperkuat posisi dalam negosiasi perdagangan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan industrialisasi melalui kemitraan strategis. Dengan demikian, keterlibatan Indonesia di BRICS bukan

hanya tentang kepentingan ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi diplomasi jangka panjang untuk memastikan bahwa negara berkembang memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membentuk kebijakan global, mengurangi ketimpangan ekonomi internasional, serta menciptakan dunia yang lebih seimbang dan inklusif.

Sebagai negara dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia telah lama memainkan peran sebagai mediator dalam berbagai konflik internasional. Diplomasi Indonesia selalu berorientasi pada perdamaian, stabilitas, dan penyelesaian konflik melalui dialog, sebagaimana tercermin dalam berbagai upaya mediasi yang telah dilakukan. Salah satu contohnya adalah peran aktif Indonesia dalam mencari solusi damai bagi konflik di Myanmar, khususnya dalam merespons krisis kemanusiaan pasca kudeta militer tahun 2021⁶⁰. Sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023⁶¹, Indonesia berupaya menjembatani dialog antara junta militer dan berbagai pihak oposisi, termasuk melalui inisiatif *Five-Point Consensus* yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan dan memulai proses rekonsiliasi politik di Myanmar. Selain di Asia Tenggara, Indonesia juga secara konsisten menunjukkan kepeduliannya terhadap konflik Palestina-Israel. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia selalu mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan secara aktif mendorong solusi *two-state solution* dalam berbagai forum internasional, seperti di PBB, OKI, dan Gerakan Non-Blok (GNB). Selain memberikan dukungan diplomatik, Indonesia juga terlibat dalam berbagai inisiatif bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina serta terus mengadvokasi perlindungan hak asasi manusia di wilayah tersebut.

⁶⁰ Nabil Ihsan, "RI terus dorong dialog inklusif demi akhiri krisis politik Myanmar", *Antaranews.com*, 23 Januari 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4602822/ri-terus-dorong-dialog-inklusif-demi-akhiri-krisis-politik-myanmar>. Diakses pada 2 Februari 2025

⁶¹ Kemenko Perekonomian, "Angkat Tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth", Indonesia Resmi Menjadi Ketua ASEAN 2023", *ekon.go.id*, 13 November 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4719/angkat-tema-asean-matters-epicentrum-of-growth-indonesia-resmi-menjadi-ketua-asean-2023>. Diakses pada 2 Februari 2025

Peran Indonesia dalam mediasi konflik juga terlihat dalam berbagai isu global lainnya, termasuk konflik di Afghanistan⁶², Rusia-Ukraina⁶³, dan Laut China Selatan⁶⁴. Dalam kasus perang Rusia-Ukraina, misalnya, Indonesia berupaya memainkan peran sebagai jembatan komunikasi antara kedua pihak yang berkonflik, termasuk dengan mengusulkan solusi damai melalui jalur diplomasi saat menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali tahun 2022. Dengan menjadi mitra BRICS, Indonesia dapat memperluas perannya dalam diplomasi global dan memperkuat kapasitasnya dalam mediasi konflik internasional. BRICS yang terdiri dari negara-negara besar seperti China, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan memiliki pengaruh signifikan dalam geopolitik dunia, dan keterlibatan Indonesia dalam forum ini akan memberikan lebih banyak ruang bagi diplomasi Indonesia untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik global. Selain itu, BRICS juga menyediakan platform alternatif di luar dominasi negara-negara Barat, yang memungkinkan solusi lebih adil dan inklusif bagi negara-negara yang terlibat konflik. Sebagai negara dengan reputasi netral dan kredibilitas tinggi dalam diplomasi internasional, Indonesia dapat menggunakan posisinya di BRICS untuk mendorong pendekatan multilateral dalam penyelesaian konflik, mengurangi ketegangan geopolitik, serta memastikan bahwa solusi yang dihasilkan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan perdamaian. Dengan demikian, keterlibatan Indonesia dalam BRICS tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga memperkuat peran strategisnya dalam menjaga stabilitas dunia melalui diplomasi damai dan mediasi konflik internasional.

⁶² Nabila Anindya, "Upaya dan Kontribusi Indonesia terhadap Usaha Perdamaian di Afghanistan", *kumparan.com*, 3 Desember 2022, <https://kumparan.com/nabila-anindya-1669377270454092660/upaya-dan-kontribusi-indonesia-terhadap-usaha-perdamaian-di-afghanistan-1zMRWm8VK62/full>. Diakses pada 2 Februari 2025.

⁶³ Katriana, "Peran Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina", *Antaranews.com*, 13 Maret 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2756353/peran-indonesia-dalam-konflik-rusia-ukraina>. Diakses pada 2 Februari 2025.

⁶⁴ Luh Gde Citra Sundari Laksmi, "PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DI LAUT CINA SELATAN", 2022, hal 1, 5, 6.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam memanfaatkan *soft power* untuk memperkuat pengaruhnya di kancah internasional. *Soft power* adalah kekuatan yang diperoleh melalui daya tarik budaya, nilai-nilai, dan kebijakan yang dianggap positif oleh masyarakat internasional, bukan melalui kekuatan militer atau ekonomi. Indonesia, dengan nilai-nilai nasionalnya yang mencakup pluralisme, demokrasi, dan Islam moderat, berusaha untuk membangun citra sebagai negara Muslim yang damai, demokratis, dan inklusif. Sebagai bagian dari upaya memperkuat *soft power*, Indonesia mengusung model Islam moderat, yang mencerminkan sikap toleransi, keberagaman, dan perdamaian, sekaligus mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang berkembang di dalam negeri. Indonesia dikenal sebagai rumah bagi beragam suku, agama, dan budaya, yang menjadikan negara ini sebagai contoh nyata dari pluralisme dan toleransi. Prinsip ini, yang tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan bagian integral dari identitas nasional Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan yang bisa menyatukan berbagai elemen masyarakat untuk hidup berdampingan secara harmonis. Demokrasi Indonesia yang terus berkembang, meskipun menghadapi berbagai tantangan, tetap menjadi salah satu nilai yang dipromosikan Indonesia dalam forum internasional sebagai bukti bahwa negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim pun bisa mengembangkan sistem pemerintahan yang inklusif, transparan, dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan Islam moderat, yang memosisikan Islam sebagai agama yang mengedepankan kedamaian, toleransi, dan dialog antarumat beragama. Indonesia telah lama berperan sebagai pemimpin dalam gerakan moderasi Islam, baik di tingkat domestik maupun internasional, dengan mengedepankan ajaran Islam yang tidak ekstrim dan lebih menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi, dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan

bahwa Indonesia berperan menjadi contoh negara Muslim yang mampu selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme. Indonesia menjadi tuan rumah berbagai konferensi internasional tentang Islam moderat, serta menjadi penggerak penting dalam organisasi seperti OKI, di mana Indonesia sering kali mengusulkan solusi-solusi damai terhadap berbagai isu global yang melibatkan negara-negara Islam. Keterlibatan Indonesia dalam BRICS dapat memperkuat upaya tersebut dengan memberikan platform lebih luas untuk memperkenalkan nilai-nilai nasional yang dipegang teguh oleh negara ini. Dalam forum BRICS, Indonesia dapat mempromosikan pluralisme, demokrasi, dan Islam moderat kepada negara-negara anggota lainnya, yang sebagian besar adalah negara-negara berkembang. Ini akan meningkatkan reputasi Indonesia sebagai contoh negara Muslim yang sukses mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dan toleransi di tengah keberagaman yang luas. Melalui kolaborasi dengan negara-negara BRICS yang memiliki populasi besar dan pengaruh global, Indonesia dapat memperkenalkan model pembangunan yang inklusif, yang mengutamakan kerukunan sosial dan stabilitas politik, serta menjadi model bagi negara-negara lain di dunia Islam dalam mengelola keberagaman dan konflik. Dengan demikian, *soft power* Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai nasional seperti pluralisme, demokrasi, dan Islam moderat dapat menjadi instrumen diplomasi yang sangat efektif dalam memperkuat posisi Indonesia di arena internasional. Bergabung dengan BRICS membuka kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan dan mengedepankan nilai-nilai ini lebih luas, sekaligus meningkatkan pengaruhnya di dunia global sebagai negara yang mampu menunjukkan keharmonisan antara modernitas, agama, dan demokrasi.

3.3. Analisis Berdasarkan Perspektif *International political economy*

3.3.1. Liberalisme: BRICS sebagai Platform Integrasi Ekonomi Global

Pendekatan liberal dalam Ekonomi Politik Internasional (IPE) menitikberatkan pada peran utama pasar bebas, perdagangan global, serta kolaborasi antarnegara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan kolektif. Dalam konteks ini, BRICS berperan sebagai platform yang mendukung integrasi ekonomi global, yang menawarkan peluang bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. BRICS berpotensi membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia, termasuk komoditas utama seperti kelapa sawit, batu bara, dan produk manufaktur. Kerjasama dengan negara-negara BRICS dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global (*global value chain*). BRICS memungkinkan Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dengan meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara seperti China dan India, Indonesia dapat mengurangi risiko ekonomi yang timbul dari dinamika geopolitik Barat. Melalui New Development Bank (NDB), Indonesia dapat mengakses pendanaan alternatif untuk mendukung proyek infrastruktur yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan prinsip liberalisme yang mendorong kerjasama internasional untuk mencapai tujuan bersama. Indonesia dapat menggunakan posisinya untuk mempromosikan perdagangan bebas dalam BRICS, mengingat reputasinya sebagai negara yang mendukung multilateralisme dan kerjasama global.

3.3.2. Marxisme: Kritik terhadap Struktur Ekonomi Global

Pendekatan Marxis dalam IPE melihat struktur ekonomi global sebagai sistem yang didominasi oleh negara-negara maju, yang cenderung meminggirkan kepentingan negara-negara berkembang. BRICS, dalam perspektif ini, dapat menjadi alat bagi Indonesia untuk melawan ketidakadilan ekonomi internasional. BRICS menawarkan platform bagi negara-negara berkembang untuk bersatu dan menentang dominasi institusi keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia, yang

dianggap sering memberlakukan kebijakan yang merugikan negara-negara Selatan. Indonesia dapat memanfaatkan forum ini untuk mengekspresikan aspirasi negara berkembang dan mendukung reformasi tata kelola ekonomi global. Dengan bergabung dalam BRICS, Indonesia dapat memperkuat solidaritas dengan negara-negara berkembang lainnya untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan seimbang. Hal ini termasuk mendukung transfer teknologi, pembiayaan ramah lingkungan, dan penghapusan hambatan perdagangan yang menguntungkan negara-negara maju. BRICS dapat berfungsi sebagai alat untuk mengupayakan redistribusi kekayaan global melalui peningkatan investasi langsung, perdagangan yang lebih adil, dan penguatan kapasitas produksi di negara berkembang. Hal ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif **Liberalisme**, Indonesia dapat melihat BRICS sebagai platform untuk meningkatkan integrasi ekonomi global, membuka pasar baru, dan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara BRICS. Sementara itu, dalam perspektif **Marxisme**, Indonesia dapat memanfaatkan BRICS sebagai sarana untuk melawan ketidakadilan ekonomi global dan menciptakan tata ekonomi internasional yang lebih adil bagi negara-negara berkembang. Kedua perspektif ini menunjukkan bahwa bergabung dengan BRICS dapat memberikan manfaat strategis bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun politik, tergantung pada bagaimana Indonesia memanfaatkan peluang yang ada.

BAB IV
FAKTOR KEPENTINGAN NASIONAL PENYEBAB INDONESIA
MENJADI NEGARA MITRA BRICS

4.1. Dimensi Kepentingan Nasional

Horsman dan Marshall mengilustrasikan bahwa setiap kebijakan yang berhubungan dengan definisi dan distribusi barang publik dalam ekonomi nasional yang merupakan fungsi utama negara akan dinilai berdasarkan pasar⁶⁵. Ini mengindikasikan bahwa kepentingan nasional sering kali tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan ekonomi, yang dapat menguntungkan beberapa kelompok tetapi merugikan yang lain. Dengan demikian, mereka menunjukkan bahwa kepentingan nasional tidak bisa dipahami sebagai satu ekspresi tunggal, melainkan harus dianggap sebagai sekumpulan kepentingan yang saling bersaing dan mungkin bertentangan. Variasi dalam definisi ketertarikan ini mencerminkan kebutuhan untuk mengakui keragaman dalam masyarakat dan bagaimana pengalaman serta situasi individu dapat menghasilkan respons yang berbeda terhadap kebijakan yang sama. Pandangan Horsman dan Marshall ini menekankan bahwa kepentingan nasional adalah konsep yang kompleks dan terfragmentasi yang tidak dapat didefinisikan secara sederhana, mengingat banyaknya faktor sosial, politik, dan ekonomi yang berpengaruh dalam konteks global.

4.1.1. Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi dalam kepentingan nasional Indonesia mencakup beberapa aspek yang saling terkait, yaitu mendukung pembangunan nasional dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Tujuan utama dari dimensi ekonomi ini adalah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan

⁶⁵ Scott Burchill, “*The National Interest in International Relations Theory*”, 2005, hal 73 dan 218.

ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan terdiversifikasi, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara besar dan berkembang seperti BRICS merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tujuan ekonomi ini.

BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan memberikan peluang yang sangat berharga bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor, menarik investasi asing, serta meningkatkan kerjasama dalam sektor-sektor penting seperti teknologi, energi, dan infrastruktur. Negara-negara anggota BRICS memiliki ekonomi yang berkembang pesat dan pasar besar yang dapat menjadi tujuan ekspor Indonesia, terutama untuk produk-produk industri, komoditas, dan barang konsumsi. Misalnya, China dan India, sebagai dua ekonomi terbesar di BRICS, adalah pasar yang sangat potensial bagi produk-produk Indonesia seperti kelapa sawit, tekstil, dan produk pertanian. Dengan membangun hubungan lebih dekat dengan negara-negara ini, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global.

Diversifikasi perdagangan juga menjadi salah satu prioritas utama Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Dalam konteks ini, Indonesia berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan negara anggota Uni Eropa, dengan meningkatkan perdagangan dengan negara-negara BRICS dan kawasan Asia lainnya. Indonesia dapat memperluas ekspor barang-barang seperti produk elektronik dan otomotif ke India dan China, yang merupakan dua pasar terbesar di dunia. Dengan memperluas pasar ekspor, Indonesia tidak hanya dapat memperbesar basis ekonomi, tetapi juga mengurangi kerentanannya terhadap fluktuasi ekonomi global yang mungkin terjadi di negara-negara maju.

Indonesia juga memprioritaskan pengembangan ekonomi digital sebagai langkah untuk memperkuat daya saing di era

globalisasi dan digitalisasi yang cepat. Negara-negara anggota BRICS, terutama China dan India, memiliki perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan kerjasama dengan negara-negara tersebut dapat membantu Indonesia dalam mengadopsi teknologi baru serta memperkuat infrastruktur digital domestik. Sebagai contoh, kerjasama dengan China dalam bidang 5G dan *Internet of Things* (IoT)⁶⁶ dapat membantu Indonesia mempercepat pengembangan *smart cities* dan ekonomi digital, yang menjadi kunci dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas.

Smart City merupakan konsep pengembangan perkotaan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) guna meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat⁶⁷. Konsep ini bertujuan untuk mewujudkan kota yang lebih nyaman, modern, berkelanjutan, dan memiliki daya saing ekonomi yang tinggi. Indonesia sedang dalam pembangunan Jakarta Smart City yang menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dari China untuk mendukung pengembangan inisiatif kota pintar di Indonesia. Salah satu wujud kerja sama ini terlihat dalam penyelenggaraan *Indonesia-China Smart City Technology & Investment Expo 2023*, yang berlangsung pada 24-26 Mei 2023 di Jakarta. Acara ini bertujuan untuk mendorong kemajuan teknologi dan investasi dalam proyek smart city di Indonesia serta memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, menegaskan pentingnya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan China yang memiliki teknologi canggih guna mempercepat realisasi proyek smart city di Indonesia. Dalam expo tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU)

⁶⁶ BAKTI Kominfo, "Menkominfo Sambut Baik Kerja Sama RI-China di Sektor Digital", *cnnindonesia.com*, 23 November 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231123164440-218-1028153/menkominfo-sambut-baik-kerja-sama-ri-china-di-sektor-digital>. Diakses pada 2 Februari 2025.

⁶⁷ Gavin Wright, "What is a Smart City", *techtarget.com*, Maret 2025, <https://www.techtarget.com/iotagenda/definition/smart-city>. Diakses pada 17 Maret 2025.

untuk berbagai proyek, termasuk pelatihan ekonomi digital dan pengembangan teknologi⁶⁸.

Indonesia juga tengah mengalami transformasi industri, dimana sektor-sektor manufaktur dan teknologi diharapkan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. BRICS dapat menjadi mitra strategis untuk mendorong transformasi industri Indonesia, dengan menawarkan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan berinvestasi di sektor-sektor industri baru, seperti industri hijau, energi terbarukan, dan industri otomotif listrik. Rusia dan Brasil, dapat menjadi mitra dalam pengembangan energi terbarukan dan industri otomotif, yang akan memperkuat sektor manufaktur Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Ketika Indonesia membutuhkan investasi besar dalam proyek infrastruktur besar, seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang membutuhkan pendanaan besar untuk memastikan keberlanjutan dan kecepatan proyek. Dalam hal ini, BRICS, melalui NDB, dapat berperan dalam menyediakan pendanaan yang fleksibel dan mendukung terwujudnya proyek tersebut dengan suku bunga yang lebih rendah dan syarat yang lebih ringan dibandingkan dengan lembaga keuangan Barat, yang biasanya memberikan persyaratan yang lebih ketat.

Bergabung dengan BRICS memberi Indonesia berbagai keuntungan ekonomi strategis yang sangat relevan untuk memperkuat daya saing di tingkat global. Melalui kerjasama perdagangan, investasi asing, pendanaan proyek melalui NDB, dan pengembangan teknologi, Indonesia dapat mempercepat transformasi ekonominya serta menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan diversifikasi perdagangan, pengembangan ekonomi digital, dan transformasi industri, Indonesia akan lebih siap menghadapi

⁶⁸ Ade Irma Junida, "Indonesia-China *Smart City* 2023 dukung pengembangan kota pintar RI", *techtarjet.com*, 22 Mei 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3550044/indonesia-china-smart-city-2023-dukung-pengembangan-kota-pintar-ri>. Diakses pada 17 Maret 2025.

tantangan globalisasi dan memperkuat posisinya dalam peta ekonomi dunia.

4.1.2. Dimensi Politik

Dimensi politik dalam kepentingan nasional Indonesia berfokus pada penguatan peran dan pengaruh Indonesia dalam sistem internasional, baik di tingkat regional maupun global. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara⁶⁹ dan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia⁷⁰, Indonesia memiliki kepentingan untuk memperkuat posisinya dalam pengambilan keputusan global. Organisasi seperti PBB, IMF, dan WTO masih didominasi oleh negara-negara maju, sehingga terdapat kebutuhan untuk reformasi tata kelola global agar lebih inklusif dan adil bagi negara berkembang. BRICS, sebagai blok ekonomi yang terdiri dari negara-negara besar di Global South, menawarkan platform penting bagi Indonesia untuk mendorong perubahan dalam struktur kekuasaan internasional, sehingga tidak hanya berpusat pada negara-negara Barat.

Lembaga seperti IMF dan WTO masih menerapkan kebijakan yang sering kali lebih menguntungkan negara maju. Misalnya, kebijakan penentuan kuota suara dalam IMF didasarkan pada besarnya kontribusi keuangan suatu negara⁷¹, yang menyebabkan negara-negara berkembang memiliki pengaruh yang terbatas dalam pengambilan keputusan. BRICS telah membentuk NDB sebagai alternatif bagi negara berkembang untuk mengakses pendanaan tanpa harus bergantung pada IMF atau Bank Dunia, yang sering kali memberlakukan syarat ketat yang dapat membatasi

⁶⁹ Raden Jihad Akbar, “Ekonomi RI Terbesar di Asia Tenggara, Ekonom: Sangat Lumrah”, *viva.co.id*, 16 Maret 2024, <https://www.viva.co.id/bisnis/1696823-ekonomi-ri-terbesar-di-asia-tenggara-ekonom-sangat-lumrah>. Diakses pada 5 Februari 2025.

⁷⁰ Fahri Zulfikar, “10 Negara Demokrasi Terbesar di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?”, *detik.com*, 17 februari 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7198230/10-negara-demokrasi-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-berapa>. Diakses pada 5 Februari 2025.

⁷¹ IMF, “*IMF QUOTAS*”, *imf.org*, <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2022/IMF-Quotas>. Diakses pada 5 Februari 2025

kedaulatan ekonomi suatu negara. Dengan menjadi mitra BRICS, Indonesia dapat lebih leluasa dalam mengembangkan kebijakan ekonominya tanpa terlalu bergantung pada sistem keuangan Barat.

Kemitraan dengan BRICS juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam diplomasi internasional. Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip perdamaian, keadilan, dan kerjasama internasional, yang sejalan dengan kebijakan luar negeri bebas aktif. Sebagai contoh, dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, Indonesia tetap berpegang pada prinsip non-blok dan dialog damai, seperti yang ditunjukkan dalam diplomasi Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Kyiv dan Moskow pada tahun 2022⁷². Dengan bergabung sebagai mitra BRICS, Indonesia dapat lebih aktif dalam menengahi konflik internasional dan memperkuat perannya sebagai mediator global.

Selain itu, dalam konteks politik regional, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas Asia Tenggara dan mencegah dominasi kekuatan besar dalam kawasan. Persaingan antara Amerika Serikat dan China di Indo-Pasifik semakin meningkat, dan Indonesia berupaya untuk menjaga keseimbangan dengan tidak memihak salah satu blok secara langsung. Dengan menjadi bagian dari BRICS, Indonesia dapat memperkuat diplomasi regionalnya melalui ASEAN, serta memastikan bahwa kawasan tetap menjadi zona damai dan netral, sesuai dengan inisiatif *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* (ZOPFAN) yang telah lama didorong oleh Indonesia dan ASEAN.

Dimensi politik dalam kepentingan nasional Indonesia berfokus pada penguatan peran dalam sistem internasional, reformasi tata kelola global, serta promosi nilai-nilai Pancasila dalam diplomasi global. Dengan menjadi mitra BRICS, Indonesia dapat memperkuat pengaruhnya dalam organisasi multilateral seperti PBB,

⁷² Dinda Tulus Tiara, "Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia - Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power", Januari 2023, hal 6-11.

IMF, dan WTO, serta memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam struktur ekonomi dan politik global. Selain itu, kemitraan dengan BRICS juga mendukung kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia, memperkuat peran sebagai mediator konflik internasional, serta menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Melalui keterlibatan dalam BRICS, Indonesia dapat semakin memantapkan posisinya sebagai kekuatan regional yang memiliki pengaruh signifikan dalam geopolitik global.

4.2. Motivasi Strategi Mencapai Kepentingan Nasional

Indonesia dapat memanfaatkan kemitraannya bersama BRICS dengan menerapkan strategi diversifikasi mitra dagang, akses pembiayaan infrastruktur, serta peningkatan peran dalam ekonomi global. Dalam perspektif Hosman dan Marshall, strategi ini bertujuan untuk memperluas peluang ekonomi sekaligus mempertahankan fleksibilitas geopolitik. Diversifikasi mitra dagang memungkinkan Indonesia mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan negara anggota Uni Eropa, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Selain itu, BRICS menawarkan akses pembiayaan infrastruktur melalui lembaga seperti NDB, yang dapat membantu percepatan pembangunan di sektor transportasi, energi, dan digital. Di sisi lain, peluang investasi dari negara-negara BRICS dapat dimanfaatkan untuk mendukung industri strategis dan sektor manufaktur guna meningkatkan daya saing global. Kemitraan ini juga memberikan Indonesia posisi yang lebih kuat dalam ekonomi global, memperkuat daya tawar dalam negosiasi perdagangan dan kebijakan moneter internasional. Dalam konteks domestik, kepentingan yang beragam dalam masyarakat harus diakomodasi dengan kebijakan ekonomi yang inklusif agar manfaat dari kerjasama ini dapat dirasakan secara luas. Identitas nasional dan diplomasi berperan penting dalam membangun citra sebagai negara yang mendukung kerjasama multilateral, sekaligus mempertahankan kemandiriannya dalam menetapkan kebijakan luar negeri. Dengan pendekatan

strategis ini, Indonesia dapat memaksimalkan kepentingan nasionalnya melalui kemitraan dengan BRICS.

4.2.1. Diversifikasi Mitra Dagang

Diversifikasi mitra dagang merupakan strategi penting bagi Indonesia dalam mengurangi ketergantungan ekonomi pada negara-negara Barat dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam era globalisasi yang penuh dinamika geopolitik, ketergantungan berlebihan pada satu atau dua negara mitra dagang dapat meningkatkan risiko ekonomi, terutama saat terjadi konflik perdagangan, sanksi ekonomi, atau perlambatan ekonomi di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperluas jaringan perdagangan dengan berbagai negara, termasuk dengan negara-negara BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang merupakan kelompok ekonomi besar yang mewakili pasar negara berkembang dengan populasi yang sangat besar serta potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Contoh nyata dari risiko ketergantungan ekonomi adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang dimulai pada 2018⁷³. Ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia ini menyebabkan gangguan rantai pasok global dan berdampak pada ekonomi negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor ke salah satu pihak. Indonesia, sebagai negara yang memiliki hubungan dagang yang kuat dengan China dan Amerika Serikat, merasakan dampak dari ketidakpastian ekonomi akibat perang tarif antara kedua negara tersebut. Dengan memperluas perdagangan ke negara anggota BRICS lainnya, seperti India, Brasil, dan Rusia, Indonesia dapat mengurangi dampak dari fluktuasi ekonomi global dan memperkuat daya saingnya di berbagai sektor.

⁷³ Muhammad Reza Ilham Taufani, "Membongkar Perang Dagang AS Vs China & Upaya Dedolarisasi", *cncindonesia.com*, 23 April 2023, <https://www.cncindonesia.com/research/20230421165302-128-431640/membongkar-perang-dagang-as-vs-china-upaya-dedolarisasi>. Diakses pada 10 Februari 2025.

BRICS menawarkan peluang besar bagi Indonesia, terutama dalam penjualan CPO, batubara, produk manufaktur, dan hasil pertanian lainnya. China dan India, misalnya, adalah dua konsumen minyak kelapa sawit terbesar di dunia⁷⁴, dan keduanya memiliki permintaan yang terus meningkat untuk produk tersebut. Dengan mempererat hubungan perdagangan dengan India, Indonesia dapat mengurangi risiko yang muncul akibat kebijakan proteksionisme dari negara-negara Barat, seperti kampanye anti-sawit di Uni Eropa yang membatasi impor minyak kelapa sawit Indonesia dengan alasan keberlanjutan lingkungan.

Sektor batu bara juga menjadi contoh penting dalam konteks diversifikasi perdagangan. Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia⁷⁵, dan China serta India adalah dua pasar utama yang sangat bergantung pada impor batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi domestik mereka⁷⁶. Pada tahun 2021, ketika China mengalami krisis energi akibat keterbatasan pasokan batu bara, Indonesia menjadi pemasok utama untuk membantu memenuhi permintaan listrik di negara tersebut⁷⁷. Dengan menjalin kerjasama yang lebih erat dengan BRICS, Indonesia dapat mengamankan pasar ekspor batu bara di tengah ketidakpastian kebijakan energi global, terutama di saat beberapa negara Barat mulai mengurangi penggunaan batu bara dalam upaya transisi energi.

Kerjasama dengan BRICS juga membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan sektor manufaktur dan ekspor produk

⁷⁴ Kementerian Perdagangan, “Analisis Kinerja Perdagangan Kelapa Sawit”, 2024, hal 62.

⁷⁵ Kementerian ESDM, “Batubara Indonesia: Pilar Utama Energi di Era Transisi Energi dan Hilirisasi Menuju Kemandirian Bangsa”, *esdm.go.id*, 3 Oktober 2024, <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20241003-batubara-indonesia-pilar-utama-energi-di-era-transisi-energi-dan-hilirisasi-menuju-kemandirian-bangsa>. Diakses pada 10 Februari 2025.

⁷⁶ Muhammad Reza Ilham Taufani, “China, Rusia & India Ramai-Ramai Dongkrak Harga Batu Bara”, *cnbcindonesia.com*, 23 November 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231123014424-128-491249/china-rusia-india-ramai-ramai-dongkrak-harga-batu-bara>. Diakses pada 10 Februari 2025.

⁷⁷ Reuters, “Krisis Energi China Picu Lonjakan Permintaan Batu Bara”, *voaindonesia.com*, 28 September 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/krisis-energi-china-picu-lonjakan-permintaan-batu-bara-/6248455.html>. Diakses pada 10 Februari 2025.

bernilai tambah. Misalnya, Brasil merupakan pasar potensial untuk produk-produk otomotif dan industri makanan olahan dari Indonesia. Rusia, di sisi lain, memiliki permintaan tinggi untuk produk perikanan dan agrikultur, yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke pasar non-tradisional. Dengan menjalin kemitraan ekonomi yang lebih erat dengan negara-negara BRICS, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar Barat serta memperkuat daya saing produk nasional di pasar global.

Selain manfaat perdagangan, diversifikasi mitra ekonomi juga memberikan akses kepada Indonesia untuk mengembangkan teknologi baru dan kerjasama industri. Negara-negara BRICS, terutama China dan India, memiliki keunggulan dalam pengembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan manufaktur canggih. Melalui kerjasama teknologi, Indonesia dapat mempelajari model pembangunan industri yang sukses, menarik investasi dalam sektor teknologi tinggi, dan mempercepat transformasi ekonomi digital. Misalnya, kerjasama dengan China dalam pengembangan infrastruktur 5G dan kecerdasan buatan dapat membantu Indonesia dalam mempercepat digitalisasi ekonomi, yang merupakan bagian dari visi Indonesia untuk menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2045.

Diversifikasi mitra dagang merupakan langkah strategis bagi Indonesia dalam mengurangi risiko ekonomi akibat ketergantungan pada negara-negara Barat, serta memperluas peluang perdagangan di pasar global. Dengan menjalin kerjasama ekonomi yang lebih erat dengan negara-negara BRICS, Indonesia dapat mengamankan pasar ekspor untuk komoditas unggulannya, memperkuat industri manufaktur, dan mendapatkan akses ke teknologi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks geopolitik yang semakin dinamis, BRICS menjadi mitra penting bagi Indonesia dalam membangun ekonomi yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan, menjadikannya alasan yang kuat bagi Indonesia untuk memperdalam hubungan sebagai mitra BRICS.

4.2.2. Akses Pembiayaan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional Indonesia, terutama dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat transformasi ekonomi, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai, seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi, menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing ekonomi dan menarik investasi. Namun, proyek-proyek infrastruktur skala besar membutuhkan pembiayaan yang sangat besar, sementara kapasitas anggaran pemerintah dan sumber pendanaan konvensional seringkali memiliki keterbatasan. Dalam hal ini, kerjasama dengan NDB milik BRICS memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengakses alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan kompetitif dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional seperti IMF dan Bank Dunia.

Salah satu keuntungan utama dari pendanaan NDB adalah syarat dan ketentuan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pinjaman dari Bank Dunia atau IMF, yang sering kali disertai dengan persyaratan kebijakan ekonomi tertentu yang dapat membatasi kedaulatan ekonomi negara peminjam. NDB, yang didirikan oleh BRICS untuk menyediakan pendanaan bagi proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang, berfokus pada pinjaman yang bersifat inklusif dan tidak mengikat kebijakan ekonomi negara penerima bantuan⁷⁸. Ini sangat penting bagi Indonesia, yang membutuhkan pembiayaan infrastruktur tanpa harus menghadapi intervensi kebijakan ekonomi dari pihak eksternal.

Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap pengurangan emisi karbon dan telah menargetkan *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060. Namun, transisi ke energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan membutuhkan investasi besar. Sebagai contoh, proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta dan pembangunan *Light Rail*

⁷⁸ NDB, "About NDB", *ndb.int*, <https://www.ndb.int/about-ndb/>. Diakses pada 10 Februari 2025.

Transit (LRT) di berbagai kota adalah langkah penting dalam mengurangi ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil serta mengurangi kemacetan dan polusi udara. Pendanaan dari NDB dapat menjadi solusi bagi Indonesia dalam mengembangkan lebih banyak sistem transportasi publik yang ramah lingkungan, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pembiayaan dari negara-negara Barat.

Selain transportasi hijau, sektor energi terbarukan juga menjadi fokus utama dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Pemerintah telah merencanakan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), tenaga angin, dan tenaga hidro⁷⁹. Namun, transisi energi ini membutuhkan investasi besar dalam teknologi dan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan jaringan listrik pintar (*smart grid*) dan penyimpanan energi. Dalam hal ini, NDB dapat menjadi mitra strategis yang dapat memberikan dukungan finansial bagi proyek-proyek energi bersih, sejalan dengan komitmen BRICS terhadap pembangunan berkelanjutan.

Sektor konektivitas digital, bersama dengan energi terbarukan dan transportasi, menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Dengan semakin pesatnya transformasi digital, kebutuhan akan jaringan internet berkecepatan tinggi dan infrastruktur teknologi informasi yang andal semakin meningkat. Indonesia telah meluncurkan berbagai proyek untuk memperluas akses internet ke daerah terpencil, termasuk pembangunan satelit multifungsi SATRIA-1⁸⁰ yang bertujuan untuk menyediakan internet bagi sekolah, fasilitas kesehatan, dan desa-desa terpencil. Pendanaan dari NDB dapat membantu mempercepat digitalisasi di Indonesia, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat

⁷⁹ Kementerian ESDM, “Pemerintah Optimistis EBT 23% Tahun 2025 Tercapai”, *esdm.go.id*, 27 Juli 2021, <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/pemerintah-optimistis-ebt-23-tahun-2025-tercapai>. Diakses pada 11 Februari 2025.

⁸⁰ Benny Eko Supriyanto, “Peran APBN untuk Pengembangan Infrastruktur Digital di Daerah Terpencil”, *djpb.kemenkeu.go.id*, 29 Juli 2024, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3669-peran-apbn-untuk-pengembangan-insfrastruktur-digital-di-daerah-terpencil.html>. Diakses pada 11 Februari 2025

dapat mengakses layanan digital yang berkualitas, serta meningkatkan daya saing ekonomi digital Indonesia di tingkat global.

Pembangunan infrastruktur yang masif membutuhkan pendanaan yang fleksibel dan kompetitif, yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. NDB milik BRICS menawarkan alternatif pendanaan yang lebih adil dan tidak bersyarat, sehingga memberikan Indonesia keleluasaan dalam menentukan kebijakannya sendiri. Dengan memanfaatkan pendanaan dari NDB, Indonesia dapat mempercepat pembangunan infrastruktur hijau, transportasi berkelanjutan, energi terbarukan, dan konektivitas digital, yang semuanya merupakan pilar penting dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kemitraan dengan BRICS menjadi langkah strategis bagi Indonesia untuk memastikan akses terhadap sumber pendanaan yang lebih beragam, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

4.2.3. Peluang Investasi

Kerjasama dengan negara-negara BRICS membuka peluang besar bagi Indonesia dalam menarik investasi langsung asing (FDI) di sektor-sektor strategis yang membutuhkan modal besar dan teknologi canggih. Sebagai negara berkembang dengan ekonomi yang terus tumbuh, Indonesia memerlukan arus investasi yang stabil untuk mempercepat industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan transfer teknologi. Negara-negara BRICS, yang memiliki ekonomi kuat dan industri maju, dapat menjadi mitra utama dalam mendukung berbagai proyek investasi di Indonesia, terutama di sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan, ekonomi digital, kecerdasan buatan, serta sektor manufaktur berorientasi ekspor.

Salah satu sektor yang menjadi prioritas dalam investasi asing adalah transisi energi dan pengembangan energi terbarukan. Indonesia

telah menargetkan *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060, yang berarti bahwa penggunaan energi berbasis fosil harus dikurangi secara signifikan. Namun, transisi ini membutuhkan investasi besar dalam teknologi energi hijau, seperti tenaga surya, tenaga angin, dan infrastruktur penyimpanan energi (baterai listrik). Dalam hal ini, negara-negara BRICS, terutama China dan India, telah memiliki pengalaman luas dalam mengembangkan industri energi terbarukan dan dapat menjadi mitra utama bagi Indonesia. Sebagai contoh, China telah menjadi pemimpin global dalam produksi panel surya dan baterai litium⁸¹, yang merupakan komponen utama dalam pengembangan energi hijau. Investasi dari perusahaan-perusahaan China, seperti BYD dan CATL (*Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.*), dapat membantu Indonesia dalam membangun pabrik baterai kendaraan listrik (EV) dan panel surya untuk mempercepat transisi energi.

Pengembangan ekonomi digital dan infrastruktur teknologi canggih juga menjadi bidang investasi yang sangat penting bagi Indonesia. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 200 juta pengguna internet dan ekonomi digital yang berkembang pesat. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, Indonesia membutuhkan infrastruktur teknologi yang lebih kuat, termasuk jaringan 5G, kecerdasan buatan (AI), dan pusat data skala besar. Dalam konteks ini, kerjasama dengan BRICS dapat menjadi katalis bagi percepatan transformasi digital Indonesia.

Sebagai contoh, perusahaan teknologi China seperti Huawei dan ZTE telah berkontribusi dalam pengembangan jaringan telekomunikasi Indonesia, termasuk dalam persiapan peluncuran jaringan 5G. Sementara itu, India, yang dikenal sebagai pusat pengembangan perangkat lunak dan kecerdasan buatan, dapat menjadi mitra dalam mendukung pengembangan startup teknologi dan pelatihan tenaga kerja

⁸¹ hmenerg, "Rahasia di Balik Keberhasilan China Menjadi Raja Energi Surya Dunia", *hmenergi.com*, 23 September 2024, <https://www.hmenergi.com/rahasia-di-balik-keberhasilan-china-menjadi-raja-energi-surya-dunia/>. Diakses pada 11 Februari 2025.

digital di Indonesia. Investasi dari perusahaan India dalam bidang pengolahan data, fintech, dan e-commerce dapat mempercepat pertumbuhan ekosistem digital Indonesia serta meningkatkan daya saingnya di pasar global.

Sektor manufaktur dan industri berorientasi ekspor, kerjasama dengan BRICS juga menawarkan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor dan mempercepat industrialisasi. Selama ini, Indonesia masih banyak mengekspor bahan mentah seperti nikel, batu bara, dan minyak sawit, yang memiliki nilai tambah rendah. Namun, dengan adanya investasi dari negara-negara BRICS, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas industri hilir dan manufaktur berteknologi tinggi⁸². Investasi dari Rusia dan China dalam pengolahan nikel telah membantu Indonesia dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik (EV)⁸³. Rusia, sebagai salah satu produsen utama teknologi industri berat, dapat menjadi mitra strategis dalam pembangunan pabrik smelter dan industri berbasis logam lainnya. Selain itu, India, yang memiliki industri farmasi dan tekstil yang maju, dapat berinvestasi dalam pengolahan produk medis dan tekstil di Indonesia, sehingga meningkatkan ekspor produk jadi dibandingkan hanya mengirim bahan baku ke luar negeri.

Dengan meningkatnya investasi dari anggota BRICS di berbagai sektor strategis, Indonesia dapat mempercepat industrialisasi, menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi, serta meningkatkan transfer teknologi. Ini akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang, termasuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan ketahanan energi, dan mempercepat transformasi digital. Oleh karena itu, kerjasama dengan BRICS tidak hanya memberikan akses terhadap modal dan teknologi, tetapi juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat manufaktur dan inovasi di

⁸² M Roehman Zainur Riedho, “Strategi Tiongkok dalam Memanfaatkan Momentum Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Pemerintah Indonesia”, hal 5-17

⁸³ hmenerg, “Rahasia di Balik Keberhasilan China Menjadi Raja Energi Surya Dunia”, *hmenergi.com*, 23 September 2024, <https://www.hmenergi.com/rahasia-di-balik-keberhasilan-china-menjadi-raja-energi-surya-dunia>. Diakses pada 12 Februari 2025.

kawasan Asia-Pasifik, menjadikannya alasan kuat untuk memperdalam hubungan sebagai mitra BRICS.

4.2.4. Peran dalam Ekonomi Global

Motivasi Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dapat dijelaskan berdasarkan konsep kepentingan nasional menurut Horman dan Marshall, yang menekankan bahwa suatu negara akan mengambil kebijakan luar negeri berdasarkan tujuan utama untuk melindungi dan memperkuat kepentingannya di bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Dalam konteks ekonomi global, Indonesia melihat BRICS sebagai aliansi strategis yang dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan posisi tawarnya di dunia internasional, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap lembaga keuangan dan ekonomi yang didominasi oleh negara-negara Barat seperti IMF dan Bank Dunia. BRICS sendiri merupakan kelompok negara berkembang dengan ekonomi yang terus tumbuh, terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang bersama-sama memiliki pengaruh signifikan dalam perdagangan global, cadangan sumber daya, serta kebijakan moneter dunia.

Dari sudut pandang ekonomi, Indonesia berfokus pada perluasan akses pasar bagi produk eksportnya, menarik lebih banyak investasi asing, serta memperkuat stabilitas keuangan domestik dengan mendiversifikasi kemitraan ekonomi. Salah satu contoh konkret adalah bagaimana Indonesia dapat memperluas ekspor komoditas unggulannya seperti kelapa sawit, batu bara, dan nikel ke negara-negara BRICS. China dan India, sebagai anggota utama BRICS, merupakan importir terbesar kelapa sawit Indonesia, sehingga kemitraan dalam BRICS dapat memberikan peluang untuk memperkuat perjanjian perdagangan yang lebih menguntungkan, mengurangi hambatan tarif, serta membuka jalur investasi di sektor hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Selain itu, Indonesia juga dapat memanfaatkan hubungan dengan Rusia dalam sektor energi, khususnya dalam impor minyak dan gas dengan

harga yang lebih kompetitif dibandingkan harga pasar global yang sering kali dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Barat.

Indonesia ingin mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat di sektor keuangan dengan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional. BRICS telah menginisiasi penggunaan mata uang lokal dan memperkuat peran NDB sebagai alternatif pembiayaan global yang lebih fleksibel dibandingkan Bank Dunia atau IMF, yang sering kali memberikan pinjaman dengan syarat yang ketat. Dengan bergabung ke BRICS, Indonesia bisa mendapatkan akses ke sumber pendanaan alternatif ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional, seperti proyek energi hijau, transportasi, dan digitalisasi industri.

Indonesia juga memiliki pertimbangan politik dan strategis dalam bergabung dengan BRICS. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki visi untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam menentukan arah kebijakan global, termasuk dalam reformasi tata kelola ekonomi dunia yang lebih adil bagi negara-negara berkembang. BRICS sering kali mengkritik dominasi negara-negara Barat dalam pengambilan keputusan ekonomi global dan mendorong sistem multipolar yang lebih inklusif. Kemitraan Indonesia dalam BRICS akan memperkuat posisinya sebagai pemimpin di kawasan Asia Tenggara dan menjadikannya sebagai jembatan antara negara-negara berkembang dengan ekonomi besar dunia.

Indonesia telah mulai menerapkan strategi diversifikasi ekonomi dan perdagangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara Barat. Salah satu langkah nyata yang sejalan dengan visi BRICS adalah kebijakan Indonesia dalam membatasi ekspor bahan mentah dan mendorong hilirisasi industri. Keputusan pemerintah untuk menghentikan ekspor bijih nikel pada tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri dan menarik investasi dalam pembangunan smelter. Kebijakan ini berhasil menarik minat investor dari China, yang merupakan anggota BRICS, untuk berinvestasi dalam

industri pemurnian nikel dan baterai kendaraan listrik di Indonesia. Dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS, potensi investasi seperti ini bisa semakin meningkat, terutama di sektor industri strategis yang dapat mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Selain itu, dalam sektor ketahanan pangan, Indonesia dapat memperkuat kerjasama dengan Brasil sebagai salah satu negara produsen komoditas pangan terbesar di dunia. Dengan meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap impor gandum dan kedelai, kemitraan dengan Brasil dapat menjadi alternatif yang lebih stabil dibandingkan dengan pasar Eropa atau Amerika Serikat yang sering kali dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan kebijakan perdagangan proteksionis. Kesimpulannya, motivasi utama Indonesia untuk bergabung dengan BRICS berakar pada upayanya untuk memperkuat kepentingan nasional sesuai dengan konsep Horsman dan Marshall, yakni melalui peningkatan akses pasar, diversifikasi sumber pendanaan, penguatan stabilitas ekonomi domestik, serta peningkatan pengaruh politik di arena global. Dengan memanfaatkan kemitraan dalam BRICS, Indonesia tidak hanya dapat memperkuat posisi ekonominya tetapi juga meningkatkan daya saing globalnya dalam menghadapi dinamika ekonomi dan geopolitik dunia yang terus berkembang.

4.2.5. Kepentingan yang Beragam dalam Masyarakat

Kepentingan nasional Indonesia dalam bergabung dengan BRICS tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga merupakan hasil dari dinamika berbagai kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan oleh Horsman dan Marshall, kepentingan nasional tidak dapat dipahami sebagai satu entitas tunggal, melainkan sebagai kumpulan kepentingan beragam yang berasal dari berbagai sektor. Dalam konteks Indonesia, keterlibatan dalam BRICS membawa manfaat bagi berbagai kelompok,

termasuk pelaku bisnis, aktor politik, dan masyarakat sipil yang memiliki perspektif dan tujuan yang berbeda. Dari sisi bisnis, sektor-sektor seperti pertambangan, energi, dan agribisnis melihat kemitraan dalam BRICS sebagai peluang untuk memperluas akses ke pasar yang lebih besar dan lebih fleksibel. Misalnya, perusahaan tambang nikel di Indonesia dapat meningkatkan ekspor ke China, yang merupakan salah satu konsumen terbesar mineral tersebut untuk produksi baterai kendaraan listrik. Dengan kerjasama di dalam BRICS, Indonesia bisa menegosiasikan perjanjian perdagangan yang lebih menguntungkan tanpa hambatan tarif yang terlalu besar seperti yang sering diberlakukan oleh negara-negara Barat. Selain itu, industri kelapa sawit Indonesia juga dapat memperoleh pasar baru di Brasil dan India, yang membutuhkan minyak sawit untuk industri pangan dan kosmetik, di tengah tekanan dari Uni Eropa yang menerapkan kebijakan pembatasan impor dengan alasan keberlanjutan lingkungan.

Dari perspektif politik, kemitraan Indonesia dalam BRICS juga didukung oleh kelompok-kelompok yang melihatnya sebagai cara untuk memperkuat posisi Indonesia dalam sistem politik global yang semakin multipolar. Dengan bergabung dalam BRICS, Indonesia tidak hanya mengandalkan hubungan dengan negara-negara Barat, tetapi juga memperluas diplomasi ekonominya ke negara-negara berkembang besar lainnya. Ini sesuai dengan strategi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, di mana negara ini tidak ingin terlalu bergantung pada satu blok kekuatan tertentu. Selain itu, dengan adanya NDB yang dimiliki oleh BRICS, Indonesia dapat memperoleh akses pembiayaan proyek-proyek infrastruktur tanpa harus bergantung pada pinjaman dari lembaga keuangan Barat seperti IMF atau Bank Dunia, yang seringkali memiliki persyaratan kebijakan ekonomi tertentu.

Di sisi sosial, berbagai kelompok masyarakat juga melihat BRICS sebagai platform untuk bekerjasama dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Kelompok aktivis lingkungan, misalnya, dapat memanfaatkan forum ini untuk mendorong

kerjasama dalam pengelolaan hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan investasi dalam energi terbarukan. Misalnya, Indonesia dan Brasil, yang memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia, dapat bekerjasama dalam program konservasi yang didukung oleh pendanaan dari NDB. Selain itu, negara-negara BRICS juga dapat berkolaborasi dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan, seperti energi surya dan kendaraan listrik, yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia. Dengan demikian, bergabung dengan BRICS bukan hanya soal kepentingan ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan keberagaman kepentingan dalam masyarakat Indonesia yang mencakup aspek bisnis, politik, dan sosial.

4.2.6. Identitas dan Diplomasi

Kemitraan Indonesia dalam BRICS bukan hanya tentang aspek ekonomi dan politik, tetapi juga berkaitan dengan identitas nasional serta bagaimana Indonesia memposisikan dirinya di panggung internasional. Identitas nasional dalam diplomasi berperan penting dalam menentukan kebijakan luar negeri dan arah kerjasama internasional suatu negara. Dalam konteks ini, bergabung dengan BRICS dapat dilihat sebagai langkah strategis Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan menengah (*middle power*) yang memiliki pengaruh dalam dinamika global dan regional. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa suaranya didengar dalam forum internasional, terutama dalam menghadapi tatanan global yang selama ini didominasi oleh negara-negara maju. Dengan menjadi bagian dari BRICS, Indonesia dapat menunjukkan bahwa ia tidak hanya menjadi pengikut dalam sistem internasional, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk arsitektur ekonomi dan politik global yang lebih adil bagi negara-negara berkembang.

Dalam konteks diplomasi, kemitraan dalam BRICS memungkinkan Indonesia untuk memperluas jaringannya di luar

hubungan tradisional dengan negara-negara Barat dan negara anggota ASEAN. Indonesia selama ini dikenal dengan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, di mana negara ini tidak ingin terjebak dalam blok-blok kekuatan besar, melainkan mencari keseimbangan dalam hubungan internasionalnya. Dengan bergabung dalam BRICS, Indonesia dapat meningkatkan kerjasama strategis dengan negara-negara seperti China, India, Brasil, Rusia dan Afrika Selatan dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, serta inovasi teknologi. Salah satu contoh konkret adalah kerjasama Indonesia dengan China dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung⁸⁴, yang menunjukkan bagaimana Indonesia memanfaatkan kemitraan dengan anggota BRICS untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Selain itu, dalam diplomasi multilateral, Indonesia juga dapat memanfaatkan BRICS untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam isu-isu seperti perubahan iklim, reformasi sistem keuangan global, dan ketahanan pangan. Indonesia dapat bekerjasama dengan Brasil dalam mengatasi deforestasi dan perlindungan hutan hujan, yang merupakan aset penting bagi keseimbangan ekosistem global⁸⁵. Dalam hal keamanan energi, Indonesia juga dapat berkolaborasi dengan Rusia dalam pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai, yang dapat menjadi bagian dari strategi diversifikasi energi nasional.

Lebih jauh lagi, kemitraan dalam BRICS juga memberikan Indonesia platform untuk memperkuat citranya sebagai pemimpin di antara negara-negara berkembang. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi yang terus berkembang, Indonesia dapat memainkan peran sebagai jembatan antara negara-negara berkembang di Asia Tenggara dengan kekuatan-kekuatan

⁸⁴ M. Hilal Eka Saputra Harahap, "Mengenal kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh", *Antaraneews.com*, 23 Juli 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4211031/mengenal-kereta-cepat-jakarta-bandung-whoosh>. Diakses pada 12 Februari 2025.

⁸⁵ Tia Puspa, "Indonesia Kerjasama Deforestasi Bersama Brasil Dan Kongo", *rri.co.id*, 30 November 2023, <https://www.rri.co.id/bisnis/465001/indonesia-kerjasama-deforestasi-bersama-brasil-dan-kongo>. Diakses pada 12 Februari 2025.

ekonomi besar di BRICS. Dengan demikian, langkah Indonesia untuk bergabung dalam BRICS tidak hanya mencerminkan kepentingan ekonomi dan politik semata, tetapi juga strategi diplomasi jangka panjang dalam memperkuat identitas nasional di arena global serta membangun aliansi yang sesuai dengan kepentingan strategisnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Keputusan Indonesia untuk menjadi negara mitra BRICS mencerminkan strategi yang matang dalam menghadapi dinamika ekonomi politik global. Berdasarkan teori Ekonomi Politik Internasional (IPE) Robert Gilpin, keputusan ini bukan hanya tentang ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan interaksi antara kekuatan ekonomi dan politik dalam skala internasional. Gilpin berpendapat bahwa negara-negara bertindak strategis untuk memaksimalkan kepentingan nasional mereka dalam sistem ekonomi global yang dinamis, yang terlihat dari langkah Indonesia dalam menjalin kemitraan dengan BRICS. Dari sisi ekonomi, Indonesia memanfaatkan BRICS sebagai wadah untuk diversifikasi mitra dagang dan investasi guna mengurangi ketergantungan pada negara-negara Barat yang selama ini mendominasi perekonomian global. BRICS, yang terdiri dari negara-negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat seperti China, India, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan, menawarkan peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor, meningkatkan arus investasi, serta mengakses sumber pendanaan alternatif melalui *New Development Bank* (NDB). Hal ini penting mengingat selama ini banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi kendala dalam mengakses pinjaman dari lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang seringkali memberikan syarat-syarat ketat yang dapat membatasi kebijakan ekonomi domestik. Dari sudut pandang geopolitik, kemitraan dengan BRICS merupakan langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia dalam sistem internasional yang semakin multipolar. Dengan menjalin hubungan erat dengan negara-negara BRICS, Indonesia dapat meningkatkan daya tawarnya dalam berbagai perundingan ekonomi dan politik global, serta mengurangi dominasi negara-negara maju dalam menentukan arah kebijakan internasional. BRICS, yang berupaya mengurangi dominasi dolar AS dalam transaksi perdagangan global, memberikan peluang bagi Indonesia untuk ikut

serta dalam upaya dedolarisasi dan memperkuat mata uang nasional dalam perdagangan internasional.

Mengacu pada konteks kepentingan nasional, seperti yang dijelaskan oleh Horsman dan Marshall, kepentingan suatu negara tidak bisa didefinisikan secara tunggal, melainkan merupakan hasil dari berbagai dinamika internal dan eksternal yang melibatkan sektor ekonomi, politik, dan sosial. Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS mencerminkan kebutuhan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan akses terhadap teknologi dan inovasi, serta memperkuat kapasitas industri dalam negeri melalui kolaborasi dengan negara-negara BRICS. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan luar negeri bebas-aktif Indonesia, di mana Indonesia tetap menjaga keseimbangan dalam hubungan internasionalnya tanpa terikat pada satu blok kekuatan tertentu. Dalam jangka panjang, kemitraan Indonesia dengan BRICS diharapkan dapat membawa dampak positif dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, energi, teknologi, dan industri manufaktur. Dengan keterlibatan dalam forum ini, Indonesia berpotensi meningkatkan daya saing ekonominya serta memainkan peran yang lebih aktif dalam reformasi sistem ekonomi dan keuangan global. Secara keseluruhan, langkah Indonesia untuk menjadi mitra BRICS bukan hanya keputusan ekonomi semata, tetapi juga bagian dari strategi politik dan diplomasi yang lebih luas dalam menghadapi perubahan tatanan dunia, memastikan keseimbangan dalam hubungan luar negeri, serta memajukan kepentingan nasionalnya di panggung internasional.

5.2. Saran

Meskipun penelitian ini telah berupaya menganalisis faktor-faktor yang mendorong Indonesia menjadi mitra BRICS, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, bagian ini akan menguraikan beberapa kekurangan dalam penelitian serta memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperkaya kajian mengenai keterlibatan Indonesia dalam BRICS secara lebih

komprehensif. Penelitian ini sebagian besar mengandalkan sumber data sekunder, seperti laporan resmi, jurnal akademik, dan publikasi lembaga internasional. Penggunaan wawancara dengan pakar atau pelaku kebijakan luar negeri dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam. Studi ini menyoroti faktor ekonomi politik dalam kemitraan Indonesia dengan BRICS, tetapi kurang membahas aspek sosial-budaya yang mungkin juga berperan dalam keputusan Indonesia. Analisis dalam penelitian ini berfokus pada periode kepemimpinan tertentu, sehingga mungkin tidak mencerminkan dinamika hubungan Indonesia-BRICS dalam jangka panjang. Studi ini belum sepenuhnya mengeksplorasi dampak jangka panjang keterlibatan Indonesia dalam BRICS terhadap kebijakan luar negeri dan ekonomi nasional.

Penelitian selanjutnya dapat melibatkan wawancara dengan pembuat kebijakan, akademisi, atau pengusaha yang terlibat dalam hubungan ekonomi dan diplomasi Indonesia-BRICS. Selain faktor ekonomi dan politik, penelitian mendatang dapat mengeksplorasi aspek sosial-budaya dan dampaknya terhadap kerja sama Indonesia dengan BRICS. Meneliti pengalaman negara lain yang menjadi mitra BRICS dapat memberikan perspektif lebih luas mengenai manfaat dan tantangan dalam kemitraan ini. Studi lebih lanjut bisa mengkaji implikasi jangka panjang dari kemitraan Indonesia dengan BRICS dalam aspek geopolitik, perdagangan, dan investasi jangka panjang. Melakukan penelitian komparatif antara kebijakan luar negeri Indonesia terhadap BRICS dalam berbagai periode pemerintahan untuk melihat perbedaan pendekatan strategis yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. Palgrave Macmillan UK.
<https://link.springer.com/book/10.1057/9780230005778>.
- Gilpin, R., & Gilpin, J. M. (2001). *Global political economy : understanding the international economic order*. Princeton University Press.
https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/264754/mod_resource/content/1/Gilpin_Global%20Political%20Economy.pdf

Jurnal atau Laporan:

- Firdaus, N., Widayanto, S., & Indrayani, I. (2023, November 30). BRICS AGAINST HEGEMONY OF THE UNITED STATES DOLLAR IN THE INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM. *Journal of Social Political Sciences*, Vol. 4 No. 4(November), 451.
<https://doi.org/10.52166/jsps.v5i1.222>.
- Idris, F. N., Dzaky, A. M., Fadhlurrahman, R. H., & Hafsari, S. (2022, Oktober 17). HEGEMONI DOLAR DAN POTENSI KEMUNCULAN MATA UANG BRICS. *Emerald: Journal of Economic and Social Science*, Vol. 1 No. 1 (Oktober), 20, 22, 25.
<https://jurnalsains.id/index.php/emerald/article/view/34>.
- Indrayana, R. Z. (2024, Mei 31). Reviewing the Foreign Policy of the Republic of Indonesia Through President Jokowi's Visit to South Africa in 2023. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 20 No. 1(Mei), 97-107.
<https://doi.org/10.26593/jihi.v20i1.7626.96-107>.
- Jones, G., & Stephany. (2015). Financing global Development: The BRICS New Development Bank. *German Development Institute*, 3. https://www.idos-research.de/fileadmin/migratedNewsAssets/Files/BP_13.2015.pdf.
- Kemenkeu. (2023, April). *Buletin Investasi, Keuangan, dan Ekonomi*.
Kementerian Perdagangan. (2024). *Analisis Kinerja Perdagangan Kelapa Sawit*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

- Kurniawan, F. D., Prawira, R., Eleizar, A. F., & Ridwan, V. M. (2023, Desember 30). Pengaruh Prinsip Bebas-Aktif Dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus BRICS. *Jurnal Ilmiah multidisiplin*, Vol. 1 No. 2(Desember), 361. <https://doi.org/10.62017/merdeka.v1i2.687>.
- NDB. (2014, Juli 15). *Agreement on the New Development Bank – Fortaleza, July 15*. ndb.int. Retrieved Januari 6, 2025, from <https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2022/11/Agreement-on-the-New-Development-Bank.pdf>.
- O'Neill, j. (2001, November 30). *Building Better Global Economic BRICs*, 1. <https://www.almendron.com/tribuna/wp-content/uploads/2013/04/build-better-brics.pdf>.
- Sithole, M. S., & Hlongwane, N. W. (2023, Juli 7). The role of the New Development Bank on Economic growth and Development in the BRICS states. *JMPRA Paper*, No. 119958(Juli), 6. <https://mpa.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/119958>.
- Tiara, D. T., & Mas'udi, S. Y. F. (2023). Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia - Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power. *Journal of Political Issues*, Vol. 4(2023), 6-11. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.95>.
- THE NEXUS AMONG EMPLOYMENT, PRODUCTIVITY AND TRADE OPENNESS: EVIDENCE FROM BRICS AND INDONESIA. (2020, Desember 31). *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, Vol 23 No 4(Desember), 2. <https://doi.org/10.21098/bemp.v23i4.1363>

Berita:

- Andilala. (2024, March 9). *Mari mengenal PT IMIP di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah*. ANTARA News Palu, Sulawesi Tengah. Retrieved Januari 13, 2025, from <https://sulteng.antaranews.com/berita/307389/mari-mengenal-pt-imip-di-kabupaten-morowali-sulawesi-tengah>.
- Akbar, R. J. (2024, Maret 16). *Ekonomi RI Terbesar di Asia Tenggara, Ekonom: Sangat Lumrah*. viva.co.id. Retrieved Februari 5, 2025, from <https://www.viva.co.id/bisnis/1696823-ekonomi-ri-terbesar-di-asia-tenggara-ekonom-sangat-lumrah>.

- Arvirianty, A. (2019, Agustus 21). *China Bangun PLTA Terbesar di RI, Kapasitas Sentuh 9000 MW*. cnbcindonesia.com. Retrieved Januari 13, 2025, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190821194312-4-93758/china-bangun-plta-terbesar-di-ri-kapasitas-sentuh-9000-mw>.
- BAKTI Kominfo. (2023, November 23). *Menkominfo Sambut Baik Kerja Sama RI-China di Sektor Digital*. cnnindonesia.com. Retrieved Februari 2, 2025, from <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231123164440-218-1028153/menkominfo-sambut-baik-kerja-sama-ri-china-di-sektor-digital>.
- Bapaten. (2017, Maret 29). *Indonesia-Rusia Perkuat Kerjasama di Bidang Pengawasan Tenaga Nuklir*. bapaten.go.id. Retrieved Januari 11, 2025, from <https://www.bapeten.go.id/berita/indonesiarusia-perkuat-kerjasama-di-bidang-pengawasan-tenaga-nuklir-134827>.
- brandsouthafrica. (2010, Agustus 23). *South Africa possible new BRIC member*. brandsouthafrica.com. Retrieved Januari 3, 2025, from <https://brandsouthafrica.com/92777/opportunities/bric-230810/>.
- BRICS. (2012, Maret 18). *THE 2ND MEETING OF THE BRICS TRADE AND ECONOMIC MINISTERS*. brics.utoronto.ca. Retrieved Januari 4, 2012, from <http://www.brics.utoronto.ca/docs/120328-trade.pdf>.
- BRICS. (2013, Maret 27). *eThekwini Declaration*. BRICS portal. Retrieved Januari 4, 2025, from <https://infobrics.org/document/15/>.
- CNBC Indonesia. (2023, Oktober 30). *Bejibun! Cadangan Terbukti Minyak RI Masih 2,41 Miliar Barel*. Detik.com. Retrieved 12 2, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231030144918-4-484837/bejibun-cadangan-terbukti-minyak-ri-masih-241-miliar-barel>.
- CNNIndonesia. (2024, Oktober 25). *Menlu Sugiono Sebut Indonesia Ingin Gabung BRICS*. CNNIndonesia. Retrieved November 24, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241025045002-134-1159325/menlu-sugiono-sebut-indonesia-ingin-gabung-brics>.
- CNNIndonesia. (2024, October 25). *Menlu Ungkap Alasan RI Ingin Gabung BRICS Bersama China-Rusia*. CNN Indonesia. Retrieved November 24, 2024, from

- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241025095210-134-1159374/kenapa-indonesia-ingin-gabung-brics-bersama-rusia-china>.
- Datu, P. (2025, Januari 13). *Kian Mesra China-Rusia Lewat Cuan: Segini Catatannya!* kabarbursa.com. Retrieved Januari 17, 2025, from <https://www.kabarbursa.com/market-hari-ini/112659/kian-mesra-china-rusia-lewat-cuan-segini-catatannya>.
- Ditjenbun. (2023, Oktober 7). *Overview Pasar Minyak Sawit India dan Potensi Peningkatan Ekspor CPO Indonesia*. ditjenbun.pertanian.go.id. Retrieved Januari 10, 2025, from <https://ditjenbun.pertanian.go.id/overview-pasar-minyak-sawit-india-dan-potensi-peningkatan-ekspor-cpo-indonesia/>.
- Draper, P. (2012, Maret 16). *BRICS Summit 2012: Inching Towards a BRICS Trade and Investment Agenda*. saiaa.org.za. Retrieved Januari 4, 2025, from <https://saiaa.org.za/research/brics-a-2012-inching-towards-a-brics-trade-and-investment-agenda/>.
- Fahmi, Y. (2023, Juli 18). *Buktikan Industri Jateng Bangkit Pasca Covid-19, Ganjar Pranowo Lepas Ekspor Benang ke India dan Brazil*. liputan6.com,. Retrieved Januari 11, 2025, from <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5347514/buktikan-industri-jateng-bangkit-pasca-covid-19-ganjar-pranowo-lepas-ekspor-benang-ke-india-dan-brazil>.
- Faridz, D. (2025, Januari 23). *Dorong Reformasi PBB, Indonesia Bergabung dengan BRICS*. voaindonesia.com. Retrieved Februari 5, 2025, from <https://www.voaindonesia.com/a/dorong-reformasi-pbb-indonesia-bergabung-dengan-brics/7946787.html>.
- Ferragamo, M., Cara, R., & Smith, S. A. (2024, December 12). *What Is the BRICS Group and Why Is It Expanding?* Council on Foreign Relations. Retrieved Januari 6, 2025, from <https://www.cfr.org/background/what-brics-group-and-why-it-expanding>
- Harahap, M. H. E. S. (2024, Juli 23). *Mengenal kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh*. ANTARA News. Retrieved Februari 12, 2025, from <https://www.antaranews.com/berita/4211031/mengenal-kereta-cepat-jakarta-bandung-whoosh>.

- hmenerg. (2024, September 23). *Rahasia di Balik Keberhasilan China Menjadi Raja Energi Surya Dunia*. hmenerg.com. Retrieved Februari 11, 2025, from <https://www.hmenerg.com/rahasia-di-balik-keberhasilan-china-menjadi-raja-energi-surya-dunia/>.
- Humaspkh. (2024, September 13). *Pertemuan Bilateral Pemerintah RI - Brasil, Mentan Amran Gaet Investasi Peternakan Rp 4,5 Triliun*. ditjenpkh.pertanian.go.id. Retrieved Januari 11, 2025, from <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/1984-pertemuan-bilateral-pemerintah-ri-brasil-mentan-amran-gaet-investasi-peternakan-rp-45-triliun>.
- Ihsan, N. (2025, Januari 23). *RI terus dorong dialog inklusif demi akhiri krisis politik Myanmar*. Antaranews.com. Retrieved Februari 2, 2025, from <https://www.antarnews.com/berita/4602822/ri-terus-dorong-dialog-inklusif-demi-akhiri-krisis-politik-myanmar>.
- Ilmie, M. I. (2017, Agustus 30). *Presiden China pimpin KTT Brics di Xiamen*. Antaranews.com. Retrieved Januari 3, 2025, from <https://www.antarnews.com/berita/649710/presiden-china-pimpin-ktt-brics-di-xiamen>.
- IMF. (n.d.). *Gross Domestic Product*. data.imf.org. Retrieved Januari 6, 2025, from <https://data.imf.org/regular.aspx?key=63122827>.
- IMF. (n.d.). *IMF QUOTAS*. imf.org. Retrieved Februari 5, 2025, from <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2022/IMF-Quotas>.
- Kementerian ESDM. (2021, Juli 27). *Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong*. esdm.go.id. Retrieved Desember 2, 2024, from <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong>.
- Kemenko Perekonomian. (2022, November 13). *Angkat Tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, Indonesia Resmi Menjadi Ketua ASEAN 2023*. ekon.go.id. Retrieved Februari 2, 2025, from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4719/angkat-tema-asean-matters-epicentrum-of-growth-indonesia-resmi-menjadi-ketua-asean-2023>.

- Kemenko Perekonomian. (2025, September 5). *Tandatangani Nota Kesepahaman Local Currency Transaction, Pemerintah Jaga Stabilitas Nilai Tukar Untuk Mendukung Penguatan Ekonomi Nasional*. ekon.go.id. Retrieved Januari 17, 2025, from <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5348/tandatangani-nota-kesepahaman-local-currency-transaction-pemerintah-jaga-stabilitas-nilai-tukar-untuk-mendukung-penguatan-ekonomi-nasional>.
- Kementerian ESDM. (2021, Juli 27). *Kementerian ESDM RI - Berita Unit - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan - Pemerintah Optimistis EBT 23% Tahun 2025 Tercapai*. Kementerian ESDM. Retrieved Februari 11, 2025, from <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/pemerintah-optimistis-ebt-23-tahun-2025-tercapai>.
- Kementerian ESDM. (2024, Oktober 3). *Detil Berita*. Detil Berita - Ditjen Minerba. Retrieved Februari 10, 2025, from <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20241003-batubara-indonesia-pilar-utama-energi-di-era-transisi-energi-dan-hilirisasi-menuju-kemandirian-bangsa>.
- Larasati, S. D. (2024, October 26). *Daftar negara yang berminat gabung BRICS*. ANTARA News. Retrieved Januari 3, 2025, from <https://www.antaraneews.com/berita/4424013/daftar-negara-yang-berminat-gabung-brics>.
- Limanseto, H. (2022, Desember 3). *Menjadi Global Middle Power, Peran Penting dan Strategis Indonesia Kembali Dilanjutkan Dengan Chairmanship ASEAN 2023*. www.ekon.go.id. Retrieved November 21, 2024, from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4786/menjadi-global-middle-power-peran-penting-dan-strategis-indonesia-kembali-dilanjutkan-dengan-chairmanship-asean-2023>.
- Melani, A. (2024, Juni 18). *Menperin: Wuling Jadikan Indonesia Satu-satunya Fasilitas Pabrikasi EV di Luar China*. liputan6.com. Retrieved Januari 13, 2025, from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5622703/menperin-wuling-jadikan-indonesia-satu-satunya-fasilitas-pabrikasi-ev-di-luar-china>.

- Moegiarsa, S. (2022, September 11). *Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan India, Sepakat Mendorong Partisipasi di IPEF*. ekon.go.id. Retrieved Januari 11, 2025, from <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4526/indonesia-perkuat-kerjasama-dengan-india-sepakat-mendorong-partisipasi-di-ipef>.
- Natalia, D. L. (2024, April 2). *Indonesia tawarkan investasi energi terbarukan kepada pengusaha China*. Antaranews.com. Retrieved Januari 13, 2025, from <https://www.antaranews.com/berita/4041132/indonesia-tawarkan-investasi-energi-terbarukan-kepada-pengusaha-china>.
- NDB. (n.d.). *About NDB*. ndb.int. Retrieved Februari 10, 2025, from <https://www.ndb.int/about-ndb/>.
- NDB. (n.d.). *History*. ndb.int. Retrieved Januari 6, 2025, from <https://www.ndb.int/about-ndb/history/>
- NDB. (2016). *Canara Renewable Energy Financing Scheme Project*. ndb.int. Retrieved Januari 6, 2025, from <https://www.ndb.int/project/canara-india/#tabbed-standard>.
- NDB. (2016, Februari 27). *The New Development Bank Signed Headquarters Agreement with the Government of the People's Republic of China*. ndb.int. Retrieved Januari 5, 2025, from <https://www.ndb.int/news/new-development-bank-signed-headquarters-agreement-government-peoples-republic-china>.
- NDB. (2023). *New Development Bank at the 28th United Nations Climate Change Conference*. ndb.int. Retrieved Januari 6, 2025, from <https://www.ndb.int/event/new-development-bank-at-the-28th-united-nations-climate-change-conference/>.
- Octavia, C. F. (2024, August 20). *Rusia siap kerja sama dengan RI kembangkan nuklir sebagai energi*. ANTARA News. Retrieved Januari 11, 2025, from <https://www.antaranews.com/berita/4274499/rusia-siap-kerja-sama-dengan-ri-kembangkan-nuklir-sebagai-energi>.
- Prayudhia, M. C. G. (2023, Maret 13). *Mendag ke India perjuangkan ekspor komoditas unggulan Indonesia*. Antaranews.com. Retrieved Januari 11, 2025, from <https://www.antaranews.com/berita/3437808/mendag-ke-india-perjuangkan-ekspor-komoditas-unggulan-indonesia>.

- Primantoro, A. Y. (2025, Februari 8). *Perkuat Penggunaan Mata Uang Lokal, Kerja Sama Indonesia-China Diperpanjang*. Kompas.id. Retrieved Februari 12, 2025, from <https://www.kompas.id/artikel/perkuat-penggunaan-mata-uang-lokal-kerja-sama-indonesia-china-diperpanjang>.
- Puspa, T. (2023, November 30). *Indonesia Kerjasama Deforestasi Bersama Brasil Dan Kongo*. rri.co.id. Retrieved Februari 12, 2025, from <https://www.rri.co.id/bisnis/465001/indonesia-kerjasama-deforestasi-bersama-brasil-dan-kongo>.
- Putri, A. M. H. (2023, Mei 16). *Punya Cadangan Gas Raksasa, Tapi RI Impor dari Negara Ini*. CNNIndonesia. Retrieved Desember 2, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230516075229-128-437638/punya-cadangan-gas-raksasa-tapi-ri-impor-dari-negara-ini>.
- Rev. (2023, Agustus 25). *Negara BRICS vs G20 vs G7, Siapa Raja Ekonomi Dunia?* CNBCIndonesia. Retrieved November 24, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230825132327-128-466136/negara-brics-vs-g20-vs-g7-siapa-raja-ekonomi-dunia>.
- Reuters. (2021, September 28). *Krisis Energi China Picu Lonjakan Permintaan Batu Bara*. voaindonesia.com. Retrieved Februari 10, 2025, from <https://www.voaindonesia.com/a/krisis-energi-china-picu-lonjakan-permintaan-batu-bara-/6248455.html>.
- Riedho, M. R. Z. (2024). Strategi Tiongkok dalam Memanfaatkan Momentum Kebijakan Larangan Ekspor Biji Nikel oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Ilmia Hubungan Internasional*, Vol. 20, 5-17. <https://doi.org/10.26593/jihi.v20i1.7156.74-95>.
- Riswan, K. K. (2023, Oktober 26). *MenKopUKM jajaki kerjasama pengembangan UMKM dengan Afrika Selatan*. Antaranews.com. Retrieved Januari 17, 2025, from <https://www.antaranews.com/berita/3793572/menkopukm-jajaki-kerja-sama-pengembangan-umkm-dengan-afrika-selatan>.
- Riswan, K. K. (2024, September 10). *Sinergi Indonesia-Afrika untuk memperluas cakupan energi terbarukan*. Antaranews.com. Retrieved Januari 17, 2025,

- from <https://www.antaranews.com/berita/4321915/sinergi-indonesia-afrika-untuk-memperluas-cakupan-energi-terbarukan>.
- Rosa, N. (2023, Maret 13). *Gerakan Non-Blok: Latar Belakang, Tujuan, Anggota & Peran Indonesia*. Detik.com. Retrieved Desember 2, 2024, from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6615990/gerakan-non-blok-latar-belakang-tujuan-anggota-peran-indonesia>.
- Sabat, O. (2021, October 7). *Sejarah Jakarta Informal Meeting, Berhasil Akhiri Konflik Kamboja-Vietnam*. detikcom. Retrieved November 24, 2024, from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5757087/sejarah-jakarta-informal-meeting-berhasil-akhiri-konflik-kamboja-vietnam>.
- Sari, L. N. (2023, November 29). *Peningkatan Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara Afrika Pascakunjungan Kenegaraan Presiden RI*. setkab.go.id. Retrieved Januari 17, 2025, from <https://setkab.go.id/peningkatan-hubungan-indonesia-dengan-negara-negara-afrika-pascakunjungan-kenegaraan-presiden-ri/>.
- Singgih, V. (2024, January 29). *Hilirisasi nikel: Setumpuk masalah di balik ketergantungan Indonesia terhadap investasi China - 'Demam nikel membuat pemerintah kehilangan akal sehat'*. BBC. Retrieved Januari 13, 2025, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw4m1k0j7vro>.
- Sofia, H. (2025, January 8). *BRICS, babak baru diplomasi ekonomi Indonesia*. ANTARA News. Retrieved Januari 7, 2025, from <https://www.antaranews.com/berita/4570074/brics-babak-baru-diplomasi-ekonomi-indonesia>.
- Sullivan, J. (2023, April 24). *BRICS Currency Could End Dollar Dominance*. Foreign Policy. Retrieved Januari 7, 2025, from <https://foreignpolicy.com/2023/04/24/brics-currency-end-dollar-dominance-united-states-russia-china/>.
- Supriyanto, B. E. (2024, Januari 29). *Peran APBN untuk Pengembangan Infrastruktur Digital di Daerah Terpencil*. djpb.kemenkeu.go.id. Retrieved Februari 11, 2025, from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita->

[terbaru/3669-peran-apbn-untuk-pengembangan-insfrastruktur-digital-di-daerah-terpencil.html](#).

Sekretaris Kabinet. (2022, Desember 30). *Keberhasilan Keketuaan Indonesia pada Forum G20*. setkab.go.id. Retrieved November 21, 2022, from <https://setkab.go.id/keberhasilan-keketuaan-indonesia-pada-forum-g20/>.

Setiawan, A. (2024, September 5). *Menlu sebut keputusan Indonesia gabung BRICS ada pada Prabowo*. Antaranews. Retrieved November 21, 2024, from <https://www.antaranews.com/berita/4310591/menlu-sebut-keputusan-indonesia-gabung-brics-ada-pada-prabowo>.

Setiawan, V. N. (2024, Juli 1). *Umur Cadangan Nikel RI Tinggal 30 Tahun Lagi, Ini Buktinya!* cnbcIndonesia. Retrieved Desember 2, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240701164552-4-550858/umur-cadangan-nikel-ri-tinggal-30-tahun-lagi-ini-buktinya>.

Taufani, M. R. I. (2023, April 23). *Membongkar Perang Dagang AS Vs China & Upaya Dedolarisasi*. cnbcindonesia.com. Retrieved Februari 10, 2025, from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230421165302-128-431640/membongkar-perang-dagang-as-vs-china-upaya-dedolarisasi>.

Taufani, M. R. I. (2023, Novemeber 23). *China, Rusia & India Ramai-Ramai Dongkrak Harga Batu Bara*. cnbcindonesia.com. Retrieved Februari 10, 2025, from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231123014424-128-491249/china-rusia-india-ramai-ramai-dongkrak-harga-batu-bara>.

Zulfikar, F. (2024, Februari 17). *10 Negara Demokrasi Terbesar di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?* detikcom. Retrieved Februari 5, 2025, from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7198230/10-negara-demokrasi-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-berapa>.